

Laporan Hasil Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
Tahun Anggaran 2020

**KONTINUITAS DAN PERUBAHAN DI SUKADANA ABAD
XVIII – XIX: ISLAMISASI, PERDAGANGAN DAN
ANTI-KOLONIALISME**



Tim Peneliti:

Prof. Dr. M. Dien Majdid (Koordinator)
Johan Wahyudi, M. Hum (Anggota)

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN) LP2M
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2020**

Lembar Pengesahan

Laporan penelitian yang berjudul **KONTINUITAS DAN PERUBAHAN DI SUKADANA ABAD XVIII – XIX: ISLAMISASI, PERDAGANGAN DAN ANTI-KOLONIALISME** merupakan akhir pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **M. DIEN MADJID DAN JOHAN WAHYUDI**, dan telah memenuhi ketentuan dan kriteria penulisan laporan akhir penelitian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 20 September 2020

Peneliti,

Prof. Dr. M. Dien Madjid
NIP 19490706 190109 1001

Mengetahui,

Kepala Pusat,
Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN)
LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketua Lembaga,
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

DR. IMAM SUBCHI, MA.
NIP. 19670810 200003 1 001

JAJANG JAHRONI, MA., PhD
NIP. 19670612 19940 3 1006

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Prof. Dr. M. Dien Madjid
Jabatan : Guru Besar (IVe)
Unit Kerja : Fakultas Adab dan Humaniora
Alamat : Komplek Pejabat Dep. Agama No. 3/b.2 Kelurahan
Bambu Apus, Ciputat, Jakarta Selatan (15415), Indonesia.

Dengan ini menyatakan bahwa,

1. Judul penelitian ***KONTINUITAS DAN PERUBAHAN DI SUKADANA ABAD XVIII – XIX: ISLAMISASI, PERDAGANGAN DAN ANTI-KOLONIALISME*** merupakan karya orisinal saya.
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab mengembalikan 100 % dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada PUSLITPEN LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 2 tahun berturut – turut

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 September 2020

Yang menyatakan,

m

Prof. Dr. M. Dien Madjid
NIP 19490706 190109 1001

ABSTRAK

Sukadana merupakan salah satu pelabuhan tua yang masih eksis hingga abad XIX. Semula, pelabuhan ini dioperasikan oleh Kesultanan Sukadana. Setelah kekuatan lokal ini takluk kepada Hindia Belanda, kerajaan ini dipecah menjadi tiga, yakni kerajaan Sukadana, Simpang dan Matan. Pada 1828, Kesultanan Sukadana dihapus dan diganti oleh Nieuw Brussels. Raja Akil, sekutu Belanda dari Siak didudukkan sebagai sultan pertamanya.

Banyaknya penguasa lokal di Sukadana membuat kontestasi politik di wilayah ini menghangat. Kendati Panembahan Matan menyatakan tunduk pada Belanda, ia tidak mengakui kedudukan Nieuw Brussels sebagai penguasa wilayah Matan. Padahal kesultanan baru ini merupakan bentukan Hindia Belanda. Belanda semakin curiga dengan adanya laporan yang mengatakan Matan menjadi dalang atas sejumlah kerusakan di perairan Karimata.

Penelitian ini menyorot pada kelanjutan dan perkembangan pelabuhan Sukadana sebagai salah satu pusat ekonomi maritim di Borneo. Beberapa bahasan lainnya yang relevan juga diketangkahkan sebagai bahan analisa penopangnya, seperti wacana anti-kolonialisme di kalangan bangsawan Sukadana, islamisasi dan perdagangan lokal. Historiografi ini bertumpu pada pendekatan sejarah politik dan ekonomi.

Kata Kunci: Sukadana, Perdagangan, Anti-kolonialisme, Islamisasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, penelitian tentang sejarah perdagangan dan pelabuhan di Sukadana ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam tetap perlu ditujukan pada Nabi Muhammad SAW, junjungan umat Islam yang berjasa besar membukakan masa gemilang ilmu pengetahuan hingga saat ini.

Tidak mudah kiranya melakukan penelitian dan penulisan laporan penelitian di masa pandemi COVID-19. Ini merupakan suatu periode sulit, karena peneliti tidak bisa datang langsung ke Sukadana, yang terletak di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Padahal, objek penelitian ini termasuk dalam kajian sejarah lokal, yang referensi utamanya masih banyak yang berbentuk sejarah lisan dari para keturunan raja Sukadana, Matan atau Simpang.

Di samping sumber oral, penelitian ini juga menggunakan arsip berbahasa Belanda sebagai rujukannya. Kegiatan ini pun tidak bisa terlaksana dengan baik, mengingat gedung penyimpanan arsip (ANRI) terletak di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, dan sejak Maret 2020, kawasan tersebut termasuk dalam areal Pembatasan Skala Besar (PSBB). Kesempatan beberapa hari yang sempat terbuka untuk mengunjungi ANRI pun belum mampu dimaksimalkan untuk mendapatkan arsip kolonial yang memadai.

Masa Pandemi adalah masa yang berat bagi peneliti. Banyak hal yang harusnya bisa dilakukan menjadi tidak bisa direalisasikan. Namun, peneliti tetap yakin, akan selalu ada hikmah dibalik ini.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terimakasih kepada PUSLITPEN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan dukungan moril dan materil demi menyukseskan penelitian ini.

Tentu masih banyak kekuarangan yang terdapat dalam laporan ini. Harapan untuk perbaikan penulisan sejarah Sukadana di masa depan, tentu masih mungkin diwujudkan.

Ciputat, 20 September 2020

Peneliti

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Teori	6
F. Metode	9
G. Data dan Sumber Data	11
H. Rencana Pembahasan	12
I. Peneliti	12
BAB II: PROFIL WILAYAH DAN MASYARAKAT	13
A. Gambaran Geografis dan Masyarakat	13
B. Kondisi Sukadana sampai Abad XIX	16
BAB III: DALAM PUSARAN KEMELUT	20
A. Dari Bisnis Lokal ke Dominasi Kolonial	20
B. Sultan Jamaludin melawan Belanda dan Tengku Akil	30
C. Dilema Nieuw Brussels	33
D. Kesultanan Nieuw Brussels dan Pemerintah Hindia Belanda	42
E. Masalah Matan Diambil Alih Gubernur	42
F. Gubernur Mengelola Sampang dan Matan; Suatu Kelanjutan	46
1. Sampang	46
2. Matan	53
BAB IV: INSTALASI EKONOMI DAN POLITIK KOMODITAS	59
A. Pelabuhan Sukadana	59
B. Menghadapi Bajak Laut	62
C. Aneka Komoditas	64
1. Sarang Burung dan Garam	64
2. Getah Perca	75

3. Opium	77
4. Emas dan Permata	78
D. Islamisasi	79
E. Perdagangan dan Anti-Kolonialisme	81
BAB V: KESIMPULAN	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalimantan (Borneo) merupakan pulau yang masih diselimuti misteri kelampauan. Wacana kesejarahan di pulau ini masih mahal, terlebih wacana sejarah Islam. Jika dibandingkan historiografi mengenai Jawa dan Sumatra, pulau ini relatif tertinggal. Padahal, pulau ini menyimpan potensi besar sebagai salah satu wilayah yang memproduksi kebaruan dalam wacana kesejarahan. Dinamika historiografi, salah satunya ditentukan dengan hadirnya tema-tema baru yang layak diketahui publik. Di samping itu, pendakuan historis tentu saja penting sebagai identitas kedaerahan juga mempertebal identitas nasional.¹

Meskipun Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia, di kancan penulisan sejarah, suaranya tidak terlalu terdengar. Hal ini mengingat langkanya penulisan sejarah yang menasar tema-tema di pulau ini. Jikapun ada, sifatnya hanya hidup di lokalitas t

Tertentu, dan belum beranjak ke luar daerah. Dalam historiografi, fenomena tersebut dikatakan sebagai sejarah lokal. Sejarah lokal merupakan wacana kesejarahan yang hidup dalam lokus terbatas, tidak populer atau hanya menjadi konsumsi suatu suku bangsa tertentu.² Oleh sebab itu, sudah selainnya sejarawan masa kini mengarahkan pandangannya pada wilayah sejarah lokal, termasuk sejarawan yang hidup di PTKIN dan PTKIS.

Sukadana merupakan salah satu sejarah lokal yang layak diangkat ke panggung sejarah nasional. Wilayah ini terletak di daerah yang sekarang bernama Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Berbeda dengan Pontianak, wacana sejarah Sukadana tidak terlalu populer. Di masa silam, Sukadana dikenal sebagai pelabuhan yang telah eksis sejak masa Hindu-Budha. Pelabuhan ini telah disebut

¹ I. Nengah Duija, "Tradisi lisan, naskah, dan sejarah Sebuah catatan politik kebudayaan," dalam *Wacana*, Vol. 7, No. 2, 2005, hal. 115-128.

² Singgih Tri Sulistiyono, "Penulisan Sejarah Lokal di Era Otonomi Daerah: Metode, Masalah, dan Strategi," Makalah, 2009, hal. 1 – 3.

sebagai salah satu pusat kekuasaan Majapahit di lepas pantai Jawa.³ Pelabuhan ini mengilhami lahirnya dua kekuatan lokal yang dalam perkembangannya terlibat dalam dinamika hubungan yang kompleks. Dua kekuatan itu adalah Kerajaan Simpang dan Kerajaan Matan.

Menurut sumber lokal, disebutkan bahwa terdapat kerajaan besar yang telah ada di Kalimantan sejak abad ke-13 bernama Tanjung Pura (lama). Kerajaan ini memiliki luas wilayah yang terbentang dari Tanjung Dato Sambas hingga Tanjung Sambar Kotawaringin. Nama kerajaan Tanjung Pura (lama) muncul kembali menjadi kerajaan Tanjung Pura (baru) pada abad ke-18. Latar belakang perubahan ini didahului oleh adanya pergumulan internal dan eksternal. Pada perkembangannya, kerajaan Tanjungpura (baru) terpecah menjadi tiga kerajaan, yakni kerajaan Matan, kerajaan Sukadana dan kerajaan Simpang.

Kerajaan Tanjung Pura mengalami perubahan nama setelah perpindahan pusat kerajaan (Muliakarta, Sukadana dan Matan) dan terbagi menjadi beberapa kerajaan yang dikuasai oleh kakak beradik putera Gusti Syarif Kesukma Bandan bergelar Sultan Muizuddin⁴. Gusti Bendung (Pangeran Ratu Agung) bergelar Sultan Muhammad Tajuddin yang merupakan putra mahkota menjadi raja kerajaan Matan. Sementara anak ketiga bernama Gusti Muhammad Ali menikah dengan Putri Panembahan Sanggau, dan kemudian menjadi Raja Sanggau dengan gelar Panembahan Sanggau Surya Negara.⁵

Kemudian, anak pertama Sultan Muhammad Tajuddin bernama Gusti Kencuran bergelar Sultan Ahmad Kamaluddin menggantikan ayahnya menjadi Raja Matan. Pada masa ini, anak yang kedua Sultan Muizuddin atau paman Sultan Ahmad Kamaluddin bernama Gusti Irawan bergelar Sultan Mangkurat menjadi Raja Muliakarta atau Kayong-Matan di Ketapang. Putra sulung Sultan Ahmad Kamaluddin bernama Gusti Asma selanjutnya menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Muhammad Jamaluddin dan memindahkan pusat kerajaan ke Simpang atau Simpang-Matan.⁶

³ Sunarningsih, "Kerajaan Negara Daha di Tepian Sungai Negara, Kalimantan Selatan," dalam *Naditira Widya*, Vol. 7, No. 2, 2013, hal. 85-105.

⁴ Pendapat berbeda diungkapkan oleh J.U. Lontaan dan Pembayun Sulistyorini yang menyatakan bahwa terjadi perebutan kekuasaan kakak beradik putera Sultan Zainuddin dan Putera Mahkota Panembahan Ratu Agung mendirikan kerajaan Simpang pada tahun 1735 sampai dengan 1824.

⁵ Gusti Mahirat, *Silsilah Kerajaan Simpang* (t.tp: tanpa penerbit, 1956) hal. 57 – 58; Lihat juga Gusti Mhd. Mulia, *Sekilas Menapak Langkah Kerajaan Tanjungpura* (Pontianak: Firma Muara Mas. 2007) hal. 23 – 24.

⁶ Gusti, *Silsilah ...*, hal. 60 – 62; lihat juga; Gusti, *Sekilas ...*, hal. 25.

Pendapat lain menyatakan bahwa Kerajaan Simpang didirikan oleh Pangeran Ratu Kasuma Ningrat⁷ atau Pangeran Kusumaningrat⁸. Sementara dalam lampiran silsilah disertai J.P.J. Barth, disebutkan bahwa raja pertama Kerajaan Simpang yaitu Panembahan Anom Surianingrat.⁹ Pada 1828, wilayah Sukadana berubah menjadi *Nieuw Brussel* setelah Sultan Jamaluddin dimakzulkan dan digantikan oleh Tengku Akil dari Kerajaan Siak dengan gelar Sultan Abdul Jalil Yang Dipertuan Syah di Brussel.¹⁰ Tercatat pada 1832, terdapat 81 rumah, dengan 400 orang Melayu, 1 orang *ambtenaar* dan 20 orang tentara, dengan jumlah penduduk 421 orang.¹¹ Usaha untuk menyatukan kembali Kerajaan Tanjung Pura melalui *Nieuw Brussel* tidak berhasil karena Kerajaan Matan dan Simpang tidak mengakui kepemimpinan Raja Akil. Perbedaan pendapat ini menyebabkan usaha untuk melakukan kajian arsip kolonial menjadi penting.

Pada saat yang sama, terjadi perebutan bekas wilayah perdagangan di Borneo yang pernah dikuasai oleh *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dan *East India Company* (EIC) atau antara kongsi dagang Belanda dan Inggris setelah berlakunya Traktat London pada 13 Agustus 1814. Pengaruh eksternal ini menyebabkan perubahan pola hubungan antarkerajaan seperti kerja sama antar kerajaan untuk membendung pengaruh eksternal atau justru konflik antarkerajaan semakin meruncing akibat pengaruh eksternal tersebut. Dinamika internal dan eksternal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam dan komprehensif. Sukadana menjadi saksi bisu perebutan kuasa yang didasari oleh ambisi politik para pemangku kekuasaan lokal dengan kongsi-kongsi dagang asing.

Kajian mengenai sejarah Sukadana agaknya masih terkurung dalam lingkup sejarah lokal. Padahal, jika ditelisik lebih lanjut, akan banyak informasi yang penting terkait dengan perkembangan sejarah Kalimantan yang memang dalam konteks penulisan sejarah nasional, masih minim dilirik para peneliti dan penulis sejarah. Di samping itu, bagaimanapun kesultanan Matan dan Simpang merupakan dua kekuatan Islam yang pernah berkuasa di pelabuhan ini serta jalur sungai yang membelah Kota Sukadana. Dengan mengkaji sejarah Sukadana, secara tidak langsung, peneliti juga akan menyibak tabir tentang sejarah Islam di Borneo yang keadaannya juga belum banyak ditengok para peneliti dan penulis sejarah.

⁷ H. Von. Dewall, "Matan, Simpang, Soekadana, de Karimata-eilanden en Koeboe (Wester-afdeeling van Borneo)" dalam *Tijdschrift voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (TBG), Vol. 11, 1862, hal. 61.

⁸ P. J. Veth, *Borneo's Westerafdeeling Geographisch, Statistisch, Historisch. Voorafgegaan door eene algemeene schets des ganschen eilands, Eerste deel* (Zaltbommel: Joh Noman en Zoon. 1854) hal. 245.

⁹ J.P.J. Barth, "Overzicht der Afdeeling Soekadana", dalam *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (VBG), Deel L. 2^e Stuk, 1896, Hal. 68.

¹⁰ Bart, "Overzicht ...", hal. 13; lihat juga Yusri Darmadi dan Ika Rahmatika Chalimi, "*Nieuw Brussel*" di *Kalimantan: Peran Strategis Sukadana pada Abad ke-19* (Yogyakarta: Kepel Press, 2017) hal. 35.

¹¹ , E.A. Francis, "Westkust van Borneo in 1832", dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* (TNI), Vol. 4, No. 2, 1842, hal. 32.

Tidak dapat dipungkiri, masalah utama dalam pengkajian sejarah lokal adalah kelangkaan sumber. Penulisan sumber lokal tentu saja ada, sebagaimana yang ditulis oleh Yusri Darmadi dan Ika Rahmatika Chalimi yang berbentuk buku dengan judul “*Nieuw Brussel*” di Kalimantan: *Peran Strategis Sukadana pada Abad ke-19* (terbit 2017), namun ini belum sepenuhnya menjawab kegelisahan intelektual penulis terkait dengan bagaimana kompleksitas sejarah sosial yang terbabar di Sukadana. Sukadana merupakan pelabuhan yang bertumpu pada transportasi pesisir dan sungai. Masyarakat yang berdiam di sana mengambil peran yang jamak, seperti sebagai nelayan, petugas pabean, ulama, pedagang keliling atau yang berdiam di pasar dan sebagainya. Protret sejarah kecil ini yang penulis ingin masukkan dalam narasi kesejarahan Sukadana kelak.

Untuk menyikapi hal di atas, agaknya perlu memperoleh sumber-sumber primer yang informasinya dapat dimaksimalkan. Sumber-sumber berbahasa Belanda yang tersimpan di Gedung ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) yang ada di Jakarta, agaknya dapat mengobati kegalauan penulis. Berkaca pada penelitian-penelitian yang disponsori Kementerian Agama beberapa tahun terakhir, penulis banyak memperoleh tambahan informasi penting dari sumber tertulis ini. Catatan Belanda banyak mengabarkan keadaan politik di suatu wilayah. Di samping itu, perhatian para juru tulis Belanda juga kerap mengarah pada keadaan sosial suatu masyarakat, bagaimana mereka mencari nafkah, bagaimana sikap mereka kepada pendatang Eropa dan aneka ekspresi sosial lainnya. Dalam penulisan sejarah, informasi semacam ini tentu akan menimbulkan suatu semangat *human interest* yang terasa dalam suatu teks sejarah, bukan semata-mata mengkisahkan perebutan tahta, peran, diplomasi yang melulu menempatkan penguasa sebagai aktor tunggal dalam sejarah.¹²

Salah satu jenis arsip yang memotret kehidupan sosial dan politik di Nusantara berjenis *daghregister* atau register harian. Arsip ini adalah bundel arsip yang sejak masa VOC yakni pada 1619, dikeluarkan setahun sekali (semacam *annual report*). Di dalam *daghregister* terkandung beragam informasi yang berharga menyangkut kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya dari suatu kerajaan atau daerah, yang dicatat berdasarkan tanggal dan bulan kejadian. Tentu saja, ini merupakan harta karun bagi para pengkaji sejarah, karena narasi sejarah amat berkaitan dengan aspek kronologi (penanggalan), dan ini merupakan syarat keabsahan suatu kisah sejarah, dalam sudut pandang tertentu.

Selanjutnya, guna mengatasi kekeringan data, penulis juga akan melakukan studi lapangan. Sukadana merupakan wilayah yang tidak seramai kota-kota lain di Kalimantan. Sebelum memasuki pusat kota dari arah Ketapang, pengunjung akan melintasi jembatan besar yang dibawahnya mengalir Sungai Melano. Sungai inilah yang menghubungkan wilayah pedalaman yang di abad 18 dan 19 masih banyak dihuni suku Dayak dengan wilayah pesisir. Menurut informasi awal, disebutkan

¹² Mengenai penggunaan arsip berbahasa Belanda sebagai sumber sejarah Indonesia lihat J. K. J. De Jonge, *De Opkomst van Nederlansch Gezag in Oost – Indie (1595 – 1610)* (’s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1865) hal. i – ix.

bahwa ibukota kerajaan Matan dan Simpang berada di pesisir Sungai Melano. Untuk mencapai ke sana, dibutuhkan kapal boat cepat yang sampai ke lokasi dalam waktu satu sampai dua jam.

Dari pengkajian arsip Belanda dan studi lapangan diharapkan gambaran mengenai kondisi sosial, politik, ekonomi serta perkembangan dakwah Islam dapat tergambar dengan lengkap. Penelitian ini adalah pintu gerbang untuk memetakan kembali sejarah Borneo yang sempat hilang, terlebih di masa-masa Kemerdekaan Indonesia sampai masa kini.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana dinamika perdagangan di Sukadana?
2. Apa saja bentuk perlawanan yang dilakukan penduduk Sukadana kepada VOC atau EIC?
3. Bagaimana strategi dakwah Islam di sukadana, baik menyentuh wilayah pedalaman atau pesisir ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian pengembangan nasional yang berfokus pada kajian sejarah ini bertujuan untuk

1. Memahami keterkaitan antara perdagangan dan dakwah Islam di kawasan Sukadana
2. Mengetahui bentuk-bentuk resistensi lokal yang dilakukan Sukadana melawan penjajah Eropa
3. Memahami tentang informasi kesejarahan Borneo yang belum banyak diungkap ke panggung sejarah nasional.

D. Kajian Pustaka

Di abad 19, sejumlah penulis Belanda sudah ada yang mempunyai ketertarikan untuk membahas tema-tema sosial di Borneo. J. P. J. Barth seorang administratur Belanda sempat mengabadikan profil daerah Sukadana dalam “Overzicht der Afdeeling Soekadana” (1896) yang artinya suatu pandangan tentang Afdeeling Soekadana. *Afdeeling* merupakan tingkat administrasi yang setara dengan Kecamatan. Catatan Barth ini membicarakan gambaran umum profil daerah

Sukadana termasuk tentang kondisi masyarakat dan potensi ekonominya.¹³ Terbitnya buku ini dimaksudkan sebagai pengantar pengetahuan tentang daerah Sukadana. Penyajian Barth merupakan bentuk klasik dari penulisan sejarah yang bertumpu pada gaya naratif. Di dalamnya belum tersemat analisa menggunakan teori-teori sosial yang menjadi kerangka penelitian sejarah. Dengan kata lain, model penyajian Barth berbeda dengan gaya penulisan penelitian ini yang sudah mengadopsi model modern, dengan memasukkan analisa berbasis teori sosial.

Hasanuddin memperkenalkan temuan-temuan historisnya melalui buku yang berjudul *Sukadana; Suatu Tinjauan Sejarah Tradisional di Kalimantan Barat* (terbit 2000). Penulisan Hasanuddin bertumpu pada tema klasik penulisan sejarah yang menyorot bangkit dan tumbuhnya suatu peradaban atau kerajaan, yang dalam hal ini adalah Sukadana. Ia mengkisahkan tentang kronologi terbentuknya kerajaan Matan dan Simpang serta bagaimana dinamika yang dialami oleh mereka sampai dengan ditundukkan oleh pemerintahan Hindia Belanda.¹⁴ Tema mengenai perkembangan Islam di wilayah pesisir atau pedalaman serta seputar perdagangan lokal yang berhubungan dengan rute dagang internasional tidak banyak disinggung di buku ini. Dua hal tersebut merupakan inti pembahasan yang akan dieksplorasi oleh penulis.

Yusri Darmadi dan Ika Rahmatika Chalimi melalui bukunya "*Nieuw Brussel*" di *Kalimantan: Peran Strategis Sukadana pada Abad ke-19* merupakan bacaan pertama yang mengantar penulis memahmi tentang kesejarahan Sukadana. Kedua penulis buku ini meyakini bahwa Sukadana merupakan pelabuhan penting yang didatangi banyak saudagar asing di masa lalu. Pada abad 18, banyak pedagang Arab dari Palembang yang berdatangan ke sini guna melakukan transaksi perdagangan dengan penduduk lokal.¹⁵ Dalam pengambilan informasi, penulis buku ini juga telah menyorot sumber-sumber berbahasa Belanda. distingsi dengan penelitian penulis adalah sasaran yang tidak hanya menyorot di wilayah Sukadana, namun dengan wilayah pedalaman. Tema ini yang tidak terlalu banyak dikupas di buku ini.

E. Teori

Perdagangan erat kaitannya dengan dakwah Islam. Sinergi ini hampir dapat ditemukan dalam banyak kisah islamisasi di Nusantara seperti di Aceh¹⁶, Cirebon¹⁷,

¹³ J.P.J. Barth, "Overzicht der Afdeeling Soekadana", dalam *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (VBG), Deel L. 2^o Stuk, 1896.

¹⁴ Hasanuddin, *Sukadana; Suatu Tinjauan Sejarah Kerajaan Tradisional Kalimantan Barat* (Pontianak: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, 2000)

¹⁵ Yusri Darmadi dan Ika Rahmatika Chalimi, "*Nieuw Brussel*" di *Kalimantan: Peran Strategis Sukadana pada Abad ke-19* (Yogyakarta: Kepel Press, 2017) hal. 4.

¹⁶ Mengenai bagaimana Islam sampai di Aceh melalui jalur perdagangan, lihat A. Hasjmy, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia* (Bandung: Penerbit Ma'arif, 1993)

sampai Makassar¹⁸. Dari temuan itu, penulis memberanikan diri untuk menggunakan teori perdagangan sebagai pisau analisa untuk membedah pesona islamisasi yang ada di Borneo, khususnya di Sukadana. Secara geografis, wilayah ini dekat dengan jalur sungai ke pedalaman, sehingga memungkinkan adanya para pendatang untuk masuk ke tempat yang lebih dalam lagi, bukan hanya untuk mencari komoditas perdagangan namun juga menyebarkan agama Islam.

J. C. Van Leur lewat bukunya *Indonesian Trade and Society* memberikan pemahaman pada pengulas sejarah akan pentingnya mengupas perdagangan sebagai gerak hidup kemanusiaan. Aparat-aparat perdagangan menempati ruang inklusif sebagai sumber suara yang mempertemukan banyak manusia untuk berinteraksi. Mereka didorong oleh kebutuhan yang sama, yakni ingin memenuhi kebutuhan mereka, seperti untuk membeli bahan makanan, kain untuk pakaian atau benda-benda lain. Barter atau saling bertukar barang yang nilainya disepakati sepadan menjadi alat tukar yang telah eksis sejak masa praaksara. Di abad 17 dan 18, alat tukar semacam ini sudah mulai berganti pada penggunaan mata uang.¹⁹

Perdagangan bukan hanya kegiatan jual dan beli semata. Lebih dari itu, banyak aspek yang dapat dikupas seperti bagaimana perpindahan orang yang sedang mencari suatu komoditas dari pesisir ke pedalaman. Para petani atau pekebun yang bercocok tanam. Nelayan yang sedang mencari ikan, lalu sebagian hasil ikannya dijadikan ikan asin. Terdapat pula kerja sampingan nelayan seperti sebagai petani garam. Beberapa kegiatan itu merupakan wajah lain dari aspek perdagangan yang menurut Van Leur dapat dijadikan suatu ilustrasi dari peradaban manusia. Oleh sebab itu, dengan menjelaskan kegiatan ekonomi baik makro maupun mikro, maka sejatinya sedang menjelaskan bagaimana peradaban manusia itu tumbuh dan berkembang.

Van Leur tidak menampik fakta sejarah bahwa orang Arab merupakan agen perdagangan utama di Nusantara. Mereka adalah para pelaut yang gigih, dibekali oleh teknologi perkapalan yang baik, mampu mengarungi laut untuk dapat berdagang di suatu pelabuhan Nusantara.²⁰ Pembawaan serta perangai mereka juga mampu mencuri hati para pemuka masyarakat hingga masyarakat kelompok bawah

¹⁷ Tentang bagaimana islamisasi yang ada di Cirebon lihat M. Sanggupri Bochari, *Sejarah kerajaan tradisional Cirebon* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001)

¹⁸ Proses dikenalnya Islam di Makassar menyinggung adanya kontestasi antara para pendakwah dari Minangkabau pimpinan Datuk ri Bandang yang harus meyakinkan Raja Luwu untuk Islam. Di sisi lain Portugis juga mengajak Raja Luwu untuk memeluk Katolik. Pada akhirnya Raja Luwu memeluk Islam yang segera diikuti oleh kerajaan Goa, Tallo dan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi bagian Selatan. Lebih lanjut lihat Ahmad M. Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa abad XVI sampai abad XVII* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005)

¹⁹ J. C. Van Leur, *Indonesian Trade and Society; Essays in Asian Social and Economic History* (USA: Foris Publication, 1983) hal. 30 – 32.

²⁰ Van Leur, *Indonesian ...*, hal. 11

sehingga rasa penasaran semakin tumbuh di benak lawan bicaranya. Salah satu tema pembicaraan para pendatang Arab dengan orang pribumi adalah mengenai Islam. Berkat hubungan yang kian akrab, satu persatu pemuka masyarakat mampu diyakinkan untuk memeluk Islam, sebagaimana yang terlihat dalam babak terakhir runtuhnya Majapahit yang salah satu penyebabnya adalah banyaknya perangkat istana Majapahit yang memeluk Islam lantas berbalik mendukung Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa.²¹

Penulis mengadakan modifikasi pada teori perdagangan Van Leur yang kebanyakan mengambil even sejarah berlatar abad 16 dan 17, digeser ke masa abad 18 dan 19. Perkembangan Islam tentu sudah massif di wilayah pesisir, dengan kerajaan Sukadana, Matan dan Simpang sebagai lokus-lokus kuasa Islam di Sukadana. Dalam konteks ini, penulis membicarakan perdagangan sebagai aspek yang menghubungkan wilayah pesisir dengan pedalaman yang saat itu masih dihuni oleh orang Dayak yang masih menganut kepercayaan nenek moyang. Sedikit atau banyaknya pengaruh Islam di sana perlu untuk dilihat lebih lanjut.

Wacana antikolonialisme sempat mengemuka di Sukadana ketika sebagian bangsawan kerajaan lokal menilai aktivitas VOC dan EIC mulai mengganggu kepentingan mereka. Campur tangan para pendatang Barat didorong oleh keinginan mereka menguasai komoditas perdagangan Sukadana, sekaligus menguasai pasar dan pelabuhan Sukadana. Dalam beberapa episode pertikaian, pasukan pribumi menanggung kemenangan, namun dalam beberapa perjumpaan terakhir, justru VOC mampu keluar sebagai pemenang. Orang Belanda melihat faksi-faksi yang saling berseteru di Sukadana menjadi celah untuk memecah belah mereka, dan ketika mereka menjatuhkan pilihan untuk mendukung pihak yang dirasa memberi garansi keuntungan di dunia perdagangan, maka VOC akan mendukung pihak itu.

Perlawanan antikolonialisme tidak selalu mampu dilakukan dengan bekal perlawanan yang cukup. Beberapa bangsawan Sukadana melakukan perlawanan atau setidaknya menunjukkan sikap non-kompromistis dengan modal yang kecil. Kondisi politik yang sedari awal telah terpecah, ditambah dengan infiltrasi bangsa asing, membuat kedaulatan Sukadana kian rapuh. Jika ditelisik lebih lanjut, kehadiran Belanda memperkeruh keadaan yang sebelumnya berlangsung secara kurang-harmonis. Di tengah suasana yang tidak menguntungkan itu, masih terdapat sejumlah keluarga istana yang memutuskan melawan VOC atau bangsa Barat lainnya.²²

Kolonialisme merupakan paham yang berakar dari superioritas orang Eropa atas bangsa lainnya. Mereka datang ke suatu wilayah dan segera memikirkan bagaimana menancapkan pengaruhnya di situ. Upayanya ini, lambat laun, diketahui oleh para

²¹ Slamet Muljana, *Runtuhnya kerajaan Hindu-Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara* (Yogyakarta: LKiS, 2005) hal. 175 – 193.

²² Yusri, "Nieuw ...", hal. 36 – 49.

pemuka pribumi. Kendati, kedatangan orang Eropa kerap dilatari oleh suatu motif yang bersifat menguntungkan kepada penduduk setempat, rupanya itu hanya sekedar topeng untuk meluluskan aksi sebenarnya, yakni mencipta koloni baru di negeri yang jauh dari negeri asal.

Benita Parry menyebutkan bahwa paham antikolonialisme tumbuh akibat respon dari keadaan yang tidak brepihak pada masyarakat pribumi. Ini merupakan keniscayaan dari orang yang selalu diusik dan dijajah. Di samping itu, Parry melihat bahwa kepercayaan ini juga merupakan sesuatu yang bersifat turunan. Tradisi antikeamanan, senantiasa melawan pada kekuatan yang mendominasi kelompok tertentu, serta sejarah kelam akan pendudukan merupakan bahan bakar yang menyuburkan paham antikolonialisme. Sikap ini bukan hanya lahir karena reaksi pendudukan Eropa, melainkan juga semacam konsep berpikir bawaan yang coba ditradisikan para generasi pendahulu melalui tradisi bertutur yang kemudian mengendap di alam bawah sadar pendengarnya.²³

Penulis tertarik untuk melihat lebih dalam paradigma antikolonialisme yang ada di Sukadana. Teori Benita Parry di atas agaknya layak digunakan sebagai pisau analisa untuk membedah wacana sikap penduduk Sukadana menghadapi pendudukan bangsa asing. Model analisa ini sekaligus menguji apakah perseteruan di antara para penguasa Sukadana melahirkan suatu tradisi resistensi yang menjadi identitas para penguasa maupun rakyatnya, sehingga modal ini kemudian digunakan melawan hasrat para penjajah yang ingin menguasai Sukadana kelak.

F. Metode

Penelitian sejarah ini merupakan penggabungan dua jenis penelitian yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah usaha pencarian sumber literal yang tersimpan di sejumlah perpustakaan dan tempat penyimpanan arsip yang ada di Jakarta maupun di Sukadana, dan mungkin juga di Ketapang. Selanjutnya, penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh pemetaan yang jelas mengenai jalur perdagangan di Sukadana, Sungai Melano dan tempat-tempat lain yang relevan dengan tema bahasan. Informasi lapangan diperlukan untuk memperkuat informasi literal atau bahkan mengkoreksinya.

Eksplanasi sejarah yang akan diketengahkan adalah model pembahasan sejarah sosial. Beberapa tema seputar perniagaan dan informasi yang masih berkenaan dengannya seperti keadaan pelabuhan, pasar, pemukiman (kampung) juga turut disampaikan. Eksplanasi sosial ini akan memberikan warna lain guna mengimbangi

²³ Benita Parry, "Resistancy Theory / Theorising Resistance or Two Cheers for Nativism" dalam Francis Barker dkk, *Colonial Discourse / Postcolonial Theory* (Manchester: Manchester University Press, 1994) hal. 172 – 173.

penjelasan klasik sejarah yang berkenaan dengan tema-tema politik, seperti perang, diplomasi atau kebijakan para penguasa. Beberapa pembahasan mungkin akan dibahas dalam sub-sub bab tertentu, seperti masalah perkembangan Islam di pedalaman, atau mengenai relevansi perdagangan dengan dakwah Islam.

Penelitian sejarah bertumpu pada sejumlah langkah yang berakhir dengan penulisan sejarah. *Pertama*, langkah yang harus ditempuh peneliti adalah mengumpulkan sumber atau materi. Sumber diperoleh dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni sumber literal, sumber oral dan sumber geospasial. Sumber literal didapat dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Daerah Ketapang, Perpustakaan Daerah Sukadana serta koleksi milik pribadi. Termasuk dalam sumber literal adalah kumpulan arsip kolonial yang tersimpan di Gedung ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) Jakarta. Sumber oral merupakan keterangan mengenai sejarah pertumbuhan Sukadana yang diperoleh dari narasumber lokal yang berlatar belakang kelompok cerdik pandai, ketua lembaga adat, ulama dan lain sebagainya. Sumber geospasial diperoleh dengan mendatangi sejumlah tempat bersejarah, termasuk pula menyusuri jalan darat dan sungai yang di masa silam menjadi sarana perpindahan manusia di Sukadana.

Secara umum sumber penelitian sejarah dibagi dalam dua jenis, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang diproduksi sezaman dengan suatu peristiwa masa silam. Misalnya penelitian ini menyoar keadaan Sukadana Abad 18 dan 19, maka sumber yang ditulis atau dicetak di masa itu termasuk sumber primer. Termasuk dalam sumber primer adalah arsip-arsip peninggalan pemerintah kolonial Belanda, buku, memoar, catatan perjalanan, brosur dan lain sebagainya. Sumber sekunder mengacu pada catatan tertulis berupa buku, catatan perjalanan, memoar, biografi yang bukan ditulis di skup waktu penelitian. Termasuk dalam sumber ini adalah buku-buku terbitan terakhir yang bertema relevan dengan objek penelitian.

Kedua, sumber-sumber yang sudah terkumpul kemudian memasuki fase kritik sumber. Dalam penelitian sejarah, dikenal dua macam kritik sumber, yakni kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dialamatkan pada kondisi fisik suatu sumber sejarah, jika sumber itu berupa tulisan di media kertas yang diproduksi di masa dari objek penelitian. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah model tulisan dalam media itu, tanda-tangan, *watermark* (cap kertas), jenis tinta, aksara dan lain sebagainya. Termasuk dalam pemeriksaan tahap ini adalah mengetahui bagaimana kondisi fisik naskah, apakah itu merupakan hasil reproduksi atautkah masih asli. Tentu saja, dalam penelitian sejarah yang dibutuhkan merupakan edisi asli dari sumber tertulis itu. Kritik internal menyoar pada kebenaran informasi yang terdapat dalam suatu sumber tertulis. Perbedaan versi informasi tentu saja merupakan kewajaran, namun jika informasi itu terlalu jauh melenceng dari kebenaran dalam perspektif umum, tentu tidak termasuk dalam sumber yang harus dikutip.

Ketiga, interpretasi atau analisa dari sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Setelah dilakukan kritik sumber, maka peneliti akan mendapat informasi-informasi yang dapat diolah menjadi narasi sejarah yang eksplanatif juga analitis. Pada tahap ini, peneliti diperbolehkan memasukkan penilaiannya akan suatu sumber termasuk kritiknya dalam menilai apakah sumber tersebut layak dianggap sumber penting atau hanya sekedar sumber pelengkap. Analisa peneliti menjadi perekat yang menyambungkan informasi-informasi yang didapat dari sumber sejarah.

Keempat, tahap terakhir yang disebut historiografi atau penulisan sejarah. Setelah didapat suatu pemahaman yang dianggap utuh mengenai bahasan objek yang dikaji, maka langkah selanjutnya adalah menuliskannya. Informasi-informasi dikelompokkan menurut bahasannya. Pembahasan sejarah bertumpu pada penjelasan yang bersifat kronologis. Analisa atau penilain peneliti disisipkan di tengah suatu narasi, guna menampilkan suatu telaah kritis yang orisinil. Penulisan sejarah ini juga dapat dipahami sebagai tahap akhir dari seluruh rangkaian penelitian.²⁴

G. Data dan Sumber Data

Pembahasan mengenai sejarah dinamika Sukadana termasuk dalam temasejarah lokal. Masalah utama yang kerap dihadapi peneliti sejarah yang menelaah tema sejarah lokal adalah kelangkaan data. Untuk itu, dapat dipastikan bahwa penelitian dengan objek ini lebih menantang ketimbang menelisik tema sejarah yang sudah kadung populer atau telah banyak ditulis orang. Untuk itu, peneliti perlu melakukan studi yang mendalam guna menelusuri sumber-sumber yang sebetulnya bukan diperuntukkan bagi penulisan sejarah, namun mengandung informasi penting yang menjadi bahan baku merekonstruksi sejarah masa lalu, sumber-sumber itu adalah arsip kolonial.

Di Indonesia, arsip kolonial banyak disimpan di suatu tempat yang bernama Gedung ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia). Gedung ini terletak di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Di bangunan ini tersimpan aneka ragam arsip kenegaraan maupun pribadi yang menyimpan informasi berharga bagi penelitinya. Banyak profesional yang mengunjungi tempat ini seperti para peneliti hukum, ahli pertanahan, pengacara, pihak yang terlibat sengketa tanah, atau peneliti sejarah. Sebenarnya, dibangunnya gedung ini dilatarbelakangi oleh semangat menjaga arsip-arsip pemerintahan agar tidak lekang dimakan waktu dan bukan untuk kajian sejarah *an sich*. Namun pada perkembangannya, banyak peneliti sejarah yang menengok tempat ini untuk memperoleh arsip yang dahulu ditulis oleh orang Belanda yang bertugas melaporkan segala bentuk kegiatan penduduk Indonesia.

²⁴ Keempat langkah penelitian sejarah ini disadur dari Bondan Kanumoyoso, *Mata Ajar Metode Sejarah Lokal* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kbeudayaan Direktorat Sejarah, 2016) hlm. 5 – 56.

Jenis-jenis arsip kolonial Belanda bermacam-macam. Di antara arsip yang amat kaya menyimpan informasi dan yang bersifat naratif adalah arsip dengan jenis *memorie van overgave* (surat serah terima jabatan), *verslag* (catatan kedinasan administrasi Belanda) dan *staatblad* (kumpulan surat menyurat negara). Arsip jenis lain seperti laporan yang dikeluarkan pejabat kontrolir, asisten residen, residen atau bahkan gubernur jenderal juga perlu ditelisik. Khusus mengenai arsip catatan perjalanan (*reizen rapporten*), ini merupakan jenis arsip yang tidak kalah kaya menyimpan informasi, meskipun intensitas dikeluarkannya tidak secara berkala.

Tujuan pencarian selanjutnya adalah perpustakaan yang ada di Jakarta dan di Kalimantan Selatan. Di Jakarta, PNRI menjadi destinasi tepat untuk mendapatkan bahan bacaan yang menambah referensi penelitian. Beberapa perpustakaan di Kalimantan Barat, seperti perpustakaan daerah di Ketapang, Sukadana dan Pontianak juga perlu didatangi untuk memperoleh sumber sejarah lokal. Buku-buku, stambom atau silsilah yang diperoleh dari para narasumber lokal juga dapat diperoleh, ketika melakukan penelitian lapangan.

H. Rencana Pembahasan

Laporan penelitian ini akan dibagi kedalam lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penelitian teori, metode serta tinjauan sumber. Bab kedua merupakan profil Sukadana yang menyangkut sektor geografis, sosial, budaya, serta masyarakat. Bab ketiga berisi tentang gambaran sukadana pada abad ke 18 – 19. Pembahasan di sini akan ditekankan pada aspek sosio-kemasyarakatan, ekonomi, dan bagaimana dakwah Islam berkembang di kawasan pesisir lalu ke pedalaman. Termasuk disinggung di bab ini mengenai bagaimana kekuatan Eropa masuk dan berkembang di Sukadana. Bab keempat berisi tentang perlawanan rakyat Sukadana menghadapi pendudukan Belanda. Di bab ini juga dipaparkan mengenai bagaimana kontinuitas dan perubahan terjadi di Sukadana. Bab terakhir adalah kesimpulan.

I. Peneliti

Penelitian ini akan dilakukan oleh dua orang yakni:

Ketua : Prof. Dr. M. Dien Madjid (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Anggota : Johan Wahyudi, M. Hum (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

BAB II

PROFIL WILAYAH DAN MASYARAKAT

A. Gambaran Geografis dan Masyarakat

Wilayah Sukadana, terletak di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Nama Kayong memang telah disebut-sebut dalam catatan kolonial abad XIX, namun bukan menjadi nama resmi dari suatu institusi politik yang memerintah di kawasan tersebut. Nama Sukadana, lebih dikenal, dan diabadikan dalam catatan terdahulu, dikarenakan nama ini erat kaitannya dengan nama pelabuhan yang berdiri tidak jauh dari istana Sukadana. Dengan demikian, nama ini merujuk pada nama pelabuhan dan nama kerajaan.

Secara astronomis, Kayong Utara terletak antara $0^{\circ} 43' 5, 15''$ sampai dengan $1^{\circ} 46' 35, 21''$ Lintang Selatan dan $108^{\circ} 40' 58,88''$ sampai dengan $110^{\circ} 24' 30,05''$ Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Selat Karimata di sebelah Utara, dengan Selat Karimata dan Kabupaten Ketapang di sebelah Selatan, dengan Selat Karimata di sebelah Barat dan dengan Kabupaten Ketapang di sebelah Timur.

Wilayah Kabupaten Kayong mempunyai enam kecamatan. Semuanya berbatasan dengan laut. Dengan demikian, perekonomian warga Kayong Utara bertumpu pada aneka hasil laut, maupun profesi lain yang berdekatan dengan sektor perikanan dan kelautan. Sebagian besar wilayah Kayong Utara adalah perairan yang di atasnya terhampar banyak pulau. Setidaknya ada 103 pulau di wilayah ini. Pulau-pulau ini tersebar di empat kecamatan yakni Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir, Pulau Maya dan Kepulauan Karimata. Dari keseluruhan jumlah pulau, terdapat 14 pulau yang tidak berpenghuni.²⁵

²⁵ Tim BPS Kayong Utara, *Kayong Utara dalam Angka 2020* (Sukadana: BPS Kayong Utara, 2020) hal. 1 – 5.

Keramaian pemukiman di Kayong Utara, umumnya terletak di pesisir. Ini juga yang menandakan kehidupan masyarakatnya dekat dengan tradisi dan budaya pesisir. Meskipun demikian, penduduk di wilayah pedalaman juga mempunyai karakteristik tersendiri, yang dikembangkan dari waktu ke waktu, sehingga membentuk citra budaya yang berbeda dengan penduduk pinggir pantai. Pada umumnya, penduduk Kayong beretnis Melayu, namun terdapat pula etnis lain seperti Dayak, Madura, Bugis, Jawa, Bali, dan lain sebagainya. Mereka semua hidup secara harmonis.

Oleh sebab kebanyakan penduduk Kayong Utara adalah Melayu, dan kehidupan mereka lebih banyak berkutat di wilayah pesisir, maka citra kebudayaan yang dominan di kabupaten ini adalah budaya Melayu, khususnya Melayu Pesisir. Jika ditarik ke belakang, bangsa Melayu sejatinya adalah bangsa pendatang di Tanah Kayong. Mereka berinteraksi secara turun temurun dengan warga pribumi, yakni bangsa Dayak.

Interaksi yang telah berjalan dengan lama, melahirkan sejumlah cerita rakyat yang mempunyai pesan bahwa antara bangsa Dayak dan Melayu adalah bersaudara, bahkan lahir dari rahim yang sama. Ini dapat dilihat di kisah Tuk Upai dan Tuk Bubud, Nek Takon dan Nek Doyan dan lain sebagainya. Terdapat kisah lain yakni kisah Pateh Inte dan Demung Juru yang menjelaskan tentang latar belakang berpisahanya orang Darat (Ulu) dan orang laut akibat dari adanya malapetaka besar yang mengancam. Lokasi cerita ini terdapat di Desa Ulak Medang, Kecamatan Muara Pawan. Orang-orang yang mengungsi ke wilayah hilir menjadi leluhur dari etnis Melayu Kayung, sedangkan yang mengungsi ke daratan merupakan nenek moyang bangsa Dayak.

Pada perkembangannya, orang Melayu di pesisir berjumpa dengan berbagai bangsa pendatang yang kemudian terjadi kawin mawin di antara mereka. Orang Melayu Kayung merupakan etnis Melayu dengan banyak campuran darah yang berasal dari Jawa (lebih lanjut lihat kisah Prabu Jaya), pendatang dari Palembang (Sang Maniaka), pendatang asal Siak (rombongan Tengku Akil), pendatang dari Brunei (Raja Tengah), pendatang dari Arab serta pendatang dari wilayah Melayu lainnya. Mereka semua inilah yang kemudian dikenal dengan nama Melayu Kayung.²⁶

Secara umum, masyarakat Kayong Utara beragama Islam. Sebagaimana di daerah lainnya, corak Islam di Kayong Utara mempunyai cita rasa tersendiri yang khas. Bahkan, jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya, Islam Melayu Kayong Utara tetap mempunyai pembeda yang menjadi keunikan tersendiri. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari latar perkembangan Islam itu sendiri, yang biasanya akan menerapkan sikap adaptif terhadap budaya lokal, karena ini merupakan konsekuensi untuk meminimalisir ketegangan budaya yang telah berurat akar di suatu masyarakat. Proses ini lazim disebut dengan terciptanya paham Islam Nusantara,

²⁶ <http://kongres.kebudayaan.id/kabupaten-kayong-utara/>, diakses pada Senin, 6 Juli 2020, pukul 08. 43.

yakni suatu paradigma Islam yang memberikan ruang bagi tradisi lokal untuk saling berdiskusi sehingga memperkaya rancang bangun keberagaman masyarakat setempat.²⁷

Di akhir abad XVIII, banyak pedagang Muslim yang berasal dari Palembang memutuskan bermukim selama beberapa waktu di Sukadana. Di samping menggeluti usaha niaga, mereka juga mengajarkan pengetahuan agama Islam pada penduduk setempat. Pada periode ini terdapat nama Syekh Maghribi, seorang ulama yang mempunyai peran penting dalam sosialisasi Islam di Sukadana. Ia tidak segan berbicara dan bertukar pandangan dengan penduduk setempat, sembari sesekali memasukkan pembicaraan mengenai Islam pada lawan bicaranya. Dengan metode dialog dan sikap yang santun, ia berhasil menanamkan pengetahuan Islam di kota pelabuhan ini.

Meningkatnya volume pedagang lintas pulau berimplikasi pada modernisasi alat-alat perdagangan yang digunakan di Sukadana. Di masa ini, mulai digunakan tempat satuan takaran beras yang oleh penduduk Sukadana disebut *gantang*. Benda ini terbuat dari kayu. Satu gantang sama dengan sekitar 4,5 kg. Beberapa waktu kemudian, penguasa Sukadana menerbitkan peraturan bahwa seluruh pedagang yang ada di wilayahnya supaya menyeragamkan isi takaran di dalam gantang tersebut. Setiap gantang yang digunakan harus dicap oleh stempel kerajaan bertuliskan “Gantang Pangeran Jawa Anom”,²⁸

Sukadana mempunyai hubungan yang luas dengan pusat-pusat kerajaan di Nusantara. Ketika Kesultanan Makassar ditundukkan pasukan VOC pada 1669, banyak di antara para pelaut Bugis dan Makassar yang memutuskan untuk keluar dari Makassar untuk mencari peruntungan baru. Beberapa dari mereka ada yang mengarahkan laju kapalnya ke Sukadana. Sejak kedatangan orang Bugis Makassar inilah nama Sukadana semakin banyak disebut orang²⁹, utamanya di bagian Indonesia Timur. Untuk diketahui, para pelaut Bugis Makassar berkelana hingga

²⁷ Mubarok dkk, "Islam nusantara: Moderasi islam di Indonesia", dalam *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3, No. 2, 2019, hal. 153-168.

²⁸ Yusri Darmadi dan Ika Rahmatika Chalimi, "*Nieuw Brussel*" di Kalimantan: *Peran Strategis Sukadana pada Abad ke-19* (Yogyakarta: Kepel Press, 2017) hal. 4.

²⁹ Gusti Mhd. Mulia, *Sekilas Menapak Langkah Kerajaan Tanjungpura* (Pontianak: Percetakan Firma Muara Mas, 2007) hal. 11.

menyentuh Malaka³⁰ bahkan ada yang sampai di Australia³¹ dan Afrika Selatan (Madagaskar)³².

Pada 1724, penduduk Sukadana sebagian besar pindah mengikuti Sultan ke Inderalaya dan sebagian yang lain hijrah ke Simpang.³³ Keadaan ini membuat Sukadana kosong. Pada 1786, pemerintahan Sukadana dipindahkan ke Matan, karena adanya konflik dengan kesultanan Pontianak. Pengaturan Sukadana yang terbengkalai, membuat wilayah ini sempat diduduki oleh perampok.³⁴ Di tengah pergumulan politik dan perluasan wilayah ini, Islam di Sukadana berkembang dan memantapkan diri dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat.

B. Kondisi Sukadana sampai Abad XIX

Menginjak abad XIX, Pelabuhan di Nusantara sedang menatap masa perubahannya. Munculnya pemerintahan Kompeni Hindia Belanda di beberapa wilayah negeri ini, berpengaruh pada sistem pengelolaan pelabuhan setempat. Sejalan dengan penundukkan politik, Kompeni juga akan melakukan penertiban ekonomi. Mereka sangat terobsesi dengan kegiatan perdagangan dan selalu mencari celah untuk menagguk untung yang besar. Pandangan itu pula yang ditunjukkannya saat melihat posisi Sukadana.

Sebagai pelabuhan yang sudah eksis dalam waktu lama, Sukadana menyandang predikat sebagai sokoguru perekonomian di Pantai Barat Borneo. Sungai Kapuas memang menjadi jalan air yang menghubungkan pedalaman dan pesisir, namun perannya tidak akan terlihat jika tidak ada Sukadana. Dari sana, kapal-kapal akan menuju Sukadana untuk mengantarkan aneka komoditas perdagangan, lantas mengangkut kembali komoditas lainnya yang dibutuhkan warga pedalaman. Sebelum abad XIX, Para saudagar Belanda sudah merasakan betapa nikmatnya menebuk keuntungan dari perdagangan di sini, dan di masa setelahnya, mereka berencana untuk lebih dalam menguasai pelabuhan ini.

³⁰ Richard Winstedt, "The Date of the Malacca Legal Codes", dalam *Journal of the Royal Asiatic Society*, Vol. 85, No. 1-2, 1953, hal. 31-33.

³¹ Mengenai aktivitas orang Bugis dan Makassar di Australia, lihat Ant Abr Cense dan Hendrik Jan Heeren, "Pelajaran dan pengaruh kebudayaan Makassar-Bugis di pantai utara Australia", dalam *Bhratarata*, Vol. 18, 1972.

³² Nikolaus P. Himmelmann, "The Austronesian languages of Asia and Madagascar: typological characteristics", dalam *The Austronesian languages of Asia and Madagascar*, Vol. 110, 2005, hal. 181.

³³ M. Dardi D. Has, *Sejarah Kerajaan Tanjungpura* (Ketapang: Yayasan Sultan Zainuddin I dan Smart Educational Center, 2014) hal. 11.

³⁴ Soedarto, *Naskah Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908 – 1950* (Pontianak: Pamerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, 1989) hal. 126.

Di abad setelahnya, Sukadana dikenal sebagai pelabuhan yang kaya, di bawah kontrol penguasa lokal bergelar *panembahan*. Pelabuhan ini berbatasan dengan Kerajaan Simping di sebelah Timur Laut, dan dengan Kerajaan Matan di sebelah Tenggara dan Selatan, sedangkan di bagian Barat, pelabuhan ini bertetangga dengan pesisir laut. Adapun luas wilayah Sukadana adalah sepanjang jalan masuk menuju Simping sampai dengan Sungai Siduk.³⁵

Sumber lain menyebutkan bahwa di sebelah Barat Sukadana terhampar laut. Di sebelah Utara, daerah ini berbatasan dengan Kerajaan Simping. Sedangkan di wilayah Selatan dan Timur, wilayah ini berbatasan dengan Matan. Jika diperhatikan di peta, wilayah Sukadana membentuk ruang jajaran genjang, dengan beberapa titik sikunya, yakni Kuala Melia, Pegunungan Pulungan (hulu Sungai Melia, dan suatu belokan di arah Barat Sungai Siduk. Terdapat informasi lain seputar wilayah (*afdeeling*) Sukadana, yakni: di bagian Utara berbatasan dengan Sungai Melia, di bagian Timur dengan Sungai Siduk dan belokan di arah Barat dari sungai ini, di bagian Selatan berbatasan dengan Sungai Siduk dan patahan alirannya mengalir sampai ke muaranya, sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan pantai.³⁶

Di bagian Utara, terdapat wilayah Meliau (Meliouw). Di wilayah ini terdapat suatu wilayah di tepi Sungai Labai, bernama Batang Mendaup (Batang Mendaop). Sungai ini bermuara di suatu gunung bernama Senangkui. Dari sini, sungai bercabang ke arah kanan dan alirannya melewati Bukit Kuala, Tukung, Pagenting Nyala, Prahu Belau, Ranga Raya, Kebuduk Laga sampai dengan Bukit Raya.

Di bagian Timur, terdapat wilayah bernama Sekadau. Di sini terdapat suatu bukit bernama Sepanggung. Dari bukit ini terdapat juga aliran sungai kecil bernama Batang Piunggang. Aliran sungai ini menjadi satu dengan aliran Sungai Batang Laur. Sungai ini juga mengalir di Matan. Di wilayah ini, aliran Sungai Batang Laur terus mengarah ke Selatan dan kemudian bersebelahan dengan sungai kecil bernama Lekahan yang kemudain alirannya menjadi satu dengan Sungai Batang Laur.³⁷

Di sebelah Selatan, terdapat pinggiriran Sungai Lekahan yang bersebelahan dengan aliran Sungai Batang Laur. Sungai kecil ini (Lekahan) mengalir dan terhubung hingga hulunya, yakni di Pegunungan Palongan. Di dekat hulu sungai ini, terdapat sodetan aliran ke kanan dan nantinya aliran sungai ini bergabung dengan Sungai Siduk. Di wilayah Sukadana sendiri, tepatnya dari sumber Sungai Siduk ke Pegunungan Palongan, terdapat sodetan aliran sungai ke kanan yang terhubung

³⁵ P. J. Veth, *Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch Indie, bewerkt naar de jongste en beste berigten. Vol. 1* (Amsterdam: Van Kampen, 1869) hal 362.

³⁶ Yusri, *Nieuw Brussels ...*, hal. 16.

³⁷ J.P.J. Barth, "Overzicht der Afdeeling Soekadana", dalam *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (VBG)*, Deel L. 2^e Stuk, 1896.hal. 3.

dengan sumber asal Sungai Melia (sumber ini adalah hulu yang sama bagi Sungai Belaban). Dari aliran ini air mengalir hingga muara, tepatnya di Kuala Simpang.³⁸

Di sebelah Barat, terdapat wilayah Kubu. Di kawasan ini terdapat suatu selat bernama Selat Maya. Selat ini membentang hingga ke wilayah Simpang Lida. Terdapat suatu aliran sungai yang melewati daerah ini, dan alirannya bergabung dengan Sungai Mendaup. Sungai ini juga terpecah menjadi dua aliran, dan aliran kedua berbentuk sungai kecil bernama Labai. Terdapat beberapa pulau di lepas pantai wilayah ini, antara lain Pulau Kumbang, Antu, Malang Merakit (2 pulau), Masa Tiga (3 pulau) dan Pulau Nanas yang masuk ke lanskap Simpang. Wilayah ini juga berbatasan dengan Matan.

Di wilayah Barat dan Utara, terdapat wilayah Simpang. Di sini terdapat aliran Sungai Laur yang mengalir dari hulu ke hilirnya yang terletak di muara Sungai Lekahan. Sumber Sungai Laur juga berdekatan dengan Sumber Sungai Siduk di Pegunungan Palongan. Di wilayah Sukadana terdapat aliran Sungai Siduk yang mengalir dari hulunya di Pegunungan Palongan hingga ke muaranya di laut lepas.

Di sebelah Utara dan Timur jauh, terdapat batas wilayah yang berdekatan dengan Sungai Pawan dan Kapuas. Aliran sungai ini adalah suatu perbatasan dengan wilayah di seberangnya. Suatu aliran sungai juga menjadi pembatas antara Sukadana dengan Kotawaringin. Sungai ini bernama Sungai Jelai dan Bila. Sungai ini mengalir sampai ke muaranya.³⁹

Pegunungan Palongan merupakan wilayah yang didiami sekumpulan masyarakat. Wilayah ini menjadi tempat yang nyaman bagi pertumbuhan tiga kerajaan (Sukadana, Simpang dan Matan). Kendati berbeda raja maupun kedaerahan, masyarakat di pegunungan ini bergaul dengan cukup harmonis.⁴⁰

Wilayah Afdeeling Sukadana mempunyai luas sebesar Jawa Barat dengan tanpa melibatkan wilayah Banten. Adapun jumlah penduduk daerah ini, (dalam kisaran global) pada perhitungan sekitar tahun 1894, adalah; di wilayah Matan, terdapat 20.000 orang Dayak dan 10.000 orang Melayu, totalnya 30.000; di Simpang terdapat 5000 orang Dayak dan 5000 orang Melayu, dan jumlahnya 10000; di Sukadana terdapat 2300 orang Melayu. Dengan demikian total penduduk wilayah Sukadana adalah 42.300 jiwa. Sebenarnya di wilayah Sukadana juga terdapat kelompok penduduk Tionghoa, namun dengan alasan yang tidak bisa disebutkan, jumlah mereka tidak dicantumkan.⁴¹

Saat itu (1894), Di wilayah Sukadana terdapat tiga kerajaan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang pangeran yang bergelar *panembahan*. Sukadana dan Simpang

³⁸ Barth, "Overzicht ...", hal. 4

³⁹ Barth, "Overzicht ...", hal. 5

⁴⁰ Barth, "Overzicht ...", hal. 5.

⁴¹ Barth, "Overzicht ...", hal. 5 – 6.

adalah dua nama yang menempati satu tempat yang sama. Di wilayah Matan-Ketapang, terdapat suatu kampung yang istimewa, yang bernama Melia Kerta. Adapun pejabat kolonial yang bertugas di Sukadana berpangkat kontrolir (*controleur*) yang berkantor di Sukadana.⁴²

⁴² Barth, “Overzicht ...”, hal. 6.

BAB III

DALAM PUSARAN KEMELUT

A. Dari Bisnis Lokal ke Dominasi Kolonial

Traktat London yang ditandatangani pada 13 Agustus 1814 oleh Inggris, Prancis dan Belanda, mengakhiri kuasa Napoleon Bonaparte, pemimpin Prancis, di Asia Tenggara, termasuk di Pantai Barat Borneo. Para pangeran (panembahan) yang bertahta di Sukadana, menghadapi datangnya kolonial lama, Belanda ke negeri mereka. Barth menyebutkan bahwa saat itu, para panembahan sedang disibukkan oleh serangan para perompak yang rajin berdatangan ke Sukadana. Mereka membuat kerusuhan sehingga penduduk sekitar dan kerajaan berjibaku menahan serbuan mereka. Para penduduk Tionghoa berada dalam lindungan kesultanan.

Dua tahun berselang, yakni pada 1816, Sultan Sambas dan Sultan Pontianak berkirim surat ke Gubernur Jenderal di Batavia untuk menyambung kembali hubungan diplomatik mereka. Kedua Sultan ini masih menyimpan keraguan atas pendudukan Belanda kembali di Borneo. Di sisi lain, Batavia juga masih dalam tahap pembenahan, setelah berganti kepemimpinan dari para pejabat-pejabat bawahan Napoleon. Surat balasan baru datang ke hadapan dua Sultan tersebut pada 1818. Isinya adalah optimisme pemerintah Hindia Belanda untuk kembali bermitra dengan penguasa lokal Pontianak dan Sambas.⁴³

Melalui *Besluit* (Surat Keputusan) tertanggal 9 Juni 1818 dari pemerintah Hindia Belanda di Batavia, Gubernur Jenderal menugaskan Mr. J. Van Boekholtz, yang sebelumnya bertugas di Banjarmasin untuk pindah ke Pantai Barat Borneo. Ia akan segera diberangkatkan dan tugas yang akan dihadapinya tentu saja akan bertumpuk. Ia harus membenahi kembali manajemen pemerintahan yang ditinggalkan Inggris. Bagi pejabat yang bertugas di wilayah yang baru, maka pembiasaan dan penyusunan jadwal kegiatan adalah mutlak dilakukan. Ia akan berpeluh untuk menyelesaikan tugas yang rumit.

Pemerintah Hindia Belanda tentu sudah mafhum akan tipu daya dan taktik licik penguasa lokal. Para pejabat pusat tentu tidak akan begitu saja mengutus orang kepercayaannya seorang diri ke wilayah yang sebelumnya tidak dikuasainya. Untuk

⁴³ J.P.J. Barth, "Overzicht der Afdeeling Soekadana", dalam *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (VBG)*, Deel L. 2^e Stuk, 1896, hal. 7.

mengamankan tugas Van Boekholtz, maka ditugaskan pula sebanyak 600 orang pasukan. Pada 26 Juni 1818, diberangkatkan 7 kapal perang ke Pontianak.

Pemberangkatan kapal perang ke Pontinak rupanya juga ditugaskan untuk menghadapi pasukan Inggris, apabila mereka datang menyerang. Kadangkala ditemukan ketidaksamaan pemerintahan pusat di Inggris dan di negeri jajahan. Oleh sebab itu, Belanda sudah menyiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang buruk dari rekannya di Eropa itu. Pemerintah Batavia curiga jika orang-orang Inggris yang masih berkeliaran, baik yang menetap atau yang datang temporal, akan menjalin komunikasi terselubung dengan Sultan Kasim, Sultan Pontinak saat itu. Agenda yang ditakutkan adalah pembentukan poros Pontinak-Inggris untuk menghadapi pemerintah Hindia Belanda.

Sebelumnya, Pemerintah Hindia Belanda sudah mengadakan studi kelayakan tentang penempatan pejabat mereka di Pantai Barat Borneo. Setelah dikaji, ternyata ada indikasi bahwa penerapan hukum kolonial di wilayah ini akan menghadapi masalah yang sulit. Beberapa tokoh bangsawan di wilayah tersebut terindikasi mempunyai hubungan yang baik dengan para pejabat kolonial Inggris. Atas dasar inilah maka pengerahan pasukan juga dibutuhkan untuk menghindari ancaman bersenjata yang digalang para tokoh lokal dengan pasukan Inggris. Pada 1815, wakil Inggris di Pantai Barat Borneo meninggalkan banyak hal yang sulit untuk dibenahi dan inilah yang harus segera diperbaiki dan dicarikan jalan keluar.⁴⁴

Mayor Farquhar, Residen Inggris di Malaka, adalah sosok penting yang menghubungkan kepentingan Inggris di Pantai Barat Borneo. Ia menyponsori pembicaraan perdagangan yang melibatkan para pedagang Inggris dengan penguasa Pantai Barat Borneo. Pemerintah Hindia Belanda dituntut untuk bisa menciptakan keseimbangan dengan kepentingan Inggris. Tidak mungkin untuk menyingkirkan kedudukan pedagang Inggris di Borneo. Persaingan tentu akan terjadi, namun harus diperhitungkan akibatnya serta respon baik yang harus ditunjukkan, setidaknya di masa awal. Oleh sebab itu, satu perkara yang harus segera diselesaikan adalah mencari tempat sauh kapal dan pemukiman bagi orang Belanda yang *settled* dan tidak langsung bersinggungan dengan pemukiman orang Inggris.

Inggris dan Belanda segera terlibat dalam perundingan dengan Sultan Pontianak, sebagai salah satu representasi penguasa lokal di Pantai Barat Borneo. Pihak Inggris berupaya mengamankan kepentingan pedagang Inggris di Pantai Barat Borneo. Inggris melontarkan suatu ide untuk membangun pemukiman pedagang Inggris di Karimata. Suatu ide yang kemudian menjadi hal yang diperdebatkan. Pihak Belanda pun juga segera melayangkan pendapatnya ke Sultan Pontinak, bahwa di pulau itu terdapat komunitas penduduk lokal bernama Orang Laut yang berjumlah 70 sampai 80 jiwa. Menurut pihak Belanda, masalah Karimata sebaiknya ditangguhkan saja.

⁴⁴ Barth, "Overzicht ...", hal. 7.

Belakangan, Belanda juga tertarik untuk mendirikan pemukiman di Karimata. Farquhar, Gubernur Inggris di Malaka, yang melihat peluangnya semakin tipis, di kemudian waktu lebih memfokuskan perhatiannya pada masalah Riau dan Sumatra. Dalam usaha meyakinkan pihak Pontinak, pihak Hindia Belanda diwakili oleh George Muller.⁴⁵

P. H. Van der Kemp mengingatkan bahwa Pontianak merupakan kerajaan dengan manajemen perdagangan yang cukup baik. Pendiri kesultanan ini, bernama Syarif Abdul Rahman al-Gadri, seorang Arab Hadrami yang sebelum menjadi Sultan Pontianak adalah seorang pedagang di wilayah Pasir. Berkat kecerdikannya membangun hubungan bisnis dengan para pedagang dan penyedia barang di pesisir Barat Borneo hingga ke pedalaman, ia memperoleh cukup dana untuk mendirikan suatu kesultanan yang berdaulat. Van der Kemp meyakini bahwa tonggak kesuksesan Syarif Abdul Rahman adalah ketika ia berhasil mengoperasikan kapal Prancis di Pontinak. Suatu kendaraan yang ikut membangun jaringan ekonomi Syarif Abdul Rahman. Dengan segera, ia membangun kerajaan bisnisnya dengan mengundang orang Bugis, Cina dan suku bangsa lain dari seluruh penjuru Nusantara untuk melakukan aneka ragam kegiatan ekonomi di Pontianak.

Pada 1808, Syarif Abdul Rahman meninggal dan kedudukannya digantikan oleh Syarif Kasim al-Gadri. Sebelumnya, sang suksesor menjadi panembahan di Mempawah. Sang pengganti segera melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan Sultan Pertama. Sultan Kasim inilah yang kemudian menjadi sosok yang rajin dikunjungi oleh utusan Inggris atau Belanda untuk mendiskusikan perdagangan internasional di Pontinak.⁴⁶

Kesultanan Pontianak menempati posisi yang strategis dalam peta perdagangan Nusantara. Alur sungai yang dikuasai kesultanan ini terhubung dengan Laut Jawa, Laut Natuna, Selat Karimata yang menjadi jalur perdagangan ke Malaka dan ke Tiongkok. Oleh sebab jalur strategis inilah yang kemudian mengundang Inggris maupun Belanda untuk mencoba peruntungan dengan bertandang ke bandar-bandar kerajaan ini sebagai pedagang, sembari melihat peluang untuk mendirikan kantor dagang dan pergudangan.⁴⁷

Menginjak abad XIX, Sukadana juga telah menjelma menjadi salah satu pusat perdagangan di Pantai Barat Borneo. Kekuatan para bangsawan yang terakumulasi dalam tiga kesultanan, yakni Kerajaan Simpang, Kerajaan Sukadana dan kerajaan

⁴⁵ Barth, "Overzicht ...", hal. 8.

⁴⁶ P. H. Van der Kemp, "De Vestiging van Het Nederlandsch Gezag op Borneo's Westerafdeeling in 1818-1819 naar Onuitgegeven Stukken", dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië* 1/2de Afl, 1920, hal. 117.

⁴⁷ Syarif Ibrahim Alqadrie, *Kesultanan Pontianak di Kalimantan Barat: Dinasti dan Pengaruhnya di Nusantara* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) RI kerjasama dengan DP3M dan UNTAN, 1979) hal. 12 – 16.

Matan, menyebabkan para aktor politik Eropa lebih leluasa memainkan perannya. Di tengah aktivitas mereka di pelabuhan atau di pasar, mereka selalu mencari informasi terkait perkembangan terkini dari tiga kesultanan itu. Mereka akan mengumpulkan informasi tersebut, lantas membicarakan langkah-langkah apa yang ditempuh untuk dapat melanggengkan posisi perdagangan mereka di sana.⁴⁸

Pada akhir 1818 hingga 1819, para pegawai Hindia Belanda berdatangan ke Kesultanan Sambas, Pontianak dan Mempawah untuk menandatangani pengakuan mereka terhadap otoritas Belanda di Pantai Barat Borneo. Upaya sosialisasi kuasa Belanda di Borneo Barat ini terus dilakukan hingga menyentuh 1822, hingga mencapai wilayah Kalimantan Selatan.

Di Sukadana, pengukuhan kuasa Hindia Belanda juga dilakukan. Seorang mantan komisaris Belanda bernama Tobias ditemani dengan delegasi pribumi, Wan Hasan, saudara dari Sultan Pontianak, Sultan Osman bertandang ke istana Kesultanan Matan. Sesampainya di sana, kedua orang ini disambut oleh Sultan Mohammad Jamaluddin, Sultan Matan dan seorang gubernur di kerajaan Matan bernama Surianingrat. Orang ini masih mempunyai hubungan dengan Sultan Matan. Saat itu, Surianingrat sedang diserahi tugas untuk mengelola daerah Simpang sebagai daerah pinjaman dari Matan. Di sana, ia menyandang gelar *panembahan*.⁴⁹

Pemerintah Hindia Belanda menysasar Karimata sebagai tempat pendirian basis perdagangannya. Mereka segera menyiapkan tim penyelidikan yang akan diterjunkan untuk meneliti pesisir dan punggung pulau ini. Rencana ini tentu saja baru terlaksana ketika mereka mendapat izin dari para pengeran yang bertahta di Pantai Barat Borneo. Secara umum, para panembahan memberikan kesempatan bagi Pemerintah Hindia Belanda membangun instalasi pergudangan dan dermaga di Karimata, asalkan mereka memberikan rincian pendapatan yang menguntungkan para penguasa lokal daratan. Di samping itu, Hindia Belanda juga menggaransi keamanan di garis Pantai Karimata dari infiltrasi para perompak atau bajak laut. Lebih dari itu, mereka juga diminta untuk melakukan patroli rutin ke batas pantai sejauh yang mereka dapat lakukan. Jika Hindia Belanda tidak memenuhi permintaan ini, maka izin dapat saja dicabut.

Pada 1822, Pemerintah Hindia Belanda mengutus G. Muller untuk mengoisasikan masalah Karimata pada panembahan Simpang dan Matan. Pemerintah Hindia Belanda mafhum bahwa tidak mudah mendiskusikan suatu pengelolaan wilayah pada para penguasa Borneo daratan. Untuk itu, mereka juga mengirim delegasi khusus ke pemukiman orang dayak di pedalaman yang telah diketahui berseberangan dengan para penguasa Melayu di pesisir. Catatan Belanda mendramatisir bahwa kedudukan orang Dayak tertekan oleh penguasa pesisir karena

⁴⁸ Frances Gouda, *Dutch culture overseas: Colonial practice in the Netherlands Indies, 1900-1942* (London: Equinox Publishing, 2008) hal. 18.

⁴⁹ Barth, "Overzicht ...", hal. 8.

mereka adalah objek penindasan para panembahan. Kedatangan mereka untuk membantu orang dayak dari ketakutan mereka.

Untuk sampai ke pemukiman dayak pedalaman, dibutuhkan aneka ragam persiapan yang memadai. Kapal yang disewa harus terbukti mampu menyusuri sungai-sungai pedalaman yang mempunyai medan beragam. Beberapa alur sungai ada yang tenang, namun tidak sedikit yang mempunyai jeram deras dan berpotensi mencelakai para penumpang kapal. Untuk itu, biasanya para penjelajah Eropa akan menggunakan jasa para penduduk lokal untuk dapat masuk ke wilayah yang lebih dalam. Upaya ini sudah dilakukan para administrasi Hindia Belanda sejak 1819. Dengan demikian, mereka menerapkan standar ganda dalam mendekati para pemuka rakyat di pesisir dan pedalaman Borneo. Selain untuk meyakinkan para ketua suku dayak, ekspedisi semacam ini digunakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam pedalaman Borneo.⁵⁰

Pemerintah Hindia Belanda melihat Inggris seperti setengah hati melepas Borneo ke tangan Belanda. Mereka telah mendapat sejumlah bukti bahwa Gubernur Inggris di Bengkulu, Thomas Stamford Raffles mempunyai ambisi untuk mengembalikan kemajuan perdagangan Inggris di Borneo. Ia tidak saja siap bersaing secara sehat dengan Belanda, namun juga telah menyiapkan kelengkapan delegasi untuk membujuk para panembahan Simpang, Matan atau Sukadana agar mau membuka pintu dagang yang lebih lebar bagi Inggris. Diketahui pula, ia juga telah memplot pasukan kavaleri di Borneo untuk membela kepentingan tiga panembahan itu. Tentu saja, sejumlah konsinyasi diberikan Raffles untuk memuluskan langkahnya di Borneo.

Raffles melihat upaya masuknya kembali para pedagang dan pemerintah Hindia Belanda sebagai usaha untuk menciptakan monopoli perdagangan bagi mereka. Jika tidak segera dicegah, maka akan semakin sulit membujuk para panembahan lokal untuk mempertahankan kepentingan Inggris. Dalam ingatan Belanda, Raffles memang dikenal sebagai sosok yang licik, karena sewaktu Belanda berhasil menanamkan kuasanya di Banjarmasin, Raffles mengerahkan segala kemampuannya untuk membujuk para ningrat setempat untuk mendukung Inggris dan menyebarkan kebencian pada Belanda. Selain di Borneo, Raffles juga menganggap penting penguasaan pulau-pulau penyangga Borneo karena itu dapat dijadikan satelit penghubung kepentingan dagang Inggris dengan wilayah-wilayah lain secara estafet, termasuk dengan Karimata.

Upaya Raffles sebenarnya mendapat penolakan dari pejabat Inggris lainnya, terutama yang berkedudukan di Singapura. Para administrasi Inggris di sana menilai upaya Raffles menggaet animo penguasa lokal Sambas maupun Pontianak adalah suatu ketidakmungkinan dan hanya membuang-buang waktu. Mereka menilai

⁵⁰ Barth, "Overzicht ...", hal. 8 – 9.

pengaruh Pemerintah Hindia Belanda di sana sudah kuat, dengan demikian menjadi mustahil bagi Inggris untuk menjajaki kemungkinan perebutan pengaruh di sana. Pada 1819, secara resmi, pemerintah Inggris di Singapura juga menyampaikan bahwa penguasaan Karimata juga langkah yang tidak perlu dilakukan.

Di sisi lain, para pejabat Inggris justru mendukung keputusan Raffles menanamkan pengaruh di Matan dan Simpang. Dalam pandangan mereka, dua wilayah itu belum sepenuhnya berada dalam ikatan Belanda. Segala kemungkinan masih bisa ditempuh, termasuk dengan menggeser kedudukan Belanda dari sana. Traktat apapun, termasuk Traktat London, tidak akan mampu mengikat sedemikian jauh akan dua wilayah ini. Ini menjadi peluang yang penting untuk dieksploitasi.⁵¹

Pemerintah Hindia Belanda senantiasa sigap dengan ancaman Inggris. Mereka melihat pergerakan Inggris memang sudah menyentuh istana Matan dan Simpang. Beberapa informasi juga menyebutkan bahwa audiensi mereka berhasil menggoyahkan perhatian dua panembahan kerajaan tersebut untuk memihak Inggris, oleh karena Inggris berjanji membersihkan ancaman perompak. Sepanjang 1822, aktivitas bajak laut di pantai Matan semakin meninggi. Mereka tidak hanya mencegat kapal Jawa, pernah pula dikabarkan bahwa sebuah kapal Belanda bernama *Hermína* dibajak para serigala laut itu. Para kru kapal itu banyak yang terbunuh. Untuk menghindari perompak ini, perahu-perahu nelayan banyak yang berlindung di Pengagongan dan Simpang.

Pemerintah Hindia Belanda memperoleh informasi bahwa Matan berada di balik sejumlah aksi penjarahan meskipun tidak seluruhnya. Mereka memiliki divisi khusus yang dikerahkan untuk membongkar barang-barang kapal yang dibajak. Apakah mereka mempunyai hubungan dengan para bajak laut, atau bahkan dirinya sendiri adalah bajak laut, belum ditemukan informasi selanjutnya.⁵²

Kedudukan perompak memang kerap bias terlihat dalam catatan Belanda. Di beberapa lekuk perairan Indonesia, memang terdapat kumpulan para bajak laut yang bekerja menjarah kapal-kapal dagang dengan muatan yang kaya seperti milik orang-orang Eropa.⁵³ Di mata mereka, tindakan ini adalah perilaku kriminal yang harus segera dibersihkan dari lautan. Di sisi lain, untuk mempertahankan eksistensinya, beberapa kerajaan yang kebetulan mempunyai wilayah kekuasaan di pesisir, akan mempunyai sepasukan ahli perang laut, yang memang bertugas menjaga keamanan dan pertahanan maritim kerajaan tersebut. Saat mereka melihat kapal-kapal mencurigakan medekat ke wilayahnya, mereka akan diberangkatkan menindak kapal

⁵¹ Barth, "Overzicht ...", hal. 9 – 10.

⁵² Barth, "Overzicht ...", hal. 10.

⁵³ J. N. F. M. à Campo, "Patronen, Processen en Periodisering van Zeeroof en Zeeroofbestrijding in Nederlands-Indië", dalam *Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis*, Vol. 3, No. 2, 2006, hal. 78-107.

itu.⁵⁴ Sayangnya, aktivitas ini kerap dianggap Belanda sebagai tindak kriminal seperti yang dilakukan bajak laut pada umumnya, padahal ditinjau dari segi kepentingan kerajaan, ini adalah pekerjaan pengamanan rutin yang dilakukan pasukan penjaga pantai.⁵⁵

Hampir setiap aktivitas politik yang merugikan kepentingan Belanda di negeri jajahannya dikategorikan sebagai perbuatan buruk, kriminal atau tindakan licik. Para raja atau kepala pemerintahan lokal mempunyai kepentingan untuk melindungi wilayah dan masyarakatnya.⁵⁶ Untuk itu, ketika disodorkan suatu perjanjian atau kontrak oleh pemerintah Hindia Belanda atau Inggris, sebisa mungkin, mereka mendapatkan manfaat yang banyak dari kerja sama ini, karena mereka sendiri sudah menghitung bahwa para pedagang Eropa juga memperoleh hasil penjualan yang melimpah dari aneka ragam komoditas yang ada di daerahnya. Seperti idealnya perilaku pedagang yang ingin mengeluarkan modal sedikit, namun berhasrat mendulang keuntungan yang besar. Para niagawan Eropa kerap bersikukuh pada pendiriannya, dan tidak segan melakukan tekanan-tekanan tertentu agar para kepala daerah lokal menurunkan tuntutan.⁵⁷ Dalam catatan Belanda, mereka yang tidak sejalan dengan kepentingan Belanda dianggap licik atau culas.⁵⁸

Perompakan memang menjadi musuh terbesar para pedagang dan penguasa Eropa di lautan Nusantara. Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pembajakan di laut.⁵⁹ Sebagaimana diketahui, dalam tradisi kebaharian Nusantara, terdapat sekumpulan manusia yang memang mendedikasikan seluruh hidupnya di laut. Dalam bahasa Melayu, mereka kerap disebut *orang laut*.⁶⁰ Mereka menjadikan laut sebagai tempat tinggal dan mata pencahariannya. Baik Belanda maupun Inggris mempunyai kesamaan pandangan bahwa orang-orang semacam ini harus ditertibkan, karena berpotensi mengganggu kepentingan mereka di lautan. Beberapa

⁵⁴ Anita van Dissel, "Grensoverschrijdend optreden. Zeeroof en zeeroofbestrijding in NederlandsIndië", dalam *Leidschrift*, Vol. 26, 2011, hal. 19.

⁵⁵ Lebih lanjut mengenai kedudukan bajak laut dan tentara laut kerajaan lihat A. B. Lopian, *Orang Laut, Raja Laut, Bajak Laut* (Depok: Komunitas Bambu, 2009)

⁵⁶ Bambang Purwanto, "Historisme baru dan kesadaran dekonstruktif: kajian kritis terhadap historiografi Indonesiasentris", dalam *Humaniora*, Vol. 13, No. 1, 2001, hal. 29-44.

⁵⁷ Douglas A. Irwin, "Mercantilism as strategic trade policy: the Anglo-Dutch rivalry for the East India trade", dalam *Journal of Political Economy*, Vol. 99, No. 6, 1991, hal. 1296-1314.

⁵⁸ Jean Gelman Taylor, "The sewing-machine in colonial-era photographs: a record from Dutch Indonesia", dalam *Modern Asian Studies*, Vol. 46, No. 1, 2012, hal. 71-95.

⁵⁹ Ger Teitler, "Piracy in Southeast Asia: A Historical Comparison", dalam *Maritime Studies*, Vol. 1, No. 1, 2002, hal. 67-83.

⁶⁰ Timothy P. Barnard, "Celates, Rayat-Laut, pirates: The Orang Laut and their decline in history", dalam *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. 80. 2007, hal. 33-49.

kelompok orang laut terpaksa mempertahankan diri dari tekanan Belanda.⁶¹ Terkadang, mereka melakukan tindak pembajakan bukan hanya untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup semata, namun karena para pelaut Eropa telah sedemikian rapat menekan kehidupan mereka.⁶²

Orang lanun atau *ilanun* adalah istilah yang lebih umum dinisbatkan pada orang yang gemar melakukan kejahatan di laut.⁶³ Mereka kerap menjarah pemukiman penduduk lokal juga kapal-kapal Eropa. Mereka inilah yang lebih cocok dikatakan sebagai bajak laut. Daerah sebaran mereka cukup luas, mencakup perairan Borneo⁶⁴, Selat Malaka, Semenanjung Melayu, sepanjang perairan Sumatera bagian Timur⁶⁵ dan sebagainya. Mereka tidak hanya menjadi musuh bagi orang Eropa, melainkan juga bagi warga yang tinggal di pesisir. Dalam kasus tertentu, mereka tidak sepenuhnya melakukan kejahatan. Beberapa kelompok orang lanun di Bangka misalnya, membantu perjuangan tokoh lokal bernama Depati Amir melawan penjajahan Belanda.⁶⁶

Para penguasa Simpang, Matan dan Sukadana harus pandai menimbang permintaan dari Belanda dan Inggris. Bagaimanapun, keadaan mereka sendiri seperti masih berdiri di atas daun teratai, sangat rentan sekali jatuh dalam kehancuran perang saudara. Belanda melihat terpolarisasinya kekuatan di Sukadana menjadi tiga bagian sebagai peluang untuk menanamkan maksudnya di bidang ekonomi dan politik. Dengan adanya berita bahwa para penguasa lokal Sukadana menjalin kontak dengan Inggris, agaknya ikut memperkeruh rancangan peta kolonisasi yang digalang oleh Hindia Belanda. Kesempatan penguasaan yang jelas di depan mata, tiba-tiba memburam.

Muller memperoleh instruksi pada 6 November 1822 untuk ke Sukadana. Dari Sambas, ia berlayar selama dua hari ke Pontianak. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan kapal sekunar berbendera Belanda bernama *Emma*, namun ia memilih meneruskan perjalanan. Dikabarkan pula, di tengah perjalanan kapal pimpinannya bergabung dengan armada kapal lokal pimpinan Tengku Akil (Raja Akil) yang

⁶¹ Saw Swee-Hock, "Population trends in Singapore, 1819–1967", dalam *Journal of Southeast Asian History*, Vol. 10, No. 1, 1969, hal. 36-49.

⁶² Cynthia Chou, "Contesting the tenure of territoriality: the Orang Suku Laut", dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, Vol. 153, 1997, hal. 605-629.

⁶³ James Francis Warren, "Saltwater slavers and captives in the Sulu Zone, 1768–1878", dalam *Slavery and Abolition*, Vol. 31, NO. 3, 2010, hal. 429-449.

⁶⁴ Ismail Ali dan Mosli Tarsat. "The Iranun in Borneo: Pirates or Heroes from The Maritime Perspective", dalam *SEJARAH: Journal of the Department of History*, Vol. 16, 2017.

⁶⁵ Ismail Ali dan Jamaludin Moksan, "Meriam Sultan Setebuk: Simbol Keagungan Sejarah Maritim Orang Iranun di Tempasuk, Sabah", dalam *Susurgalur*, Vol. 4, No. 1, 2016.

⁶⁶ Lebih lanjut lihat M. Dien Madjid dkk, *Berebut tahta di Pulau Bangka: ketokohan Depati Amir dalam catatan Belanda (Suatu Kajian Arsip)* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN), 2015)

memang sebelumnya telah dihubungi untuk menyertai Muller ke Sukadana. Sesampainya di tujuan, Muller memperoleh informasi bahwa pihak Inggris sedang berdikusi dengan penguasa Simpang. Ia pun memilih menunggu waktu yang tepat.

Muller menggunakan waktu menunggunya untuk menghimpun segala informasi tentang Inggris. Di antara informasi yang didapatnya adalah bahwa kapal-kapal Inggris beberapa waktu sebelumnya telah hilir mudik di Sukadana. Mereka memperlihatkan pergerakan seperti operasi pengamanan yang tentu saja ditujukan untuk kedatangan kapal-kapal Belanda.

Setelah memperoleh waktu menghadap, Muller pun bergegas menemui Panembahan Simpang. Kebetulan, di saat yang bersamaan terdapat Panembahan Matan, sehingga pada kedua raja itu maksud Belanda dapat sekaligus disampaikan. Pembicaraan berjalan dengan nuansa yang bersahabat. Masing-masing pihak berbicara dan mengutarakan pandangannya dengan tanpa beban. Akhir dari percakapan ini adalah ditetapkannya sejumlah ketentuan bagi para usahawan Belanda di Sukadana. Panembahan Matan mengatakan bahwa ia puas bernegosiasi dengan Muller sebagai perwakilan Pemerintah Hindia Belanda. Di sisi lain, Panembahan Simpang terlihat belum puas dan meminta negoisasi secara terpisah.⁶⁷

Menurut pemerintah Hindia Belanda, baik Matan maupun Sintang setuju bekerjasama dengan Belanda. Dorongan atas keinginan ini didasarkan pada jaminan pasukan Belanda akan mengusir bajak laut yang meneror warga dua kerajaan yang tinggal di pesisir pantai maupun sungai. Bajak laut juga menjadi hama yang mengganggu perdagangan dari dan ke kedua kerajaan. Atas bantuan ini, dikabarkan pemerintah Hindia Belanda menginginkan pengakuan otoritas Belanda atas kedua kerajaan. Belanda menganggap bantuan militer hanya diperuntukkan bagi negara-negara yang telah mengakui kedudukan Belanda sebagai pelindungnya, dan dengan demikian harus ada pengakuan kedaulatan Belanda secara resmi di negeri yang dibantunya.

Dalam pertemuan dengan penguasa Matan dan Simpang juga ditegaskan hak penuh (secara subjektif) Belanda atas Pulau Karimata. Belanda juga kembali mengingatkan kesepakatan lama antara Banten dengan VOC pada 1778, tentang pemberian hak pengelolaan Karimata yang sebelumnya berada di bawah kuasa Banten kepada VOC lantas di kemudian hari, dilanjutkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda.

Negoisasi Hindia Belanda dan pihak Simpang serta Matan berakhir pada 13 November 1822. Di Simpang, Hindia Belanda menginginkan agar pengakuan Belanda atas wilayah Simpang diresmikan secara seremonial. Mereka meminta agar Panembahan Sintang menggelar suatu upacara yang dihadiri perangkat kerajaan dan rakyat Sintang yang semuanya menyaksikan pengibaran bendera Belanda sebagai bukti bahwa penguasa lokal beserta rakyatnya mengakui kekuasaan Belanda.

⁶⁷ Barth, "Overzicht ...", hal. 10.

Dilaporkan bahwa setelah itu, Muller dan Sultan Matan bersama-sama pergi ke Matan. Pada 3 Desember 1822 upacara sebagaimana terlihat di Simpang dilakukan pula di Matan, tepatnya di Pegadongan, bekas kediaman Sultan. Bendera Belanda berkibar di sana di hadapan mata semua perangkat istana dan rakyat Matan. Setelah menyelesaikan lawatannya di sini, Muller kembali ke Pontianak.

Muller juga melakukan kunjungan ke Sukadana pada 18 Desember 1822. Di sana Muller disambut oleh dua perwakilan istana Matan, yakni Pangeran Jayadilaga dan Pangeran Daeng Cela. Upacara pengakuan kuasa Belanda atas Sukadana dilakukan dengan dukungan keduanya dan dihadiri pula oleh perangkat pemerintahan lokal dan rakyatnya. Bendera Belanda dikibarkan di sebelah Utara mulut sungai dekat pusat pemerintahan Sukadana. Setelah dari sini, Muller mengagendakan kepergian ke Karimata disertai dengan perwakilan istana Pontianak, Wan Hasan. Pejabat Belanda ini berkepentingan mengibarkan bendera Belanda di pulau itu.

Langkah estafet bukti pengakuan pemerintah lokal Pantai Barat Borneo atas kuasa Belanda ini dimaksudkan untuk segera mengikat mereka agar sejalan dengan pemerintahan Batavia.

Pada Juni 1823, dilaporkan bahwa Muller bertandang ke Simpang guna menemui penguasa setempat. Ia menyendorkan suatu kontrak atas nama atasannya, Komisaris Tobias. Dalam pembicaraan ini juga disampaikan bahwa untuk urusan pengamanan dan pertahanan di Pantai Barat Borneo, akan dipimpin oleh penguasa Belanda (*gezaghebber*) bernama C. L. Hartman. Ia akan bertanggung jawab terhadap Komisaris Tobias. Perjanjian dengan Matan untuk urusan-urusan yang lebih terperinci beberapa waktu kemudian juga dilakukan.⁶⁸ Perjanjian-perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda selalu disertai dengan redaksi “sementara”. Dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat berubah, jika terdapat sesuatu yang dianggap Belanda perlu untuk dirubah, terlebih yang berkaitan dengan kepentingannya.

Implementasi atas kesepakatan perjanjian Belanda dengan penguasa Pantai Barat Borneo tidak seluruhnya mudah dilakukan. Pendirian pos-pos militer di Sukadana dan Karimata, umpamanya, tidak bisa dibangun dengan segera karena tidak tersedianya sumber daya yang cukup untuk tujuan ini. Pemerintah Hindia Belanda masih belum menemukan solusi finansial atas wilayah tersebut. Mereka harus menyediakan dana yang cukup untuk melakukan operasi militer di wilayah tersebut, sebagai antisipasi jika suatu ketika muncul perlawanan dari tubuh rakyat. Belum lagi anggaran yang disediakan untuk mengamankan garis pantai dari gangguan para bajak laut masih minim.

Oleh sebab beragamnya keterbatasan yang ada, maka Gubernur Pantai Barat Borneo diminta untuk melakukan apa yang ia dapat kerjakan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Penambahan logistik dan tenaga militer belum bisa dilakukan dalam

⁶⁸ Barth, “Overzicht ...”, hal. 11 – 12.

waktu dekat. Untuk itu, Gubernur Borneo terus berkoordinasi dengan Tengku Akil yang mempunyai pasukan dan perahu yang bisa diandalkan untuk menambah kekuatan pasukan kolonial yang tersedia. Pemerintah Hindia Belanda juga menjalin kesepahaman dengan Batin Galang, kepala Orang Laut di Karimata. Sebagai imbalan atas kerjasama ini, pasukan Hindia Belanda sempat diterjunkan untuk menghalau para bajak laut yang sering menghampiri pemukiman Orang Laut di pulau ini.

B. Sultan Jamaludin melawan Belanda dan Tengku Akil

Dari catatan pihak Belanda, diketahui bahwa aktivitas bajak laut di Karimata dan di daerah sekitar Pantai Barat Borneo didukung oleh sejumlah penguasa lokal. Sultan Jamaluddin, Sultan Matan, dikabarkan mengirim sejumlah bantuan kepada sekelompok bajak laut agar mereka dapat terus melancarkan upayanya, utamanya dalam mengganggu kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Langkah ini dilakukan Sultan Matan dengan tanpa mengindahkan perjanjiannya dengan Belanda. Justru, ketika ditelusuri mengapa pihak Matan berani berbuat demikian, jawaban yang didapat adalah bantuan atas bajak laut di luar ketentuan kontrak dengan Belanda.

Diketahui, Sultan Matan mempunyai dua wajah ketika berhubungan dengan Belanda. Kontrak yang semula disepakatinya rupanya tidak dijalankan secara penuh. Suatu ketika, pernah terjadi sebuah kapal berbendera Belanda terdampar di Pulau Karimata. Mengetahui hal itu, Batin Galang, yang sebelumnya telah menyatakan menjadi mitra Belanda, memerintahkan anak buahnya untuk menyelamatkan barang-barang yang ada di kapal itu. Kabar terdamparnya kapal itu terdengar ke telinga Sultan Matan. Sang Sultan mengirim kabar bahwa Matan menginginkan barang-barang itu. Batin Galang bersikeras mempertahankannya. Penolakan itu berbuah pengepungan atas Karimata.

Pada Desember 1827, Sultan Matan mengirim 22 perahu lengkap dengan pasukan menyerang pemukiman Orang Laut pimpinan Batin Galang. Bersama dengan masyarakatnya, Batin Galang berjuang melawan pasukan Matan. Tidak lama kemudian, Batin Galang dan saudaranya, Panglima Raja tewas dalam perang ini. Menurut catatan Belanda, pasukan Matan membawa dua kepala pemimpin Orang Laut itu beserta bendera Belanda yang terkoyak ke ibukota Matan sebagai tanda kemenangan.⁶⁹

Belanda tidak dapat menerima serangan Sultan Matan atas Karimata. Komisaris Du Bus menyatakan bahwa serangan itu adalah suatu masalah besar. Ia menyarankan agar pemerintah Hindia Belanda segera menjatuhkan hukuman atas penghianatan tersebut. Bagaimanapun, serah terima kuasa wilayah sudah dilakukan. Segala bentuk

⁶⁹ Barth, "Overzicht ...", hal. 12.

tindak penyerangan terhadap sesama sekutu Belanda, dapat dijadikan alasan untuk memberlakukan serangan balik sebagai hukuman atas suatu perilaku sewenang-wenang.

Di sisi lain, pemerintah Hindia Belanda ingin menjadikan kemelut Karimata yang disulut oleh Sultan Matan sebagai peluang balas budi bagi Tengku Akil. Sejak sebelum ditandatanganinya kontrak dengan para penguasa Pantai Barat Borneo, Tengku Akil telah banyak membantu kelancaran ekspedisi maupun penanaman kuasa Hindia Belanda atas wilayah tersebut. Kemenangan yang mungkin akan diterima pasukan pemerintah Hindia Belanda atas serbuannya ke Matan, sebagian akan diberikan kepada Tengku Akil sebagai hadiah kesetiannya.

Rapat segera dilakukan di kantor kuasa Hindia Belanda di Pantai Barat Borneo dan diputuskan suatu ekspedisi menghukum Matan. Suatu armada disiapkan terdiri dari suatu kapal berjenis fregat, sekunar dan tiga kapal pengebom di bawah komando Kapten Dibbetz. Pasukan Tengku Akil yang menaiki 9 perahu juga tergabung dalam ekspedisi ini. Armada ini berangkat pada 16 Juli 1828. Mendekati lokasi penyerangan, pasukan dibagi dalam dua grup, yang satu mendarat di suatu daerah bernama Kandang Kerbau Ketapang dan yang lain mendarat di pinggir Sungai Pawan. Setelah mengadakan pengamatan selama beberapa waktu, perang pun pecah pada 2 September 1828.

Pasukan Matan yang merasa kewibawaannya terancam dengan kedatangan musuh, mulai mengerahkan tenaganya menggebrak serangan lawan. Di bawah guyuran peluru musuh, para pendekar pilihan Matan berjibaku berloncatan ke sana – ke mari, sembari mencari ruang mendaratkan kebatan parang atau belatinya ke tubuh lawan. Yang lain, segera memacu langkah cepat beradu cepat dengan pasukan Belanda yang sedang memasukkan mesiu ke senapannya. Pendekar Matan itu meloncat dengan sigap sambil kirimkan kebatan parang ke tubuh lawan. Di sisi lain, seorang pasukan Belanda sudah hampir siap dengan bidikan senapannya. Pemandangan yang epik pun terlihat, di mana pendekar Matan itu seperti menapak udara lantas berkelit dari desingan peluru lawan. Sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, ia sudah mengirimkan tabasan ke tubuh musuhnya. Si pasukan Belanda pun jatuh tersungkur dan mengerang kesakitan.

Pasukan Belanda menyerang dari wilayah perairan dan daratan. Deru senapan kanon yang berasal dari wilayah perairan sangat mengganggu pergerakan pasukan Matan. Pemimpin pasukan Matan memutuskan untuk mengundurkan diri untuk dapat menyusun siasat balasan. Secara bertahap pasukan Matan masih melontarkan serangan sambil satu dua langkah mengundurkan diri dari medan laga. Untuk episode perang kali ini, pasukan Belanda dan Tengku Akil berhasil memperoleh kemenangan. Perlu diketahui, kemenangan ini tentu saja bukan finalitas. Mereka bersorak di tanah yang bergoyang, yang satu ketika dapat melahap sorak mereka.

Setelah memastikan musuh sudah mundur, Kapten Dibbetz dan Tengku Akil segera berunding untuk menentukan langkah lanjutan. Muncul gagasan untuk melanjutkan ekspedisi ke Muara Kayung, karena menurut keterangan yang didapat, tempat itu adalah salah satu markas Matan setelah mengundurkan diri. Setelah diteliti lebih lanjut, langkah ini tidak dapat ditempuh. Hujan yang turun membuat debit air sungai meningkat dan akses menuju ke sana akan sangat sulit karena volume air yang terlalu besar.

Setelah kekalahan Matan, Belanda menyebarkan suatu publikasi ke tengah masyarakat Matan yang isinya adalah Panembahan Matan telah melanggar perjanjian dengan Belanda. Ia adalah raja yang sudah kehilangan wibawa dan tidak pantas lagi diakui kekuasaannya. Perbuatannya merobek bendera Belanda adalah suatu laku tercela. Ia telah kehilangan kekuasaannya. Untuk itu, Pemerintah Hindia Belanda menunjuk Tengku Akil sebagai penggantinya menjadi penguasa Matan. Diserukan pula bahwa seluruh pihak yang ikut serta dalam barisan perlawanan Matan beberapa waktu sebelumnya, diminta keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka harus mengakui wewenang sultan yang baru lalu mereka mendapatkan pengampunannya.

Selebaran yang dibagikan Belanda ke penduduk Matan rupanya juga sampai ke hadapan Panembahan Matan. Diketahui, sesaat sebelum pecahnya perang Matan melawan gabungan pasukan Belanda dan Tengku Akil, Sang Panembahan sudah terlebih dahulu mengundurkan diri dari istananya. Ia sengaja menyembunyikan diri ke tempat yang dirasa aman, agar garis komunikasi tidak dapat diendus musuh. Ia memilih tempat di dataran tinggi untuk mengalirkan perintah ke pasukannya. Menurut sumber Belanda, Sultan Matan menunjukkan penyesalan terhadap keributan sebelumnya. Ia meminta waktu untuk menyiapkan diri dan bertemu dengan Residen Gronovius, kepala perwakilan Hindia Belanda di Pontianak.

Tanpa harus meminta pertimbangan lagi dengan Sultan Matan, atau penguasa lokal Pantai Barat Borneo lainnya, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan kawasan Sukadana dan Kepulauan Karimata di bawah kekuasaan Tengku Akil. Langkah ini tentu saja menimbulkan ketegangan di kalangan penguasa lainnya. akibatnya, hubungan Belanda dengan Simpang, atau dengan sisa-sisa pejabat istana Matan pun mendingin. Sampai waktu penobatan Tengku Akil. Sultan Matan dan rombongannya tidak kunjung keluar dari tempat persembunyiannya. Residen Gronovius pun akhirnya melantik Tengku Akil menjadi penguasa Sukadana. Sejak itu nama Sukadana diganti menjadi Nieuw Brussels.⁷⁰

⁷⁰ Barth, "Overzicht ...", hal. 13 – 14.

C. Dilema Nieuw Brussels

Tengku Akil diangkat menjadi Sultan Matan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Yang Dipertuan Syah Di Brussels.

Dikuasainya Matan oleh Tengku Akil menyebabkan perubahan yang signifikan bagi sektor maritim di sana. Dari hari ke hari, Tengku Akil mengadakan perubahan kebijakan dari yang semula diberlakukan para Sultan Matan sebelumnya.

Dewan Lokal (*landraad*) akan didirikan di Nieuw Brussels. Sultan adalah otoritas hukum tertinggi. Ia mempunyai wewenang untuk menjatuhkan putusan hukuman sampai dengan hukuman mati. Adapun pelaksanaannya, tetap membutuhkan keputusan residen.⁷¹ Dengan kata lain, wewenang tertinggi tetap ada di tangan perwakilan pemerintah kolonial.

Berbanding terbalik dengan keriuhan yang terjadi di istana, wibawa kesultanan Matan kian jatuh di mata masyarakat. Secara umum, mereka tidak menginginkan keberadaan Tengku Akil yang dianggap sebagai penguasa boneka Belanda. Kendati masyarakat tidak melakukan perlawanan, namun mereka memutuskan untuk abai terhadap perkembangan istana Matan. Hal ini cukup untuk menyebut kedudukan Tengku Akil tidak mempunyai pengaruh yang luas di tataran publik. Justru ia memulai periode ketidakpercayaan rakyat pada Kesultanan Matan.

Dari informasi lain disebutkan bahwa penyerahan Sultan Jamaluddin nyatanya tidak pernah terealisasi secara resmi. Tidak lama berselang, setelah peresmian Nieuw Brussels, tepatnya pada 1829, muncul kabar bahwa Sultan Jamaluddin telah mangkat. Berita ini membuat sedih perangkat istana Matan karena penguasa mereka harus menutup mata dalam keadaan yang serba kesulitan. Oleh sebagian loyalisnya, kematiannya tentu saja menjadi tengara untuk memelihara semangat anti-kolonialisme. Di sisi lain, bagi Belanda, kematian Sultan Jamaluddin ditanggapi dengan suka cita. Setidaknya, salah satu hambatan penting untuk menanamkan pengaruh Belanda di Matan telah hilang.

Dalam penilaian Belanda, sebenarnya Tengku Akil tidak memahami adat istiadat, tata cara pemerintahan, problem atau solusi atasnya serta segala hal yang menyangkut Kesultanan Matan. Ia hanyalah pasukan pembantu yang memuluskan jalan bagi berkibarnya bendera Belanda di Matan. Namun kenyataan ini tentu saja tidak akan disebarluaskan. Sebaliknya, Belanda justru mendukung penuh masa pemerintahan Tengku Akil. Belanda menyadari bahwa bantuan darinya tidak bisa dikatakan sedikit. Setelah dipikirkan masak-masak, maka pemberian tahta Matan untuknya adalah suatu hadiah yang pantas. Di sisi lain, Tengku Akil benar-benar telah memainkan peran yang baik sebagai Sultan baru Matan. Ia memerintah laiknya

⁷¹ Barth, "Overzicht ...", hal. 17.

keturunan Sultan Matan dan menggunakan tanda-tanda kebesaran kerajaan yang telah menjadi tradisi di kerajaan itu.

Penganugerahan Matan pada Tengku Akil menyimpan sedikit rasa tidak enak di benak Residen Gronovius. Kasus ini merupakan kasus yang jarang terjadi. Biasanya, ketika pasukan Belanda berhasil menaklukkan seorang penguasa lokal, maka ia akan segera menerapkan tata pemerintahan kolonial di dalamnya. Penguasa lokal yang berpihak pada Belanda tetap diakui, namun kedudukannya tetap di bawah wibawa pemerintah kolonial. Biasanya, penguasa lokal yang ditunjuk Belanda, mempunyai garis keturunan atau kekerabatan dari penguasa sebelumnya, sehingga di skrup internal anggota keluarga kerajaan tidak ada gesekan politik yang besar.

Tengku Akil bukan merupakan anggota keluarga kerajaan Matan. Ia berasal dari Riau. Ia merupakan kepala dari pasukan bayaran yang membantu pendudukan kolonial atas sejumlah wilayah di Borneo. Setelah target utama tercapai, maka pemberian hadiah atasnya adalah keniscayaan. Namun, jika ditimbang dari satu sisi, menjadikannya sebagai sultan di negeri orang akan menimbulkan masalah baru, yakni ketidakadaan dukungan dari para ahli waris istana Matan. Ia akan segera menjadi sasaran tembak atas instrik yang terjadi di dalam istana. Segala faksi keluarga yang ada, seketika akan menjadikannya sebagai musuh bersama yang harus dilenyapkan. Di sisi lain, kekhawatiran Gronovius juga menysar ke semakin tidak populernya pemerintahan Hindia Belanda di mata perangkat istana Matan karena memplot raja yang bukan dari putra kerajaan Matan sendiri. Dengan sendirinya, kebencian terhadap Belanda akan tumbuh subur.

Mau tidak mau, Residen Gronovius akan menghadapi hujan pertanyaan dari pemerintah pusat akan pengangkatan Tengku Akil. Namun, ia telah menyiapkan jawaban atas semua pertanyaan itu. Bagaimanapun, Tengku Akil adalah sosok yang loyalitasnya perlu dihargai. Residen akan memberikan sokongan atas suara sumbang yang dilayangkan pada Raja Nieuw Brussels itu.

Ota Atsushi menyebutkan bahwa Sultan Nieuw Brussels mengagendakan kerajaannya bersih dari pengaruh bajak laut. Untuk itu, ia membangun relasi dengan Kesultanan Johor sembari memperkuat hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda dalam rangka menerapkan kebijakan anti-bajak laut. Sebenarnya, ini merupakan satu bentuk kekhawatiran Tengku Akil akan munculnya kekuatan-kekuatan lokal yang berseberangan dengan kepentingannya. Atas dalih anti-bajak laut, ia ingin agar kerajaan lain membantunya untuk menertibkan para penguasa lokal yang sedang mengintai dan menunggu waktu tepat untuk menjungkkannya.⁷²

⁷² Ota Atsushi, "Trade, Piracy and Sovereignty: Changing Perceptions of Piracy and Dutch Colonial State-Building in Malay Waters, c. 1780 – 1830" dalam Ota Atsushi, ed, *In The Name of Battle againts Piracy; Ideas and Practices in State Monopoly of Maritime Vilence in Europe and Asia in the Period of Transition* (Leiden: Brill, 2018) hal. 141 -142.

Apa yang dikhawatirkan Gronovius menjadi kenyataan. Pemerintahan Tengku Akil tidak mendapat tanggapan yang baik di kalangan istana Matan. Baik secara sembunyi maupun terang-terangan, sudah muncul protes terhadap kedudukannya.

Oleh sebab tiadanya pengaruh yang melekat pada kedudukan Sultan Abdul Jalil Raja Nieuw Brussels, maka muncul suatu gagasan agar dirinya mengangkat seorang berkedudukan sebagai panembahan yang mengurus pemerintahan sebagai wakil dari Sultan Abdul Jalil. Panembahan ini harus berlatarbelakang keluarga Kesultanan Matan. Satu nama yang mencuat adalah seorang bernama Pangeran Soma Inda. Sebelumnya, ia menduduki suatu jabatan yang dipaduk Pangeran Suryaningrat. Pangeran Soma Inda dibesarkan di Simpang. Ia adalah putra dari saudara tiri Pangeran Suryaningrat dan ipar dari Sultan Jamaluddin, Raja Matan.⁷³ Profil ini kemudian dianggap tidak layak menjadi Panembahan Matan.

Setelah diadakan kajian yang lebih mendalam terhadap para keluarga istana Matan, maka pemerintah Hindia Belanda lewat Residen Gronovius menunjuk Pangeran Adi Mangkurat sebagai Panembahan Matan. Ia diangkat menduduki jabatan ini dengan gelar Panembahan Anom Kesuma Nagara.

Pangeran Adi Mangkurat adalah putra dari Pangeran Mangkurat Suma Indra, yang merupakan saudara tiri dari Sultan Jamaluddin. Sebelumnya, Pangeran Mangkurat Suma Indra adalah sosok yang ditunjuk ayahnya Sultan Ahmad (Muhammad) Kamaluddin sebagai pewaris tahta Matan. Dalam perjalanan hidup berikutnya, ternyata karena suatu keadaan, tahta kerajaan tidak diberikan olehnya, dan sebagai kompensasi, ia diberikan suatu daerah kekuasaan di Kendawangan. Sultan Matan memberikan status daerah itu sebagai daerah khusus yang dapat diwariskan secara turun temurun. Pada 1817, Pangeran Mangkurat Suma Indra meninggal dunia. Setelah dewasa, anaknya, Pangeran Adi Mangkurat menikah dengan putri Sultan Jamaluddin yang bernama Otin Tima. Setelah pernikahan itu, Pangeran Adi Mangkurat masih merasa bahwa ia adalah ahli waris dari tahta Sultan Matan.

Pada 1822, Pangeran Adi Mangkurat pernah ditugaskan Sultan Jamaluddin ke Bengkulu-Inggris untuk bernegosiasi dengan Raffles. Pembicaraan mereka berkisar tentang kemungkinan terbukanya hubungan Matan – Inggris yang harmonis dan menguntungkan. Di balik agenda ini, Pangeran Adi Mangkurat diketahui meminta bantuan Inggris untuk memperoleh suksesi kerajaan Matan baginya, dengan sejumlah imbalan yang tentu saja menguntungkan Inggris. Sepulangannya ke Matan, ia segera menggalang kekuatan supaya ketika Inggris tiba nanti, dapat segera menyatukan persepsi untuk menjungkalkan kedudukan Sultan Matan.

Rencana makar Pangeran Adi Mangkurat tidak benar-benar terlaksana. Belanda telah mengetahui rencana licik ini. Belum lama sebelumnya, Belanda mendapat informasi bahwa terdapat mata-mata Inggris yang berkeliaran di Matan. Ini

⁷³ Barth, "Overzicht ...", hal. 14 – 15.

merupakan bukti adanya kontak rahasia kalangan istana Matan dengan Inggris. Mereka segera melaporkan berita ini ke Sultan Matan, sehingga Pangeran Adi Mangkurat dan para pengikutnya dapat segera diamankan. Pergerakan mereka pun dibatasi.

Setelah jatuhnya Sultan Jamaluddin, Pangeran Adi Mangkurat seperti menemukan angin politik baru. Dalam catatan Belanda, ia sempat memimpin pasukan dan menciptakan kerusuhan yang merugikan kepentingan Belanda. Namun intensitas aktivitasnya semakin menurun. Ia cenderung menarik diri dari keramaian. Ketika Tengku Akil menaklukkan Pengadongan, ia sempat muncul namun memilih bersikap damai dengan calon penguasa baru itu. Diketahui, Pangeran Adi Mangkurat mempunyai reputasi yang baik di mata masyarakat Matan. Ia dicintai kakak laki-lakinya, Pangeran Cakranegara yang rela melepas tahta panembahannya, dan memutuskan untuk hidup bersama Pangeran Adi Mangkurat di Kendawangan. Residen Gronovius melihat pengaruh Pangeran Adi Mangkurat ini sebagai modal bahwa ia adalah orang yang cocok untuk menemani Tengku Akil memerintah Nieuw Brussels.

Setelah dilantik menjadi Panembahan Matan, Pangeran Adi Mangkurat segera diberi pengarahan oleh Residen Gronovius. Ia diminta untuk selaras dalam menjalankan pemerintahan dengan Sultan Abdul Jalil, Sultan Nieuw Brussels.

Apa yang terjadi adalah sebaliknya. Sejak masa awal pemerintahannya, Panembahan Matan tidak megindahkan garis kepemimpinan Sultan Abdul Jalil. Meskipun tidak secara terbuka, ia menunjukkan sikap yang berseberangan dan tidak mengakui kedudukan tahta Nieuw Brussels atas jabatannya. Suatu ketika, ia pernah menolak panggilan Sultan Abdul Jalil. Sesuatu yang membuat Sultan Nieuw Brussels itu gusar. Ketika dimintai keterangan oleh Belanda, mengapa Panembahan Matan menolak, ia menjawab bahwa dirinya tidak harus menyatakan ketundukannya pada Sultan Nieuw Brussels. Matan bukanlah bawahan Nieuw Brussels. Ia juga mengingatkan bahwa kedudukannya dengan Pemerintah Hindia Belanda adalah mitra yang bersahabat.

Pernyataan Panembahan Matan membuat Sultan Sultan Abdul Jalil marah. Ia mendesak Pemerintah Hindia Belanda untuk menyingkirkan Pangeran Adi Mangkurat dan menggantikannya dengan Pangeran Ratu, putra dari mendiang Sultan Jamaluddin. Belanda terlihat gamang dalam masalah ini. Mengetahui hal itu, Sultan Nieuw Brussels pun menjatuhkan kebijakan sepihak dengan melantik Pangeran Ratu menjadi Panembahan Matan, tanpa menunggu keputusan dari pemerintah kolonial.⁷⁴

Kericuhan atas pendirian Kesultanan Nieuw Brussels belum kunjung reda. Panembahan Anom Kesuma Nagara menyatakan menolak tahta ini dan melakukan

⁷⁴ Barth, "Overzicht ...", hal. 15 – 16.

pemberontakan. Sultan pun segera merespon tantangan ini, dengan mempersiapkan pasukan untuk menjaga pusat pemerintahannya. Panembahan Anom memberikan keterangan bahwa pemberontakan ini adalah respon pembelaan terhadap klaim Raja Akil. Diakuinya, sosok Bangsawan Riau ini adalah orang yang tegas memegang sumpahnya. Ketika terjadi huru hara pemerintahan lokal, ia memilih menahan diri untuk tidak ikut campur.

Panembahan Anom Kesuma pernah mendengar suatu sumpah dari Raja Akil bahwa ia dan tujuh keturunannya tidak akan ikut campur dalam perselisihan antarkeluarga penguasa Matan. Sumpah ini diucapkan Raja Akil saat dirinya menyertai ekspedisi Kapten Dibbetz. Atas dasar itu, Panembahan Anom Kesuma memutuskan dukungannya untuk Raja Akil. Ia menyatakan siap menyokong perjuangan Raja Akil mendapatkan konsesi atas kiprahnya membantu Belanda di Sukadana, namun belum kunjung diindahkan oleh Pemerintah Belanda. Kendati demikian, ia mengatakan tetap menghormati wibawa Residen Belanda. Ia tidak akan menolak Sultan Nieuw Brussels, asalkan ia tetap mempertahankan garis aturan dan adat istiadat kesultanan yang telah mapan sebelumnya.⁷⁵ Kemungkinan, ini adalah redaksi halus agar Sultan Nieuw Brussels meletakkan jabatannya.

Pemerintah Hindia Belanda melindungi posisi Raja Akil dari ancaman para penguasa lokal. Untuk meredakan ketegangan akibat pendirian Nieuw Brussels, Kompeni segera menetapkan peraturan bahwa hanya penguasa Nieuw Brussels yang berhak menyandang gelar Sultan. Selebihnya, yakni Matan dan Simpang, penguasanya hanya bergelar Panembahan.⁷⁶

Pemerintah Hindia Belanda di Pantai Barat Borneo mempunyai wewenang dalam menyelesaikan setiap persoalan politik di negeri bawahannya, termasuk di Sukadana. Memang, masalah terbesar yang dihadapi mereka adalah relasi antar penguasa atau tokoh masyarakat lokal yang tidak serempak dan mufakat dalam mendukung keputusan Hindia Belanda. Meskipun terkesan bersebarangan dengan Pemerintah Belanda, namun para bangsawan Sukadana masih menahan diri untuk terlibat dalam konfrontasi fisik dengan mereka. Setidaknya, ada kesadaran di antara mereka bahwa menghadapi Belanda berikut pendukungnya saat itu merupakan jalan hampir mustahil. Untuk itu, bersabar dan menahan diri, sementara adalah tindakan yang dapat dilakukan.

Pemerintah Hindia Belanda sendiri masih menghitung langkah apa yang harus dilakukan. Mereka tentu sadar, kedudukannya sangat penting untuk mengatur harmonisasi politik lokal. Namun, pengambilan kebijakan yang tidak populer dan

⁷⁵ Barth, "Overzicht ...", hal. 16.

⁷⁶ <http://kerajaansimpang.blogspot.com/>, diakses pada pukul 10.30, Jumat, 30 April 2020. Penulis terpaksa mengakses sumber berbasis *blogspot*, karena minimnya sumber tentang kerajaan-kerajaan di Sukadana. Boleh jadi, penulis artikel di *blog* ini berasal dari kalangan warga setempat yang mempunyai perhatian terhadap sejarah lokal.

melegakan para pihak yang bertikai, bukan menjadi jalan keluar. Keputusan menjalankan operasi militer terhadap para penentang Sultan Nieuw Brussels misalnya, bukan menjadi jawaban atas masalah di Sukadana. Ketidakpopuleran Sultan Baru itu menjadi penyebab utama, mengapa Belanda terkesan bingung, harus mulai dari mana menertibkan para penguasa yang terlibat dalam kepentingan Sukadana, mengingat semuanya mempunyai patronase kuat dengan masyarakat-masyarakat pimpinannya.

Oleh sebab pemimpin Hindia Belanda di Pantai Barat Borneo tidak menemukan jawaban yang pasti, Sultan Nieuw Brussels mengirim surat ke pemerintah pusat di Batavia untuk menanyakan solusi atas masalah Sukadana. Pada 3 September 1830, surat dari Gubernur Jenderal dilayangkan ke Sukadana. Isi dari surat ini adalah izin bagi residen dan sultan untuk mendiskusikan masalah tersebut bersama-sama. Gubernur Jenderal juga berpesan pada residen untuk membuat kontrak yang lebih komprehensif terkait pengaturan administrasi dan pengelolaan Sukadana, agar wewenang-wewenang atasnya dapat mengalir sesuai sumbernya. Kontrak ini dibuat tentu saja untuk menjamin kepentingan Belanda di Sukadana.⁷⁷

Pada awal 1831, Sultan Nieuw Brussels dan Residen Pantai Barat Borneo ditugaskan ke Batavia. Mereka menghadiri sejumlah pertemuan, salah satunya dengan anggota dewan *Raad van Indie*. Dalam pertemuan itu, akan dikemukakan masalah-masalah yang ada di Sukadana. Aneka ragam saran diberikan demi terciptanya iklim terkendali dan aman. Pertemuan-pertemuan ini mengilhami disahkannya suatu kontrak antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Kesultanan Nieuw Brussels yang ditandatangani Gubernur Jenderal pada 10 Maret 1831. Isi dari kontrak ini adalah larangan bagi Sultan untuk bekerjasama dengan orang Eropa (selain perwakilan Belanda atau orang yang telah diberi izin oleh Pemerintah Hindia Belanda), larangan menjalin hubungan dengan para pangeran atau bangsawan lokal (tanpa sepengetahuan residen), perlindungan perniagaan, promosi produk buatan Hindia Belanda, dan lain sebagainya. Jika diperhatikan, beberapa poin tersebut tentu saja amat menguntungkan pihak Hindia Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda akan menugaskan seorang penguasa sipil perwakilannya (*gezaghebber*) di Nieuw Brussels. Ia bertanggung jawab pada residen. Nantinya, Sultan akan banyak bekerjasama dengan dirinya. Secara berkala, Sultan juga diminta memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan berkaitan dengan daerah yang dipimpinnya. Catatan-catatan tertulis ini nantinya akan digunakan sebagai gambaran yang akan dipelajari oleh para pegawai baru yang ditugaskan ke sana.

Setelah didiskusikan dalam pertemuan terbatas, Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mempertahankan kedudukan Pangeran Adi Mangkurat sebagai Panembahan Matan. Dengan kata lain, sementara Sultan Nieuw Brussels tidak bisa

⁷⁷ Barth, "Overzicht ...", hal. 16.

mengganti keputusan ini, karena orang yang ditunjuk sebelumnya memang sudah dipercaya pemerintah Hindia Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda tetap ingin menyenangkan Sultan Nieuw Brussels. Mereka pun memberikan insentif sebesar f 30.000 sebagai “dana promosi perdagangan dan industri setempat”. Insentif semacam ini sudah diterima oleh Sultan beberapa tahun sebelumnya. Pada Arpil 1828 hingga akhir 1830, Sultan menerima 42.000 pon beras dari stok pemerintah Hindia Belanda.⁷⁸

Penguasa sipil Hindia Belanda (*gezaghebber*) akan menerima gaji sebanyak f 250. Dalam bertugas, ia akan ditemani oleh sebuah detasemen yang terdiri dari 1 sersan, 2 kopral dan 16 pasukan. Para petugas militer ini akan ditempatkan di garnisun Sukadana. Biaya pembangunan garnisun dianggarkan sebesar f 1600.

Pemerintah Hindia Belanda berpesan kepada Sultan Nieuw Brussels agar membangun hubungan yang harmonis dengan para pemimpin masyarakat bawahannya, termasuk dengan Panembahan Matan.

Saat Sultan sudah pulang ke Sukadana, tidak lama kemudian penguasa sipil pun datang dan segera bertugas. Keduanya segera mengagendakan pertemuan untuk membahas pemerintahan di Sukadana. Salah satu topik yang dibahas adalah bagaimana memperbaiki hubungan dengan Panembahan Matan. Dicapai suatu solusi bahwa Sultan perlu mengundang Panembahan Matan untuk datang ke Sukadana. Surat pun segera disampaikan ke Matan. Tidak lama kemudian, jawaban pun datang yang berisi tentang ketidakbersediaan Panembahan Matan menghadap ke Sukadana. Alasan yang diutarakannya adalah kondisi badannya sedang sakit.⁷⁹

Panembahan Matan seperti ingin terus membuat gusar Sultan Nieuw Brussels. Pada suatu waktu, pemberian upeti serta setoran pendapatan daerah tiba. Panembahan Matan tidak kunjung menunaikan kewajibannya pada pemerintah Nieuw Brussels. Ketiadaan pemasukan ini cukup mengganggu perekonomian Nieuw Brussels karena Sultan tidak dapat memberikan pendapatan daerahnya sesuai jumlah yang ditentukan dalam kontrak dengan Pemerintah Hindia Belanda.

Agar masalah tidak berlarut-larut, pada awal 1833, Sultan Nieuw Brussels pun mengirim surat kepada Goldman, perwakilan *Raad van Indie* dan menceritakan latar belakang berkurangnya pendapatan yang harus disetorkan pada Pemerintah Hindia Belanda. Ia juga mengadukan keluhannya yang tidak kunjung direalisasikan oleh Pemerintah Pantai Barat Borneo. Belum ada pemecahan nyata untuk menertibkan Panembahan Matan. Oleh sebab itu, ia meminta Goldman agar membantu merealisasikan penegakan hak yang seharusnya dilakukan. Langkah yang dimaksud adalah memberikan pelajaran kepada Panembahan Matan.

⁷⁸ Barth, “Overzicht ...”, hal. 17.

⁷⁹ Barth, “Overzicht ...”, hal. 18.

Masih di sekitar Januari 1833, jawaban atas keluhan Sultan Nieuw Brussels pun didapat dari Pemerintah Hindia Belanda di Pantai Barat Borneo. Mereka bersedia memediasi perbaikan hubungan antara Sultan Nieuw Brussels dengan Panembahan Matan. Tidak lama berselang, pertemuan itu pun terjadi. Dalam momen tersebut, Panembahan Matan hadir dan menyatakan keinginannya untuk membina hubungan baik dengan Sultan Nieuw Brussels. Ia juga berjanji akan memberikan kekurangan setoran pendapatan daerah Matan sesuai dengan jumlah yang ditargetkan.

Hasil mediasi di atas, rupanya tidak diindahkan lagi oleh Panembahan Matan. Selepas pertemuan dengan Sultan, ia kembali tidak pernah merespon panggilan pemimpinnya itu. Ada kesan, ia sama sekali tidak ingin lagi berhubungan dengan penguasa Nieuw Brussels. Diketahui, bahwa ia justru memindahkan pusat pemerintahannya ke wilayah yang lebih ke pedalaman. Surat-surat dari Sukadana dibiarkannya menumpuk, tanpa ada hasrat untuk membalasnya.

Pada Mei 1833, Sultan Nieuw Brussels bertemu dengan seorang komisaris Hindia Belanda bernama Francis di Kuala Ketapang. Dalam percakapannya, ia menyinggung tentang perilaku Panembahan Matan yang kembali berubah dengan tidak memperdulikan wibawa Kesultanan Nieuw Brussels. Sang Komisaris menyarankan padanya untuk mencoba lagi menjalin hubungan dengan Panembahan Matan dengan ungkapan-ungkapan yang lebih lembut. Jika jalan ini tidak berhasil, maka surat untuknya akan menyusul lagi dengan redaksi bahwa Panembahan Matan telah menelantarkan pekerjaannya di Kayong (di wilayah bawahannya), sehingga tidak ada alasan untuk menggerakkan operasi militer untuk menertibkan dan menciptakan perdamaian di wilayahnya.⁸⁰ Perkataan ini tentu saja merujuk pada upaya meringkus Panembahan Matan dan dimungkinkan pula membawa kasusnya dalam persidangan di muka pengadilan Hindia Belanda.

Pembicaraan dengan Komisaris tidak membuat hati Sultan tenang. Ia pun mengagendakan pertemuan dengan Residen. Ketika pertemuan itu berlangsung, Sultan menceritakan perihal semakin abainya Panembahan Matan terhadap seruan atau perintah yang diberikan Sultan. Ia meminta agar pemerintah Hindia Belanda lebih bijak dalam menentukan arah politik terhadapnya. Setelah mencermati masalah itu lebih dalam, Residen pun berkesimpulan tentang perlunya meninjau Sukadana terlebih dahulu, sebelum tindakan lebih tegas dijatuhkan. Tidak lama berselang, Residen pun berangkat ke Sukadana.

Sebenarnya, Residen tidak bisa memberikan solusi yang nyata terhadap masalah Sukadana. Ia hanya dapat mendengar namun tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan Sultan Nieuw Brussels. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan anggaran dan personel tentara yang ditugaskan di Pantai Barat Borneo. Rencana

⁸⁰ Barth, "Overzicht ...", hal. 18.

untuk mendirikan garnisun militer, sebagaimana yang sudah disepakati sejak 1831, kelihatannya juga akan dibatalkan.

Residen mengadakan pertemuan lanjutan dengan Sultan Nieuw Brussels di Ketapang pada 20 Juni 1833. Pertemuan ini seyogyanya juga harus dihadiri oleh Panembahan Matan, namun ia tidak kunjung hadir. Di hadapan Sultan, Residen mengatakan ketidakmampuannya berbuat banyak untuk menertibkan Panembahan Matan, sekaligus kabar mengenai pengurangan anggaran dan personel seperti di atas. Residen justru memberikan saran agar Sultan dapat mengatur pengeluaran kerajaannya. Dana yang dapat disimpan, nantinya akan dialokasikan untuk pengadaan personel militer berikut gaji rutin mereka. Mereka juga akan dipersenjatai dan pengadaan senjata itu berasal dari dana kesultanan. Oleh sebab kebutuhan pengadaan pengamanan meningkat, maka Sultan disarankan untuk menarik pajak atau jika sudah, menaikkan pajak bagi sejumlah barang yang ada di wilayahnya, seperti opium. Pajak juga bisa dikenakan untuk usaha peminjaman uang dan rumah judi.⁸¹

Residen memutuskan untuk menemui Panembahan Matan. Ia disertai oleh Pangeran Kubu dan Pangeran dari Pontianak. Mereka meminta kepada Panembahan Matan untuk memperhatikan perintah dan petunjuk Sultan Nieuw Brussels. Bagaimanapun, Matan adalah bagian dari kesultanan itu, dan lazimnya wilayah bawahan, harus menghormati wibawa dan mentaati perintah atasannya. Panembahan Matan, untuk kesekian kalinya, menyatakan bahwa ia tidak ingin menyatakan bakti dan tunduknya pada Sultan Nieuw Brussels. Ia meyakinkan bahwa Matan tidak mempunyai masalah dengan Pemerintah Hindia Belanda, dan tetap menyatakan baktinya kepada pemimpin Eropa itu. Kunjungan Residen berakhir dengan kegagalan. Hal ini semakin membuat pemimpin Belanda itu kehabisan akal.⁸²

Setelah beberapa waktu Residen berpikir, akhirnya ia pun memutuskan bertindak lebih tegas pada Panembahan Matan. Ia meminta Panembahan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Alasan pengunduran ini adalah bahwa dirinya tidak lagi mempunyai niat baik untuk mematuhi Sultan Nieuw Brussels yang merupakan representasi Pemerintah Hindia Belanda di Sukadana. Pengunduran diri dianggap lebih terhormat dilakukan, terutama untuk menjaga wibawanya di mata masyarakat. Panembahan mengatakan bahwa masalah pergantian jabatan penguasa Matan tidak terlalu menjadi persoalan serius baginya. Ia akan dengan rela melepaskan jabatan itu. Panembahan mengatakan bahwa permintaan itu adalah suatu ketidakadilan bagi seorang penguasa lokal yang telah mengabdikan kepada kepentingan kolonial selama 14 tahun lamanya.

Pemerintahan Eropa bertanggung jawab atas dua tugas utama yakni keamanan dan ekonomi. Biasanya, ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Awalnya,

⁸¹ Barth, "Overzicht ...", hal. 18 – 19.

⁸² Barth, "Overzicht ...", hal. 19 – 20.

di kawasan Sukadana, pemerintah Hindia Belanda melakukan pengawasan secara tidak langsung, yakni melalui Panembahan Nieuw Brussels, namun karena kedudukannya dianggap tidak kuat untuk menekan gelombang protes dari para bangsawan lokal, seperti dari Matan, maka perwakilan Hindia Belanda pun ditetapkan di Sukadana. Diharapkan, dengan adanya perwakilan kolonial, kedamaian dan ketertiban dapat tercipta di Sukadana dan sekitarnya.⁸³

D. Kesultanan Nieuw Brussels dan Pemerintah Hindia Belanda

Dalam kesepakatan di atas, Pemerintah Hindia Belanda juga meminta pada Sultan Nieuw Brussels dan para keturunannya kelak, untuk loyal pada pemerintahan Belanda. Wilayah Sukadana, Simpang, Matan sejatinya adalah wilayah bawahan Hindia Belanda. Adapun kedudukan pengelolaannya diserahkan pada Kesultanan Nieuw Brussels. Sultan harus menjamin kepentingan dua belah pihak atas hasil pengelolaan tanah-tanah itu, yakni kepentingan untuk dirinya dan kelompoknya serta bagi pemerintah Hindia Belanda.

Oleh sebab wilayah-wilayah di atas termasuk wilayah Belanda, maka sudah tentu Pemerintah Hindia Belanda mempunyai andil dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut. Jaminan keamanan juga diberikan Pemerintah Hindia Belanda, selama para raja lokal menjalankan fungsinya sebagai raja bawahan Hindia Belanda. Adapun untuk Matan, wilayah yang sering menjadi simpul datangnya sengketa, maka akan dikelola oleh Kesultanan Nieuw Brussels. Sultan diperkenankan menunjuk kepala daerah Matan, yang setelah diangkat nantinya akan memperoleh gelar *panembahan*.

Segala bentuk aktivitas Pemerintah Hindia Belanda, termasuk di sektor ekonomi, agar dibebaskan dari biaya bea, pajak atau pungutan lain di wilayah kekuasaan Sultan Nieuw Brussels. Kepada para perwakilan Pemerintah kolonial setempat, Sultan harus menunjukkan sikap kooperatif. Ia harus bertindak layaknya seseorang yang melayani kebutuhan tuannya.⁸⁴ Dalam sudut pandang Pemerintah Hindia Belanda, permintaan-permintaan tersebut merupakan rujukan untuk menciptakan pemerintahan yang teratur. Bagaimanapun besarnya wibawa Sultan Nieuw Brussels tetap harus tunduk pada kepentingan Kompeni.

E. Masalah Matan Diambil Alih Gubernur

Dalam suatu laporan, asisten residen di Sukadana mengatakan bahwa sejak laporannya dibuat, pendapatan yang diperoleh penguasa Sukadana atas pelabuhannya cenderung menurun. Keuntungan yang didapat tidak mampu

⁸³ *Leydse Courant*, edisi 12 Agustus 1850.

⁸⁴ Barth, "Overzicht ...", hal. 17.

menembus angka 150.000 euro pertahun. Kekurangan ini didapat dengan kecilnya penghasilan Matan menyebabkan Sultan Nieuw Brussels berada dalam bayang-bayang kemiskinan, dan tidak mampu membayar hutang pada pemerintah kolonial sebesar f 30.000. Agaknya Sultan Nieuw Brussels perlu diberi tugas pengabdian untuk menutupi kekurangannya itu, salah satunya dengan menjadikannya sebagai komandan ekspedisi pengamanan di wilayah perairan yang bekerja pada pemerintah kolonial.⁸⁵

Ternyata, surat asisten residen di atas diketahui oleh para pangeran Matan. Mereka pun meresponnya dengan memberikan f 2000 sebagai upeti mereka kepada Sultan Nieuw Brussels. Uniknya, uang ini tidak langsung diberikan mereka ke Sukadana, melainkan ke kantor residen di Pontianak. Belanda menangkap hal ini sebagai bukti bahwa persetujuan Matan dengan Sukadana sulit untuk didamaikan. Di sisi lain, Sultan Nieuw Brussels semakin tidak sabar dengan respon Residen Pontianak yang dinilainya lamban. Ia pun merencanakan kepergiannya ke Batavia pada Februari tahun depan (1833) untuk bertemu dengan Gubernur Jenderal guna membicarakan masalahnya dengan Matan. Langkah ini berhasil dicegah oleh Asisten Residen.

Sementara itu, Direktur Jenderal Keuangan memberikan solusi tertulis tertanggal 21 September 1832 terkait masalah Sukadana dan Matan. Ia menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah Hindia Belanda lebih serius menangani masalah Matan. Pemerintah perlu memberikan insentif f 10.000 kepada Panembahan Nieuw Bruseels. Dana ini dapat digunakan untuk kebutuhannya dalam menjalin hubungan yang lebih intensif dengan Matan. Nasehat ini juga dikirimkan ke inspektur keuangan Pemerintah Pantai Barat Borneo, J. B. de Linge.⁸⁶ Kelihatannya, Direktur Keuangan melihat masalah Matan sebagai dalih Sultan Nieuw Brussels meminta dana kepada pemerintah Hindia Belanda.

Sultan Abdul Jalil Syah, Panembahan Nieuw Brussels meninggal pada 1849. Kendati masa pemerintahannya banyak disibukkan dengan Matan, ia dianggap Belanda berhasil memajukan perdagangan dan pelabuhan Sukadana. Tengku Besar Anom, anaknya, menggantikannya sebagai Panembahan Nieuw Brussels.⁸⁷ Di awal masa pemerintahannya, Tengku Besar Anom banyak disibukkan dengan masalah penguatan kelola pelabuhan Sukadana. Ia segera berhadapan dengan kerja-kerja meyakinkan para pedagang langganan agar tetap berdagang di Sukadana. Oleh Belanda, pekerjaan Tengku Besar Anom belum dianggap meyakinkan. Bahkan, mereka sudah mulai menemukan bibit-bibit ketidakpercayaan di kalangan para pedagang dan nakhoda kapal yang terbiasa beroperasi di Sukadana pada pemimpin yang baru tersebut.

⁸⁵ Barth, "Overzicht ...", hal. 26.

⁸⁶ Barth, "Overzicht ...", hal. 26 – 27.

⁸⁷ Barth, "Overzicht ...", hal. 42.

Mengetahui adanya perubahan ini, Belanda pun meminta agar Panembahan Nieuw Brussels menyepakati kontrak baru yang disepakati pihak kolonial. Salah satu keputusan pentingnya adalah pengakuan bahwa sebagian besar pengurusan Kerajaan Matan tidak lagi diampu oleh Kerajaan Sukadana, melainkan langsung berada di bawah kendali pemerintah Hindia Belanda. Pada 1847, Pangeran Muhammad Sabran didapuk menjadi Panembahan Matan. Pengangkatannya disebut dalam *besluit* tertanggal 11 Maret 1847.⁸⁸

Pada 1849, Raja Akil atau Sultan Abdul Jalil mangkat. Kedudukannya diganti oleh Tengku Besar Anom (memerintah 1849 – 1878). Setelah Raja Akil, oleh Belanda, gelar “Sultan” bagi Sukadana dicabut dan diganti dengan panembahan, sama dengan Matan dan Simpang.⁸⁹

Pada 1872, Panembahan Simpang meninggal dunia. Pemerintah Hindia Belanda memutuskan bahwa penguasa Hindia Belanda (*posthouder*) yang ditugaskan di Sukadana juga membawahi Simpang.⁹⁰ Pada 1888, Hindia Belanda menandatangani perjanjian kontrak dengan Sukadana, Matan dan Simpang di bidang penanggulangan kejahatan dan masalah kabel telegraf. Masalah telegraf dan sambungannya, akan diadili di mahkamah Hindia Belanda, meskipun kejadiannya terletak di dalam ketiga negeri tersebut. Pelaku yang dinyatakan bersalah akan dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang Hindia Belanda. kontrak ini ditandatangani pada 27 April 1888 di Sukadana, pada 28 April di Matan dan pada 30 April di Matan. Semuanya diratifikasi pada 17 September 1888.⁹¹

Sekitar 1880, Tengku Putra menjabat sebagai Panembahan Sukadana. Ia dikenal sebagai orang yang jujur di mata pemerintah kolonial. Selain mengandalkan pendapatan internal kerajaan, ia juga masih memperoleh bantuan dana dari pemerintah. Putra sulungnya, Tengku Andut ditunjuk sebagai pewaris tahta. Ia mempunyai sikap yang hampir sama dengan ayahnya. Putra kedua Panembahan Sukadana, yakni Tengku Siembab yang mempunyai kecerdasan yang lebih baik dibanding kakak pertamanya. Ia dikenal sebagai sosok yang suka berpetualang sehingga mempunyai banyak pengalaman, bahkan jika dibandingkan dengan ayahnya sendiri. Keluarga kerajaan mendapat dana f 400 per bulan dari pemerintah Belanda. Pangeran Ratu (gelar Tengku Putra) diberi tunjangan sebesar f 25, sedangkan Tengku Siembab dan seorang adik bungsu Panembahan, Tengku Daud, diberi masing-masing f 15.⁹²

⁸⁸ Barth, "Overzicht ...", hal. 43 – 44.

⁸⁹ <http://kerajaansimpang.blogspot.com/>, diakses pada pukul 10.30, Jumat, 30 April 2020.

⁹⁰ Barth, "Overzicht ...", hal. 55.

⁹¹ Barth, "Overzicht ...", hal. 60.

⁹² Barth, "Overzicht ...", hal. 62 – 63.

Dalam kontrak terakhir antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Kerajaan Sukadana, tepatnya dalam butir ke 14 (artikel 14) dinyatakan bahwa pihak kesultanan bertanggungjawab mengurus dan membiayai para anggota keluarga kerajaan yang tinggal di pinggir kota. Belanda menyinggung kemungkinan penguasa Sukadana untuk membantu para petani dalam mengolah sawahnya. Konsekuensinya, Panembahan Sukadana harus membantu pembiayaan bagi mereka. Suntikan dana sebesar f 15 sampai f 25 sebulan untuk para petani dinilai berat oleh pemerintahan Belanda.

Di mata Belanda, Panembahan Sukadana seperti melewati hari-harinya dengan amat santai. Ia menikmati pendapatan dari pemerintah kolonial dengan sangat nyaman. Celakanya, ia tidak memperhatikan perkembangan kerajaannya, termasuk dari segi perdagangan dan pengelolaan pelabuhan. Ia sering mengundang para pemuda sekitar rumahnya yang berumur 10 sampai 15 tahun untuk “mengaji” kepadanya. Keseharian mereka dijamin oleh Panembahan termasuk biaya pendidikannya. Sayangnya, kehidupan mereka selalu berakhir sebagai pelayan sang Panembahan, seperti menjadi pengangkut air maupun nakhoda kapal.

Pada masa pemerintahan Tengku Putra, Pemerintah Hindia Belanda melarang panembahan mengutip segala jenis pajak. Pemberian dari rakyat mungkin saja diterima Panembahan, namun sifatnya tidak rutin. Kompeni juga melarang Panembahan mengambil pendapatan dari aneka ragam penghasilan hutan. Pemerintahan kolonial juga berencana membatasi pendapatan raja dengan pelarangan mengutip pajak dari para pendatang asing (orang Arab dan orang Tionghoa) yang beraktivitas di Sukadana. Dengan segera peraturan serupa akan diberlakukan di Matan dan Simpang.

Sebenarnya, penetapan pajak hutan merupakan kebijakan yang perlu ditinjau ulang. Masyarakat Sukadana mendiami kawasan yang luas. Tidak hanya di tepi sungai namun juga di pedalaman hutan. Mereka yang tinggal di hutan menggantungkan hidup dari alam. Sudah tentu, hasil hutan menjadi kemungkinan yang mereka peroleh dengan bebas dan dalam jumlah sebanyak yang mereka mau. Biasanya, mereka juga hanya mengambil hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika pun ada yang mereka kumpulkan dan diperjualbelikan kepada pedagang perantara, jumlahnya tidak banyak. Kompeni khawatir jika mereka ditekan dengan pajak, maka sewaktu-waktu mereka dapat meninggalkan pemukimannya dan berpindah ke tempat lain.⁹³

Kompeni masih memperlakukan soal kedudukan Pulau Karimata. Pulau ini termasuk bawahan Kerajaan Sukadana, namun pengangkatan kepala daerah beserta pemberian gajinya dibebankan pada pemerintah kolonial. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Karimata merujuk pada ketentuan adat istiadat Sukadana. Terkait hal

⁹³ Barth, "Overzicht ...", hal. 63 – 64.

ini, Kompeni menekan panembahan Sukadana agar lebih lunak dalam mencermati kepentingan kolonial atas pulau ini. Bagaimanapun, Sukadana sudah berada di bawah kuasa Kompeni, dan dengan sendirinya harus memperhatikan dan melaksanakan keinginan Pemerintah Pusat.⁹⁴

Dalam artikel 3 kontrak antara Sukadana dan Hindia Belanda dijelaskan mengenai kedudukan administratif Pulau Karimata. Kompeni menghendaki agar pemerintahan di Karimata tunduk pada ketetapan pemerintah Hindia Belanda. Sukadana harus menyetujui permintaan ini. Penguasa Karimata tetap harus menghormati kedudukan penguasa Sukadana sebagai pemimpin feodal. Kewajiban penghormatan hanya diperuntukkan bagi Panembahan Sukadana, bukan pada jajaran keluarganya, seperti para pangeran atau jajaran perangkat kerajaan.

Kepala wilayah Karimata, Tengku Panglima Abdul Jalil, merupakan paman dari Panembahan Sukadana. Bagi Kompeni, ini merupakan suatu hubungan keluarga yang rumit. Seorang kemenakan memerintah pamannya. Ia masih terhitung kemenakan Raja Akil. Sebagai simbol, ia selalu membawa tongkat emas yang tersemat lambang Kerajaan Belanda. Tongkat ini diberikan pemerintah Hindia Belanda kepada penguasa Karimata sebelumnya, Tengku Jafar yang kesetiaannya demikian tinggi pada Kompeni. Di Karimata, ia memerintah di Kampung Palembang, yang terletak di tepi Sungai Palembang. Di kampung ini terdapat 60 rumah.⁹⁵

F. Gubernemen Mengelola Simpang dan Matan; Suatu Kelanjutan

1. Simpang

Simpang merupakan suatu kerajaan yang mempunyai wilayah 15 kali lebih besar dibanding Sukadana. penduduk Simpang terdiri dari sejumlah etnis, yakni Melayu, Dayak, Bugis dan Orang Dusun (mendiami sisi Barat Pulau Maja). Orang Dusun mendiami dua kampung yang bernama Mangu Jering dan Koman. Di samping itu, orang Tionghoa adalah etnis yang juga banyak ditemukan di Simpang. Mereka banyak berkiprah menggerakkan bidang ekonomi setempat. Biasanya, orang Tionghoa dapat ditemukan di sepanjang pesisir Sungai Melia, Sungai Simpang dan Sungai Kualan (Koealan). Kebanyakan dari mereka tinggal di pesisir Sungai Simpang. Dari sini, mereka menjalankan perahu mereka yang dihias menarik, bernama perahu jajak, ke pedalaman untuk memasarkan barang dagangannya.⁹⁶

Sungai Simpang adalah sungai terbesar yang membelah wilayah Simpang. Sungai ini merupakan gabungan dari dua aliran sungai dari hulu yakni Sungai Semandang

⁹⁴ Barth, "Overzicht ...", hal. 65.

⁹⁵ Barth, "Overzicht ...", hal. 65 – 66.

⁹⁶ Barth, "Overzicht ...", hal. 67 – 68.

Kiri dan Kanan kemudian menjadi Sungai Simpang. Wilayah Simpang sendiri terbentuk karena hasil belahan dua sungai yakni Sungai Sijau dan Sungai Matan. Sungai penting kedua bagi Simpang adalah Sungai Kulan. Panjang sungai ini tidak berbeda dari panjang Sungai Semandang, namun alirannya lebih kecil dan kuat. Di beberapa lokasi, aliran sungai ini berbelok tajam. Oleh sebab alirannya yang kecil, terkadang orang-orang menggunakan galah untuk menggerakkan perahunya. Benda ini digunakan agar perahu dapat terus melaju. Pohon-pohon yang rebah melintang di atas sungai, kerap menjadi gangguan yang menyulitkan bagi perahu atau kapal di sungai-sungai Simpang.

Kerajaan Simpang terbagi dalam beberapa wilayah bawahan (administratif), antara lain:

1. Kulan (Ulu dan Ilir) yang pemerintahannya dipimpin oleh Pangeran Ratu
2. Semandang Kiri dipimpin oleh Raden Jaya Kesuma (putra ketiga Panembahan Simpang)
3. Gerai Mantuk yang terletak di sisi Sungai Gerai dan Sungai Semandang Kanan dikepalai oleh Uti Rejua (Oeti Rëdjoewa) atau Pangeran Mangku Bumi, saudara laki-laki Panembahan Simpang
4. Bukang Banyur, terletak di sisi Sungai Banyur dan Sungai Semandang kanan, dipimpin oleh Pangeran Kesuma Yuda (putra kedua Panembahan Simpang)
5. Baye yang dipimpin oleh Raden Bahasan
6. Kembera yang dikepalai oleh Uti Idris atau Raden Suma
7. Koman yang diperintah oleh Gusti Umar, kemenakan perempuan Panembahan Simpang. Daerah ini dihuni oleh Orang Bukit
8. Desa Kalam, dihuni oleh orang Dayak, berada di langsung di bawah kontrol Panembahan Simpang.⁹⁷

Penduduk Melayu tinggal di hulu Sungai Simpang dan Kualan (tepatnya di Sekuwau dan Balai Bekuah). Sebagian besar orang Melayu mendirikan pemukiman di tepi Sungai Simpang, setelah lajur Sungai Semandang. Beberapa kampung di lokasi tersebut bernama Kampung Penjala, Tanjung Bundung, Rangkap, Sungai Pinang dan Batu Barat. Sebagian orang Melayu di wilayah-wilayah itu diketahui telah pindah ke kawasan Durian Sebatang, Batang Mendaup yang telah masuk dalam wilayah Kubu. Menyikapi hal itu, Panembahan Simpang bertindak cepat dengan menempatkan Raden Bakar di Durian Sebatang. Panembahan berdalih bahwa kepanjangan tanganannya itu akan melindungi para penduduk setempat yang masih menggantungkan hidup dengan mencari aneka hasil hutan.

Istana Kerajaan Simpang berada persis di pertemuan dua sungai, yakni Sungai Sijou dan Sungai Matan. Di sana, Panembahan tinggal bersama keluarganya. Istana ini

⁹⁷ Barth, "Overzicht ...", hal. 68.

dikeliling oleh sekitar 15 rumah. Menurut penuturan Barth, bangunan istana Simpang masih memelihara tradisi lama, sehingga pihak istana tidak berani untuk mengadakan renovasi. Apabila renovasi dilakukan, seperti mengganti atap, maka diyakini akan mendatangkan bencana. Kondisi istana raja, hampir sama dengan rumah-rumah rakyatnya. Dermaga tambatan di sini juga sederhana, bahkan hampir sama dengan pemukiman-pemukiman pinggir sungai lainnya. Tidak jauh dari istana terdapat balai pertemuan. Di waktu silam, asisten residen pernah berkunjung dan diterima Panembahan Simpang di balai ini. Di malam hari, balai ini akan diterangi dengan nyala lilin. Di istana ini juga masih tersimpan barang-barang peninggalan Kesultanan Matan, ketika keluarga Sultan Matan sebelumnya, hijrah dan membuat pemukiman di Simpang.⁹⁸

Di bagian Barat Pulau Maja, terletak pemukiman orang Bugis. Pembentukan kampung ini tidak bisa lepas dari kisah kedatangan Haji Mohammad Wa Kuba, seorang Bugis yang giat, dari Tanjung Saleh ke Pulau Maja. Ia bermaksud membuka kebun kopi di pulau ini. Panembahan Simpang merupakan sosok yang berjasa bagi kehidupannya, karena berkat kemurahannya ia dapat membuka kebun kopi di sana. Panembahan juga memberikan dana yang digunakan untuk biaya pembukaan kebun ini. Haji Mohammad Wa Kuba segera menyanggupi permintaan Panembahan Simpang bahwa dirinya akan menjabat sebagai kepala daerah atas nama Kerajaan Simpang di sana. Residen juga telah mengetahui hal ini, dan segera membuat kontrak yang ditandatangani pula oleh Haji Mohamad Wa Kuba.

Beberapa waktu berselang, rupanya tanaman kopi yang ditanam tidak kunjung berbuah. Ini terjadi sampai dengan wafatnya Haji Mohammad Wa Kuba. Anaknya, Haji Mohammad Nur, meneruskan estafet pemerintahan ayahnya. Ia tidak tertarik melanjutkan upaya ayahnya memelihara tanaman kopi, melainkan memilih profesi sebagai wiraswasta. Usahanya dibantu oleh beberapa orang kuli. Panembahan Simpang merestui profesi baru Haji Mohammad Nur dengan catatan ia mampu meningkatkan pengelolaan wilayah kekuasaannya atas nama Panembahan Simpang.⁹⁹ Koloni Haji Mohammad Nur ini terletak di Sungai Buaya dan Dusun Besar.

Pemerintah Hindia Belanda mempunyai kecenderungan untuk ikut serta mengurus penduduk pribumi yang mendiami kawasan pulau. Mereka juga sempat tertarik untuk mendampingi Panembahan Simpang dalam mengatur koloni Bugis Haji Mohammad Nur. Dalam satu kesempatan, Mereka pernah melayangkan usul bahwa sosok yang menjadi kepala wilayah di Barat Pulau Maja ini, diberi gelar Punggawa Setia Pahlawan. Namun oleh karena terdapat pertentangan di kalangan Dewan

⁹⁸ Barth, "Overzicht ...", hal. 69.

⁹⁹ Barth, "Overzicht ...", hal. 70.

Hindia Belanda, pemerintah mengurungkan usul tersebut. Keterangan ini terdapat dalam *Staatblad* 1888 no. 121.¹⁰⁰

Dalam catatan Belanda, terdapat sejumlah temuan pertikaian antara Panembahan Simpang dengan para kepala daerah bawahannya. Biasanya, pangkal masalah mereka adalah mengenai pembayaran pajak. Dalam beberapa kasus, masalah tidak hanya bersumber dari Panembahan Simpang, melainkan dari para perangkatnya. Dalam kasus lain, relokasi pemukiman orang Dayak sempat menimbulkan masalah tersendiri, bahkan hingga mengundang pejabat kolonial untuk mencari solusinya. Di satu sisi, hadirnya pemerintah Eropa dapat menimbulkan kesepakatan antara para pangeran Simpang dengan kepala wilayah bawahannya, namun ini tidak berlaku bagi semua kasus. Diketahui bahwa orang Dayak tidak begitu saja bersedia pindah ke tempat lain, karena mereka terikat dengan aneka situs peninggalan nenek moyang, salah satunya adalah dengan pemakaman leluhurnya. Di tempat yang baru, orang Dayak kerap meminta undang-undang yang sama dengan yang diberlakukan di pemukiman terdahulu mereka. Hal ini terlihat dalam kasus perpindahan sekelompok orang Dayak ke Matan, tepatnya ke Semandang-Dayak. Mereka meminta peraturan yang sama dengan orang Dayak yang bermukim di Kualan Ilir (Kayu Bunga).

Dalam kasus orang Dayak di Matan, mereka kerap meminta pada Pemerintah Hindia Belanda agar mereka menjadi *kawula* (penduduk) langsung diperintah penguasa Hindia Belanda. Tentu saja permintaan ini ditolak, karena mereka terikat pada administrasi pemerintahan pribumi (pesisir). Pada Juli 1893, Pemerintah Hindia Belanda meminta agar penguasa lokal Melayu (Panembahan Simpang) agar mengupayakan perhatian yang lebih terhadap kelangsungan orang Dayak yang berpindah ke tempat yang baru. Setelah adanya perbaikan manajemen pengurusan yang lebih baik, malah membuka celah baru, bagi sebagian orang Dayak yang tinggal di Matan untuk mencoba kembali ke kampung halamannya yang lama.¹⁰¹

Mengenai masalah perpindahan pemukiman orang Dayak, pernah terjadi persengketaan antara orang Dayak dengan Pangeran Simpang yang menyebabkan pertempuran di antara mereka. Diketahui, Sang Pangeran melakukan banyak tindakan yang membuat marah orang Dayak ketika memungut pajak. Pangkal perang lainnya adalah bahwa Orang Dayak yang berpindah ke Meliau dan yang berada di Saribas menginginkan agar undang-undang kerajaan yang diberlakukan bagi mereka hendaknya disamakan dengan orang Dayak yang tinggal di Kualan Ilir. Permintaan ini tidak segera diindahkan sehingga ikut mengibaskan bara permusuhan sebagian orang Dayak pada Pangeran Simpang.

Panembahan Simpang mempunyai hak kepemilikan pajak yang besar di distrik Kualan. Namun gangguan yang diterimanya di sana juga sama besarnya.

¹⁰⁰ Lebih lanjut lihat *Staatblad van Nederlandsch Indie* 1888, no. 121.

¹⁰¹ Barth, "Overzicht ...", hal. 71 – 72.

Belakangan, Orang Dayak di Saribas juga siap untuk memerangi Kesultanan Simpang. Panembahan Simpang sempat berkonsultasi dengan Residen terkait keinginannya mengusir para provokator yang telah mengibaskan bara permusuhan antara orang Dayak dan pihak istana Simpang. Ia juga mempunyai maksud untuk meminta bantuan pasukan Hindia Belanda untuk mengatasi kericuhan itu. Dengan tegas Pemerintah Hindia Belanda meminta agar Panembahan Simpang tidak terlalu jauh berpikir hingga ke langkah itu. Investigasi perlu dilakukan terlebih dahulu, dan kemungkinan menggelar ekspedisi penertiban ke lingkungan orang Dayak adalah tindakan yang gegabah.¹⁰²

Biasanya, kebijakan pengaturan tanah yang diberlakukan penguasa lokal, akan diikuti dengan masuknya pengaturan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dalam *Staatblad* 1882, disebutkan bahwa di Residensi Pantai Barat Sumatra diberlakukan kebijakan baru mengenai penggunaan tanah serta rumah hiburan yang di dalamnya terdapat komoditas opium, lengkapnya sebagai berikut:¹⁰³

Eindelijk werd, met betrekking tot een paar pachtmiddelen in de residentie Westerafdeeling van Borneo (de pacht der dobbelspelen en die der sterke dranken), eene tot dusver begane informaliteit berstelt, door afkondiging van eene verbeterde omschrijving van het pachtgebiet in overeenstemming met den feitelijken toestand (Indisch Staatsblad 1882 no. 202). Bij hetzelfde Staatsblad werd de splitsing in perceelen van de in genoemd gewest bestaande kleine pachtmiddelen aan den resident overgelaten. Naar gelang van de plantselijke gesteldheid zou de indeeling der perceelen zoodanig zijn te regelen dat benadeeling van den eenen pachter door den anderen zooveel mogelijk word voorkomen.

Artinya:

Akhirnya, berkenaan dengan beberapa sumber prasarana di Residensi Pantai Barat Borneo (khususnya mengenai permainan dadu dan roh (permainan mengundi nasib)), suatu kebijakan baru saja disosialisasikan, yakni mengenai peraturan detil pajak terhadap dua hiburan itu. Peraturan ini tertuang dalam *Staatblad* 1882 No, 202. Dalam peraturan yang sama, disinggung pula mengenai pengaturan biaya atas tanah-tanah baru yang sudah dibuka. Pembukaan pemukiman penduduk hendaknya diselaraskan dengan pengadaan lahan pertanian untuk warga. Diharapkan, antara satu petani dengan petani lainnya terjalin koordinasi agar suatu kesulitan sebesar mungkin (di bidang pertanian) dapat dipikul bersama.

¹⁰² Barth, "Overzicht ...", hal. 72.

¹⁰³ *Verslag van bestuur en staat van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao* 1883, hal. 159.

Dalam pengaturan suatu bangunan atau tanah, berkaca pada kutipan di atas, Pemerintah Hindia Belanda tetap berupaya mengutip pajak atasnya. Dengan demikian, si pengelola lahan dan pemilik bangunan, bukan hanya mempunyai tanggung jawab pada penguasa lokal, melainkan juga pada Kompeni. Namun terdapat pula informasi lain bahwa pihak Hindia Belanda tidak bertanggungjawab jika terjadi suatu permasalahan atas hasil olah tanah. Hal tersebut terlihat dalam himbauannya di atas bahwa masing-masing petani harus saling bekerjasama semaksimal mungkin dalam mengatasi masalah sebesar apapun.

Untuk urusan kemakmuran, Kesultanan Simpang masih kalah dengan Matan. Jika ingin menyaksikan salah urus administrasi yang menyebabkan kemiskinan penduduk Simpang, seseorang cukup menyeberang dari Laur ke pemukiman-pemukiman Dayak seperti di kawasan Baje dan Kembera.

Dalam penggambaran Belanda, Panembahan Simpang mempunyai perawakan tubuh yang bungkuk dengan kaki yang bengkok. Usianya menginjak 50 tahun. Ia gemar menghisap candu (opium) dan sirih. Menurutnya, candu dan sirih membuat pikirannya tenang dan jernih. Dikabarkan, pernah pejabat Hindia Belanda berkunjung ke istananya dengan membawa hadiah berupa jaket lebar berwarna putih berhiasan bordiran emas, celana katun dan sepasang sepatu. Semuanya diletakkan dalam satu tempat.¹⁰⁴

Di mata pejabat Hindia Belanda, Panembahan Matan mempunyai kepribadian yang aneh. Ia menghabiskan siang harinya dengan tidur, dan malam harinya selalu terjaga. Ia juga dikabarkan tidak pernah makan nasi. Residen Pantai Barat Borneo memberikan julukan baginya sebagai “Penguasa yang Bodoh, namun licik” (*een domme, doch geslepen rijksbestierder*). Ia mempunyai kebiasaan selalu melecehkan Pemerintah Hindia Belanda. Ia pernah menyuap pejabat kolonial, agar mereka meluluskan proposal pembenahan wilayah perbatasan antara Simpang dengan Sukadana, tepatnya di wilayah pegunungan Palongan. Sebenarnya, baik Panembahan maupun anggota keluarganya, tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang tata administrasi pemerintahan Hindia Belanda.

Di mata orang Belanda, Panembahan Simpang tidak cakap memilih para perangkat istana. Seorang bergelar Pangeran Mangkubumi, menurut penilaian Belanda, terkesan tidak cukup responsif ketika dimintai keterangan oleh Panembahan. Ini menjadi suatu keanehan, mengingat di seluruh penjuru negeri, reputasi Pangeran Mangkubumi amatlah luas. Penilaian Belanda ini patut dikritisi. Secara umum, tidak semua masalah suatu kerajaan ingin diketahui oleh pihak luar. Barangkali, dengan cara demikian, yakni seolah-olah lambat menanggapi suatu pembicaraan, ada yang disembunyikan Panembahan Simpang beserta jajarannya dari Belanda, sehingga

¹⁰⁴ Barth, "Overzicht ...", hal. 72 – 73.

mereka perlu melakukan semacam sandiwara kecil ketika rapat mereka dihadiri oleh pejabat Belanda.¹⁰⁵

Pewaris tahta Kerajaan Simpang bergelar Pangeran Ratu yang bernama asli Uti Mansur juga mempunyai kebiasaan yang sama dengan ayahnya. Ia tidak terlalu suka makan nasi. Perangainya penuh dengan kebodohan dan kebrutalan. Terkait dengan dua sematan tersebut, agaknya perlu dikritisi. Catatan Belanda sering menyebut seseorang yang tidak mau tunduk pada kepentingan Belanda dengan penilaian negatif, seperti gila, bodoh dan brutal. Besar kemungkinan, Pemerintah Hindia Belanda tidak terlalu menyukai keberadaan Panglima Ratu.

Pada 25 Oktober 1888, Panembahan Simpang turun tahta dan mempersiapkan penggantinya. Uniknya, ia tidak memilih putra sulungnya, Uti Mansur yang sudah bergelar Pangeran Ratu sebagai Panembahan Simpang selanjutnya. Ia malah memberikan tahtanya pada adik Pangeran Ratu, yakni Uti Samba yang bergelar Pangeran Kasuma Yuda. Pemilihan ini didasari oleh alasan bahwa Pangeran Ratu lebih gemar menghabiskan hidup di wilayah pedalaman, ketimbang tinggal di istana. Di samping itu, ia merupakan profil yang tidak disukai oleh pemerintah kolonial. Pangeran Kasuma Yuda adalah sosok yang diharapkan oleh pemerintah Hindia Belanda menduduki tahta Panembahan Simpang berikutnya. Momen peletakan tahta itu benar-benar menjadi pembuktian bahwa Pangeran Kasuma Yuda berdiri di depan Pangeran Ratu.¹⁰⁶

Selain Pangeran Ratu dan Pangeran Kasuma Yuda, Panembahan Simpang juga mempunyai dua anak lainnya. Anak ketiganya bernama Uti Ismail bergelar Raden Jaya Kasuma) dan anak keempatnya bernama Uti Tamjid bergelar Pangeran Anom. Putra keempat ini disertai tugas pengurusan agama. ia memang memiliki pemahaman agama yang cukup luas, sehingga ia pantas menduduki jabatan sebagai kepala agama, meskipun ia tidak mengikuti pelatihan menjadi kepala agama. Perlu diketahui, yang dimaksud sebagai pelatihan kepala agama adalah lembaga pendidikan formal yang kurikulumnya banyak mengupas masalah agama. Konstruksi lembaga pendidikan ini tentu saja mengacu pada pemahaman pemerintah Hindia Belanda, yakni suatu lembaga pendidikan yang modern dengan mengadopsi kurikulum dan model pembelajaran di Eropa. Padahal, di setiap institusi kekuasaan lokal, seperti kerajaan, sudah tentu akan mengadakan pendidikan bagi para penerus kerajaan ataupun menyekolahkan anak-anak raja ke sekolah agama tradisional seperti pesantren.

Kesimpulan penilaian Belanda atas Panembahan dan seluruh anggota keluarganya adalah mereka sama sekali tidak mengerti aturan pemerintahan reguler Hindia Belanda. ini yang menjadi salah satu pangkal ketidak berhasilan mereka menerbitkan kesejahteraan di kalangan rakyat Simpang. Diketahui, Panembahan

¹⁰⁵ Barth, "Overzicht ...", hal. 73 – 74.

¹⁰⁶ Barth, "Overzicht ...", hal. 74.

Simpang pernah meminjamkan sekitar f 183, 33 kepada beberapa orang Tionghoa di Sukadana selama beberapa bulan. Kejadian ini seyogyanya jangan terjadi, demikian hemat pemerintah Hindia Belanda. Kekurangan ini tentu saja dijadikan dalih oleh para pejabat Hindia Belanda untuk lebih dekat lagi dalam manajemen pengurusan Kerajaan Simpang.¹⁰⁷

2. Matan

Kerajaan Matan atau disebut juga dengan Kayong, dalam catatan Belanda disebut negeri yang cukup makmur. Negeri ini merupakan bagian terpenting dari Sukadana. luas wilayah Matan sekitar 450 mil. Jumlah penduduknya sekitar 30.000 jiwa.

Terdapat tiga sungai yang membelah kawasan Matan, yakni Sungai Pawan, Kendawangan dan Jelai. Sungai Pawan adalah sungai terpanjang dari ketiganya. Panjangnya sekitar 42 mil.

Pada sekitar abad XIX, P. J. P. Barth menulis laporannya, Haji Mohammad Sabran menjabat sebagai Panembahan Matan. Diceritakan bahwa serombongan pejabat Belanda pernah datang menemui Panembahan Matan. Rombongan ini menaiki kapal uap milik pemerintah yang berlabuh menuju Sukadana dan Ketapang. Diketahui bahwa rombongan ini juga telah mendapat restu dari kontrolir wilayah tersebut. Tempat pemerintahan Kerajaan Matan terletak di Kampung Ketapang di bagian Timur (tepatnya di Melia Kerta). Istana Panembahan Matan tidak jauh dari tepi Sungai Pawan. Pasukan Matan ditempatkan di satu wilayah bernama Kandang Kerbau.¹⁰⁸

Panembahan Matan merupakan sosok penguasa pribumi yang telah memahami tata penerimaan pejabat kolonial. Begitu mengetahui kapal Hindia Belanda akan datang, ia menyiapkan suatu bidar (perahu kecil), yang ditumpangi para pejabat tinggi kerajaan seperti para pangeran, punggawa, Datuk Bandar atau Kapten Melayu, untuk menyambut kedatangan para pejabat Belanda. Bidar ini diberi bendera Belanda, untuk menghormati kedatangan pejabat Hindia Belanda. Rencananya kapal uap ini juga akan melakukan inspeksi ke Kandang kerbau, namun diurungkan, karena aliran sungai ke sana terlalu dangkal.

Kapal uap yang ditumpangi tidak mungkin merapat sangat dekat ke Kampung Ketapang. Alasannya adalah karena perairan di sana terlalu dangkal. Bidar Matan, selain dimaksudkan untuk penghormatan bagi pemerintah Hindia Belanda yang dianggap sebagai tamu agung, juga merupakan transportasi air pengumpan (*feeder*) yang akan membawa rombongan pegawai Belanda ini ke tepian. Ketika air sedang surut, maka perjalanan ke istana Matan dengan menggunakan kendaraan air adalah

¹⁰⁷ Barth, "Overzicht ...", hal. 74 – 75.

¹⁰⁸ Barth, "Overzicht ...", hal. 76.

kesulitan tersendiri. Perjalanan dari pemberhentian kapal uap hingga ke istana Matan menggunakan bidar memakan waktu sekitar 3 jam.

Kampung Ketapang di penghujung abad XIX, merupakan kampung yang cukup makmur. Banyak kapal dan perahu yang tertambat di rumah-rumah keluarga Panembahan Matan. Kapal-kapal ini terbiasa melewati rute ke pedalaman atau menempuh perjalanan ke laut lepas. Dengan demikian, kapal-kapal ini digunakan untuk kepentingan bisnis yang cukup sering mengangkut barang-barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Di depan suatu rumah keluarga Panembahan terdapat tiang bendera Tiga Warna (*drie kleuren*) (bendera Belanda).

Suasana dermaga dan jalan menuju istana Matan lebih baik ketimbang Simpang. Ketika para pejabat Belanda turun mereka langsung disambut dengan hangat. Dermaga di Matan dibuat dengan kayu besi, kualitasnya lebih baik ketimbang dermaga di Simpang. Mereka langsung dipayungi oleh payung kuning. Jarak antara dermaga sampai istana Matan sekitar 70 meter, ditempuh dengan berjalan kaki. Rombongan ini dipersilahkan menuju balai pertemuan. Ketika mereka datang, para pangeran Matan menyambut mereka dengan suka cita. Para pejabat yang berwenang dan berkepentingan segera diminta menempati tempat duduk di tengah balai pertemuan. Tempat duduk di sini dipercantik dengan meja marmer berbentuk bulat. Di atasnya telah tersedia cerutu, teh, susu dengan gula yang terlalu manis. Semua itu dihidangkan untuk membuat suasana kian akrab.¹⁰⁹

Balai tempat pertemuan di atas, ternyata juga menggenapi fungsi sebagai kantor kerja Panembahan Matan. Terdapat dua ruangan di sisi balai. Ruangan pertama diperuntukkan sebagai ruang tamu, sedangkan ruangan kedua, adalah kantor panembahan beserta juru tulisnya. Di bagian belakang balai, terdapat bangunan yang lebih tinggi yang diperuntukkan bagi para wanita.

Dalam pertemuan di atas, panembahan (yang diketahui berumur 64 tahun) dan jajarannya menggunakan busana khas Eropa. Mereka semua duduk di sebelah kiri delegasi Pemerintah Hindia Belanda. Panembahan mengenakan topi hitam yang bersulam emas, mantel berbalut linen dengan kancing emas bertuliskan W. Ia juga mengenakan celana putih dan sepatu. Seragam khas Eropa ini disesuaikan dengan tingkatan dalam jabatan kerajaan.

Terdapat Seorang Pangeran Matan berusia sekitar 44 tahun. Rambutnya sudah kelihatan beruban. Ia memiliki tubuh yang pendek, namun pribadinya sangat akrab dengan orang Belanda. Di balik keriangannya, ia mempunyai gangguan pendengaran. Ia mengenakan medali emas dari Pemerintah Hindia Belanda sebagai hadiah atas loyalitasnya. Sebenarnya, jika ia mempunyai rantai emas, tentu ia akan mengenakan medali itu di leher, demikian canda para pejabat Belanda. Medali itu

¹⁰⁹ Barth, "Overzicht ...", hal. 77.

kelihatan semakin berkilauan di samping pakain pangeran yang banyak dipenuhi ornamen pangkat dan medali lainnya yang berwarna emas.¹¹⁰

Duduk di sebelah kiri Panembahan Matan adalah Gusti Hidayat gelar Pangeran Mangkurat Perdana Mantri, yang berusia 45 tahun. Pembesar kerajaan ini mempunyai tubuh yang gemuk. Ia masih terhitung sebagai kemenakan Panembahan Matan. Selain karena tubuhnya yang gemuk, pejabat Belanda dibuat tertarik dengan minuman bir yang dihidangkan di depannya. Ketika bersalaman dengan salah seorang Belanda, ia mengucap salam “morgen” atau selamat pagi. Ia sempat mengundang para pejabat Hindia Belanda ke wilayah kekuasaannya.

Di sebelah kanan para pejabat Belanda, duduk Pangeran Ratu bernama Uti Busra. Umurnya sekitar 23 tahun. Sesuai dengan kontrak politik Panembahan Matan dengan Belanda, anaknya ini kelak akan menjadi penerus tahta Matan. Sosoknya mempunyai pandangan yang sedikit kabur dan bibir yang tebal dan kelihatan selalu terbuka. Ia mempunyai kebiasaan menghisap candu. Dalam rapat-rapat penting kerajaan, biasanya ia tidak pernah hadir dengan alasan sedang bepergian, sakit, memancing atau alasan lainnya.

Beberapa pejabat kerajaan lainnya yang menyertai pertemuan pihak Matan dan Hindia Belanda adalah Uti Salihin yang bergelar Pangeran Bendahara Kasuma matan, usianya 36 tahun. Seorang adik laki-lakinya yang bernama Uti Mochsin yang bergelar Pangeran Laksamana Kesuma Nagara. Ia masih terhitung anak Panembahan dari seorang selir. Terdapat pula seorang bernama Gusti Dioska bergelar Pangeran Adipati Anom Kesuma Ningrat yang berumur sekitar 28 tahun. Ia adalah adik laki-laki Gusti Muslim yang bergelar Pangeran Surya Perbu Nata, yang berusia 35 tahun. Ia merupakan saudara laki-laki Gusti Hidayat.¹¹¹

Terdapat seorang pejabat kerajaan lain yang hadir bernama Saru Uti Zakaria (Pangeran Kesuma Jaya Matan), putra saudara tiri Panembahan Matan, Pangeran Muda Haji Ahmad Hazran. Sebelumnya, bersama dengan Pangeran Ratu, Gusti Hidayat, segenap Dewan Mantri Kerajaan, ia pernah hadir dalam upacara pemberian gelar medali Kerajaan Belanda kepada Panembahan Matan yang turut dihadiri pula oleh Residen Pantai Barat Borneo.

Panembahan Matan merupakan sosok pemimpin yang berkemauan keras. Di penghujung abad XIX, Panembahan Matan merupakan satu dari sedikit raja-raja Nusantara yang memimpin kerajaannya dalam waktu yang panjang. Citranya (sebagai pemimpin yang keras) itu terlihat sejak 1847. Ia dilantik menggantikan ayahnya, Panembahan Anom Kesuma Negara, pada 1845. Saat itu, usianya sekitar 14 tahun. Di waktu yang bersamaan, saudara tirinya, Achmad Hazran, sedang pergi ke Mekkah. Ia kembali ke Matan sekitar 1846. Melalui surat keputusan pemerintah

¹¹⁰ Barth, “Overzicht ...”, hal. 78.

¹¹¹ Barth, “Overzicht ...”, hal. 78.

Hindia Belanda tertanggal 11 Maret 1847 Nomor 3, ia pernah menjabat sebagai Panembahan Matan sementara, dengan dibantu oleh Dewan Mantri. Ditunjuk pula beberapa dewan mantri yang bekerja di bawah pimpinan Pangeran Mangkurat, saudara ipar Panembahan Matan.

Di masa awal pemerintahannya, Panembahan Matan menerima beberapa keluhan. Ia dinilai masih terlalu muda memegang tampuk pemerintahan. Beberapa program kerajaan sebelumnya, tidak dapat diteruskan dengan baik. Kerajaan Sukadana, yang sebelumnya banyak bekerjasama dengan Matan, memilih mengundurkan diri sementara dari hubungan ini, karena banyak mendapati perubahan kebijakan Matan yang dinilai merugikan. Terdapat pula suara dari bawah yang menyatakan bahwa Panembahan Matan tidak peduli dengan nasib rakyatnya.

Mengetahui posisinya sedang tidak baik, pada Februari 1856, diberitakan bahwa Panembahan Matan pernah bertandang ke Batavia. Di saat yang sama, pemerintah Hindia Belanda sedang menghadapi perlawanan yang gigih dari raja-raja di Pontianak. Beberapa raja yang tertangkap dihukum pengasingan. Malang bagi Panembahan Matan, dia didakwa berseberangan dengan kepentingan Belanda, dan dituduh melanggar pasal 6 dan 17 dari dokumen kontrak Matan – Hindia Belanda. Ia dijatuhi hukuman satu tahun pengasingan di Jawa. Berdasarkan surat dari Sekretaris Gubernur Jenderal tertanggal 4 Februari 1857 yang bersifat rahasia, kedudukannya direhabilitasi.

Setelah kembali dari Jawa, Panembahan Matan tidak lagi mendapat keluhan dari internal maupun eksternal kerajaannya. Bahkan ketika terjadi kerusuhan di Sintang pada 1864 – 1867, ia menunjukkan bukti kedekatannya pada Pemerintah Hindia Belanda, dengan cara meminta pada kepala pejuang Sintang untuk bergabung dengan Matan, yang dalam istilah lain menyerah pada Hindia Belanda.¹¹² pengalaman hidup di Jawa, sangat berkesan bagi Panembahan Matan. Ia pernah hidup serumah dengan pelukis terkenal, bernama Raden Saleh.

Panembahan Matan dikenal sebagai sosok yang religius. Ia merupakan anggota suatu ordo esoterik (tarekat) yang bernama Naqsyabandiyah. Di mata Belanda, kelompok Muslim yang ikut tarekat merupakan kaum yang selalu membawa potensi bencana, karena pandangan anti-kolonialismenya. Panembahan Matan, menurut penilaian Belanda, sebagai penganut Naqsyabandiyah, cukup mempunyai pemikiran yang terbuka. Ia sosok yang dapat diterima oleh kelompok yang tidak sepaham dengan kebijakan Hindia Belanda. Bersama mereka, Panembahan Matan kerap berdialog dan terlihat cukup dapat memahami latar belakang pemikiran kelompok penentang itu.

Pemerintah Hindia Belanda pernah melakukan suatu kesalahan fatal, yakni dengan meminggirkan hak seorang pangeran yang secara adat istiadat berhak menyandang

¹¹² Barth, "Overzicht ...", hal. 79 – 80.

sebagai panembahan Matan. Belanda justru menunjuk seseorang yang bergelar Sultan Jamaluddin sebagai Sultan Matan. Sultan ini sempat diberi medali penghormatan dari Kerajaan Belanda sebagai dedikasi dan loyalitasnya pada Kompeni. Para keturunan pangeran yang disisihkan itu menyimpan api permusuhan pada Kompeni. Terhadap mereka, panembahan Matan cukup dekat dan dalam beberapa kesempatan, bertemu untuk berdialog.¹¹³

Kendati di depan para pejabat Hindia Belanda, Panembahan Matan dan Dewan Mantrinya mempunyai sikap yang baik, itu belum membuat Kompeni yakin atas loyalitas mereka. Terdapat informasi yang menyebutkan bahwa di dalam Dewan Mantri terdapat beberapa pihak yang tidak sepaham dengan kebijakan kerajaan yang pro kolonial. Hal ini cukup dijadikan alasan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk selalu curiga dengan gerak gerak Panembahan Matan.

Dalam catatan kolonial, sejak peristiwa yang mengakibatkan pembuangannya di Jawa, Panembahan Matan tidak mempunyai riwayat anti-kolonialisme. Pemerintahannya cukup tenang dan terkendali. Mereka terlibat aktif dalam usaha membendung gerakan perlawanan. Namun itu bukan garansi untuk selamanya. Pangeran Ratu, sosok yang kelak akan didapuk sebagai Panembahan Matan berikutnya, sepertinya tidak akan dengan mudah melanjutkan ketetapan ayahnya untuk bekerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda. Kompeni sedikit menaruh harapan bahwa dirinya akan dengan segera membuka pembicaraan terkait efektivitas hubungan Matan dengan Hindia Belanda.

Gusti Hidayat merupakan sosok yang diwaspadai Pemerintah Hindia Belanda. Sosoknya sangat kuat mencengkeram Jelai, wilayah Matan yang pendapatan daerahnya cukup tinggi. Ia merupakan sosok yang juga dekat dengan Panembahan Matan, karena ia menikahi saudara perempuan Panembahan Matan. Di Kerajaan Matan ia memangku jabatan sebagai salah satu mantri. Hubungan dengan kerajaan semakin diperkuat karena putra mahkota, Pangeran Ratu, dinikahkan dengan putri Gusti Hidayat. Terdapat seorang pejabat kerajaan lain, yang berasal dari Kotawaringin, yang juga diwaspadai aktivitasnya oleh Belanda.¹¹⁴

Keberadaan kekuatan kontra-kolonial di tubuh Kerajaan Matan masih diabadikan dalam laporan tahunan Belanda 1897. Disebutkan bahwa Matan tidak banyak berperan dalam penjagaan keamanan di sekitar Sukadana. Meskipun tidak disebutkan secara lengkap tentang bagaimana penyebab abainya mereka dalam menangani masalah keamanan di seputar wilayah pantainya, setidaknya terdapat

¹¹³ Barth, "Overzicht ...", hal. 81.

¹¹⁴ Barth, "Overzicht ...", hal. 81 – 82.

semacam suasana tidak bersemangat di kalangan jajaran pembesar Matan, ketika mereka diikutsertakan dalam kerja bakti yang disponsori oleh pihak kolonial.¹¹⁵

Beberapa tindak kejahatan pernah ditemukan di kawasan Pantai Barat Sumatra. selain banyak perdagangan gelap, diketahui bahwa sudah ditemukan praktek pengadaan uang palsu di tengah penduduk Pantai Barat Sumatra. Dalam Laporan tahunan 1883, ditemukan peredaran mata uang dolar Spanyol palsu di sana. Temuan ini membuat para pejabat kolonial berang dan segera melakukan sejumlah inspeksi untuk mendeteksi bagaimana praktek ini bisa terjadi serta melakukan segenap upaya untuk membongkar mafia pemalsuan uang. Setelah peristiwa itu, belum ditemukan lagi praktek kejahatan semacam ini.¹¹⁶

¹¹⁵ *Verslag van bestuur en staat van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 1883*, hal. 22.

¹¹⁶ *Verslag van bestuur en staat van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 1883*, hal. 166

BAB IV

INSTALASI EKONOMI DAN POLITIK KOMODITAS

A. Pelabuhan Sukadana

Perdagangan di pelabuhan Sukadana telah berjalan dengan cukup baik di abad XIX. Peran dari pemerintah Hindia Belanda untuk menyambungkan Sukadana dengan pelabuhan-pelabuhan lain yang lebih besar cukup signifikan. Meskipun usaha ini tidak bisa dikatakan sebagai langkah jauh menjemput kesejahteraan bagi masyarakat setempat, dan hanya diupayakan untuk memperlebar keuntungan para pelaku usaha Belanda atau Eropa, namun setidaknya ini merupakan suatu tindakan untuk mempertautkan Sukadana dengan dunia luar. Keputusan ini penting diambil, agar penduduk Sukadana dapat menjaga kontinuitas perekonomiannya di masa mendatang.

Termaktub dalam harian *De Oostpost* edisi 11 Juni 1856, diberitakan bahwa pada 4 Juni 1856, terdapat suatu kapal layar (*een bark*) bernama *Muas Dennok* milik Haji Achmad berlayar dari Sumenep ke Sukadana.¹¹⁷

Dalam surat kabar *De Locomotief* edisi 3 Juli 1869, disebutkan bahwa pada 26 Juni 1869, sebuah sekunar bernama *Noorpak-Ketapang* berlayar yang dikemudikan oleh Kapten Ince Banlu (Intje Banloe) berlayar dari Sukadana, singgah di Cirebon, lantas ke Semarang. Diketahui bahwa kapal ini memuat 10 pikul kulit dari wilayah Sintok, Sukadana.¹¹⁸

Dalam harian *De Locomotief* edisi 8 Juli 1871, disebutkan sejumlah kapal yang pernah bertandang ke pelabuhan Kayong, Sukadana. Suatu kapal jenis sekunar bernama *Noorpak-Ketapang* milik Ince Banlu (Intje Banloe) berlayar dari Pelabuhan Semarang ke Kayong atau Sukadana. Sekunar lain milik Jelalil Mashur (Djelalin Mashoor) juga datang dari Semarang ke Pontianak lantas ke Kayong, Sukadana. Tidak dijelaskan lebih lanjut, apakah kapal-kapal ini membawa barang dagangan atau untuk kepentingan transportasi penumpang antarpulau.¹¹⁹ Kemudian, masih dalam harian ini, di edisi 17 Mei 1872, disebutkan bahwa sebuah sekunar bernama *Almiah* milik Haji Achmad berlayar dari Sukadana ke Semarang.¹²⁰ Dalam harian

¹¹⁷ *De Oostpost*, 11 Juni 1856.

¹¹⁸ *De Locomotief*, 3 Juli 1869.

¹¹⁹ *De Locomotief*, 8 Juli 1871.

¹²⁰ *De Locomotief*, 17 Mei 1872.

yang sama edisi 31 Maret 1879, sebuah perahu besar bernama *Djoeloeng* milik seorang haji dari Sukadana ke Semarang.¹²¹

Dalam harian *Bataviaatsch Nieuwsblad* edisi 1 Oktober 1892, diberitakan suatu kapal berjenis sekunar bernama *Takdir*, milik Achmad, berlayar dari Sukadana ke Batavia.¹²² Pada 29 November 1892, diberitakan bahwa sebuah sekunar bernama *Mariana* milik seorang Melayu bernama Moe'in (Moe-in) berlayar dari Batavia ke Sukadana.¹²³

Sebagai langkah optimalisasi pengelolaan pelabuhan Sukadana, Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan sejumlah peraturan terkait, salah satunya adalah pengangkatan pegawai di pelabuhan ini, sebagaimana terlihat dalam suatu surat keputusan berikut ini.¹²⁴

Batavia, den 14 den Julij 1868, No. 3

Staatblad no. 86

Gelezen de missive van den Minister van Kolonien, van 16 Mei 1868, Lt. Aaz No. 5/660;

Is goedgevonden en verstaan:

Krachtens magtiging des Konings, tegen intrekking der thans blijken Staatblad 1865, No. 48, toegestane sommen van:

f 180 'jaar voor eenen inlandschen schrijver te Soekadana

f 300 'jaar voor bureau- en lokaalbehoefden voor den controleur te Mampawah, en

f 36 's jaar voor bureau- en lokaalbehoefden voor den posthouder te Soekadana;

1. Zoowel te Mempawah, als Soekadana (Wester-afdeeling van Borneo), in dienst te stellen een inlandschen schrijvers tevens zoutverkoop-pakhuismeester, op eene maandelijksche bezoldiging van f 25 (vijf-en-twintig gulden), te wier aanzien van toepassing zal zijn het bepaalde bij de laatste alinea van artikel 3 van het besluit van 5 Januarij 1851, No. 23, (Staatblad No. 2), en

¹²¹ *De Locomotief*, 31 Maret 1879.

¹²² *Bataviaatsch Nieuwsblad*, 1 Oktober 1892.

¹²³ *Bataviaatsch Nieuwsblad*, 29 November 1892.

¹²⁴ *Java Bode*, 18 Juli 1868.

2. te bepalen, dat aan ieder der besturende ambtenaren te Mempawah en te Soekadana zal worden te goed gedaan eene som van f 10 (tien gulden) s' maands voor schrijfbehoeften.

Afschrift, Enz.

Ter ordonancie van den Gouverneur-Generaal:

De 1ste Gouvernements Sekretaris,

Van Harencarspel.

Artinya:

Batavia, 14 Juli 1868, No. 3

Lembaran Negara No. 86

Telah dibaca surat dari Menteri Koloni tertanggal 16 Mei 1868, Lt. Aaz No. 5/660;

Disetujui dan dipahami

Di bawah mandat Raja, ditetapkan pengeluaran pembiayaan berdasarkan Staatblad 1865 No. 48, antara lain:

f 180 (gulden) pertahun untuk juru catat pribumi Sukadana

f 300 pertahun untuk belanja biro kebutuhan lokal di Mempawah

f 36 perbulan untuk biro kebutuhan lokal dan penjaga pos di Sukadana

Ditetapkan pula:

1. Di Mempawah dan Sukadana (Afdeling Pantai Barat Borneo), ditetapkan mempekerjakan juru catat pribumi dan pengelola gudang garam dengan gaji sebesar f 25 perbulan. Ketentuan-ketentuan lain akan berlaku setelahnya. Penetapan ini berdasarkan pasal ke-3 dari Surat Keputusan tertanggal 5 Januari 1851 No. 23 (Staatblad No. 2), dan

2. Ditetapkan gaji bagi pejabat pemerintah di Mempawah dan Sukadana akan dibayar sebesar f 10 perbulan yang sebagian diperuntukkan bagi kebutuhan alat tulis kantor dan lain sebagainya.

Ketentuan Gubernur Jenderal

Sekretaris Gubernur

Pengelolaan pelabuhan yang terpadu membawa dampak yang baik bagi citra Sukadana. Dalam suatu pemberitaan, Sukadana menjadi salah satu tujuan yang akan disasar oleh dua ahli botani Belanda yang bernama Prof. Molengraaf dan Dr. Niewenhuys yang sedang melakukan penjelajahan di pedalaman Borneo. Keselamatan mereka berada di bawah tanggung jawab Inspektur Van Velthuysen. Rencananya, begitu Sampai di Bukit Raya, dua orang peneliti ini akan turun ke Sungai Kahayan lantas ke Banjarmasin, atau alternatif lain adalah menuju Sungai Pinoh dan naik kapal sampai Sukadana.¹²⁵

Seorang juru tulis mempunyai tugas yang penting, di antaranya adalah mencatat segala hal yang terjadi di tempatnya bertugas. Catatan seputar ekonomi dan sejarah misalnya, merupakan suatu informasi yang penting. Biasanya, dua bidang ini akan menjadi bahan kajian yang digunakan bagi para pegawai baru yang ditempatkan di suatu daerah. Berbekal catatan ini, para pegawai dapat langsung bertugas disertai dengan mengkaji wilayah tugasnya, sehingga dua hal yang berjalan beriringan ini dapat menyokong profesionalismenya. Secara umum, sistem administrasi ini dilakukan di seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk di Sukadana. Ketika J. P. J. Baarth menerbitkan laporannya tentang Sukadana di Jurnal *Bataviaatsch Genootschap*, ia banyak dibantu oleh catatan-catatan para juru tulis pribumi maupun lokal.¹²⁶

B. Menghadapi Bajak Laut

Keberadaan kapal – kapal yang lalu lalang di sekitar perairan Sukadana mengundang kedatangan sejumlah kelompok bajak laut ke sana. Mereka mengganggu aktivitas pelayaran melalui kegiatan pencurian, pembunuhan, perdagangan gelap yang dianggap merugikan kepentingan lokal dan pemerintah Hindia Belanda. Setelah diadakan semacam korespondensi antara Residen Pontianak dan pemerintah pusat di Batavia, dicanangkanlah suatu ekspedisi pembersihan bajak laut di sekitar Pantai Sukadana pada 1860.

Dalam sumber lain dikatakan pula bahwa selama bulan Mei 1860, jalur-jalur air di Kepulauan Karimata, Sukadana dan Kubu diganggu oleh peredaran kapal-kapal bajak laut. Setelah menerima laporan dari tempat-tempat itu, penguasa kolonial Sukadana menugaskan kapal penjelajah no. 49 untuk menghalau keberadaan para musuh laut tersebut. Kapal-kapal ini diketahui membuat onar di sekitar pesisir Ketapang. Panembahan Ketapang memimpin pasukan lautnya untuk menghadapi

¹²⁵ *Algemeen Handelsblad*, 30 Oktober 1894.

¹²⁶ *De Locomotief*, 2 Maret 1897.

serbuan bajak laut ini. Kawanan bajak laut tersebut melarikan diri ke Barat, ke arah Kepulauan Karimata.¹²⁷

Sebelum diadakan ekspedisi di atas, pemerintah telah mendapat informasi bahwa di perairan sekitar Sukadana, Kepulauan Airmata hingga ke wilayah Kubu, merupakan pusat peredaran kelompok-kelompok bajak laut besar maupun kecil. Informasi tersebut terkumpul di meja penguasa kolonial (*posthouder*) Sukadana. Tidak lama setelah itu, ia mengirim suatu kapal penjelajah untuk membuktikan laporan-laporan itu. Kapal penjelajah ini sejatinya baru selesai dalam tugas memadamkan perlawanan laut di Ketapang pada 15 Mei 1860.

Sebelum kapal penjelajah di atas diberangkatkan, datang informasi bahwa sebanyak delapan kelompok besar bajak laut menunjukkan diri di depan muara sungai di Ketapang. Mereka sempat dihalau oleh 15 kapal bersenjata milik penduduk setempat yang dipimpin oleh seorang Punggawa Ketapang. Pertempuran ini terus berlangsung hingga jauh ke Barat hingga menyentuh perairan Kepulauan Karimata.

Kapal jelajah yang diberangkatkan oleh *posthouder* Sukadana diberangkatkan untuk memeriksa perairan hingga mencapai Kepulauan Karimata. Setelah kembali ke Sukadana, diketahui memang benar kawasan Karimata diduduki perompak. Pemerintah segera dijatuhkan untuk menggelar ekspedisi ke sana. Pasukan kolonial terdiri dari gabungan pasukan Eropa dan prajurit lokal. Pertempuran pun tidak bisa dielakkan ketika dua kekuatan saling bertemu. Kapal-kapal perompak dikabarkan mampu mengimbangi kecepatan kapal-kapal Sukadana. Bahkan, dalam suatu keadaan, kapal-kapal Sukadana berada dalam jepitan kapal bajak laut.

Tengku Dagang, putra penguasa Karimata, dikabarkan ikut memperkuat barisan pasukan Sukadana. Bantuan ini cukup memberikan ruang gerak bagi kapal-kapal Sukadana. Di tengah pertempuran, sebanyak delapan kepala pasukan Sukadana ditangkap, dan satu kargo diambil oleh para bajak laut. Empat orang keluarga Pangeran Sukadana juga berhasil diculik bajak laut. Tengku Dagang mengalami luka di bagian lengannya. Pertempuran ini berakhir menjelang malam hari. Kubu Sukadana belum berhenti, sebuah kapal jelajah dikirim ke Kepulauan Karimata untuk memberikan informasi kewaspadaan akan adanya ancaman bajak laut. Di saat yang hampir bersamaan, penjagaan ibukota Sukadana juga diperkuat.

Pada 16 Mei 1860, Penguasa kolonial Sukadana mendapat informasi akan adanya bentrokan pasukan Sukadana dengan para bajak laut di muara Sungai Peraguan. Pasukan Sukadana mendarai sampan yang dipimpin oleh 13 kepala pasukan (perwira). Dalam pertempuran itu dua orang pasukan Sukadana terluka parah. Beberapa anggota perompak juga terluka. Pertempuran ini dimenangkan oleh bajak laut. Pasukan Sukadana dibuat lari tunggang langgang, sebagian ada yang

¹²⁷ *De Oostpost*, 28 Juni 1860.

menceburkan diri ke laut dan berenang mencapai pantai. Sampan-sampan yang tertinggal diambil oleh bajak laut.

Pada tanggal 26 September, datang suatu kapal penjelajah no. 28 yang direncanakan untuk menggantikan kapal penjelajah no. 49. Kapal penjelajah no. 49 rencananya akan ditugaskan ke Pulau Karimata. Kapal ini belum pernah bertemu dengan kapal perompak, hingga pada suatu ketika, kapal ini harus menolong beberapa penduduk Pulau Karimata yang kapalnya diserang oleh kawan bajak laut ketika mereka melakukan perjalanan dari Ketapang ke Jeli pada 6 Mei 1890 silam. Dari para korban itu diketahui bahwa para perompak mempunyai wilayah persebaran yang luas, hingga sampai ke Pulau Belitung hingga ke Pulau Serutu, suatu pulau di sebelah Barat Daya Karimata.

Seorang korban dari penculikan bajak laut di atas bernama Pa Agrus. Dari dirinya, pihak kolonial mendapat banyak informasi mengenai keganasan bajak laut perairan Sukadana. Selama di kapal bajak laut, ia merekam sejumlah pembicaraan di antara para anggota bajak laut. Diketahui bahwa bajak laut yang menculiknya mempunyai jaringan yang luas. Para anggota mereka sudah ditempatkan di Pulau Bawean (Jawa) dan di Pengattan. Diketahui, mereka juga menculik seorang orang kaya. Pa Agrus sempat ditanyai oleh salah seorang bajak laut tentang keberadaan kapal jelajah (milik Kompeni) di Sukadana. Selama di laut, para perompak menghabiskan waktu saling berlempar lelucon. Diketahui, rencana terdekat bajak laut ini adalah menuju Pulau Tambelan dan Solok. Empat kapal mereka juga diketahui sempat beredar di suatu perairan lepas pantai Sukadana.¹²⁸

C. Aneka Komoditas

1. Sarang Burung dan Garam

Terdapat sejumlah komoditas alam Sukadana yang menarik perhatian para saudagar lokal maupun internasional yang berdatangan ke Sukadana. Di abad 19, komoditas dari alam masih menjadi barang yang dianggap bernilai di pasaran internasional. Oleh sebab itu, tidak aneh jika Pemerintah Hindia Belanda tertarik untuk ikut mengamankan komoditas ini agar perdagangan gelap dapat diminimalisir. Ironisnya, perdagangan yang tidak melewati izin pemerintah Hindia Belanda, termasuk perdagangan lokal, dikategorikan sebagai perdagangan gelap dan pelakunya disebut penyelundup.

Pada 24 Juni 1833, dihelat suatu pertemuan yang dihadiri oleh Pangeran Cakra Nagara (kakak Panembahan Matan), para Mantri kerajaan Matan dan residen. Keputusan pertemuan ini adalah meminta petunjuk dari Gubernur Jenderal Hindia

¹²⁸ *Rotterdamsche Courant*, 15 Agustus 1860, hal. 1.

Belanda. Beberapa waktu kemudian, surat dari Gubernur Jenderal pun datang, dan menyebutkan beberapa keterangan, antara lain:

1. Panembahan Anom Kesuma dibebastugaskan, oleh sebab dirinya sering menyatakan penolakannya pada pemerintah lokal yang sah. Posisinya akan dipulihkan sebagai bangsawan, namun dengan predikat sebagai sosok yang gemar melakukan tindakan tidak menyenangkan. Ia akan diberikan uang pensiun sebesar f 2000 atau 30 kati sarang burung putih. Pembayaran ini dibebankan kepada Sultan dan pihak yang nantinya menjabat Panembahan Matan
2. Sultan Nieuw Brussels mempunyai wewenang atas pengaturan pemerintahan Matan. Ia tetap akan melakukan pemungutan pendapatan daerah yang belum tertanggulangi. Jabatan Panembahan Matan akan diberikan kepada Pangeran Cakra Nagara.¹²⁹

Residen akan menyiapkan semacam upara pelepasan pelantikan Panembahan Matan. Setelah itu, ia akan kembali ke Pontianak. Menanggapi pergantian kepemimpinan di Matan, sebuah artikel ditulis oleh L. M. Blok, Sersan Komandan Sipil dan Militer di Afdeeling Nieuw Brussels:

Bahoua ini Kami Tuwan Resident Tana Borneo sabla Barat „Mimbri tau segala orang-orang Islam den Kina (Tjina) den Dajak Jaing (yang) Diam de tana Brussel Mattam (Matan) dan simpan (Simpang) Jaing Kami Soeda toerongan panambaban Anom Kesoemo Negara Deri pada Kemprenta Akan (Kaprentahan) tana Mattam Krana panambaban bersala-an pada Gouvernement Neederland Tiada Mau Menikot prentahan Seri padoeka Sultan Abdul Jalil Cha Jaing Bertahatta Katojaan (Kesultanan) Dallem Negeri Brussel Mattam Dan simpan seperti de tita akan (dititahkan) Tuwan Bezaar Gouverneur Generaal Derri tana Indie Neederland, pada panambaban, Den siapa-siapa di Blakkan bari Menikot lagi prenta panambaban pigi manna Roepa orang itoe sala Den Torabaka Kapada Gouvernement Neederland, den Dapat Hoekoeman Dingen patot Kesalaan itoe, Den lagi Kami Memberi tau Jaing Diatas Kesoekaan Den permintaan Serie padoeka Sultan Brussel Mattam Dan Simpang Serta Dingen Mapakad Den segala Manteri Manteri Jaing ada Trehimpon Dingen 9) hari Inie di Katapan, Den Kami poelangkan prenta diatas tana Mattam Jain di bawa prenta Seri padoeka Sultan itoe Kapadda Tuwan pangeran Tjekro Negara Den Kami tita akan pola pada segala orang-orang Jaing ada di tana Mattam, Hendakla Menikot den Menoerot Den Membri Hormat Kapada pangerang Tjekra Negara, Kebatran den Kami Membri Engatan lagi Kapadda segala orang orang, Jaing seri padoeka Sultan Abdul Jalil Cha soeda di angkat

¹²⁹ Barth, "Overzicht ...", hal. 20.

Gouvernement Jiddi Radja di atas tanna Brussel Mattam den Den simpang, Den siapa siapa Jaing Dorakakka padda Tuwan Sultan Abdul Jalil Cba Meleinkan Dorahaka Kapada Gouvernement Neederland, Ter soerat di Katapan Kapada hari 26 Junij Taun een Duizen acht honderd Drie en Dertig (Tahun 1833).

(Tertanda)

Resident ter West Kust Borneo
w. g. Ritter.

Residen Ritter menyadari bahwa penarikan petugas militer di Sukadana tidak bisa dihentikan, meskipun ada permintaan untuk menanggukannya dari Sultan Nieuw Brussels. Pada 20 Juni 1833, surat dari pemerintah Pusat sampai ke Residen dan kemudian dibahas bersama Sultan. Isinya adalah pemberian restu dan dukungan bagi skema pembiayaan pertahanan militer di Sukadana dengan jalan mandiri. Keuntungan penjualan garam di Sukadana dapat digunakan untuk mendanai pekerjaan ini. Dari Matan dan Simpang, diperkirakan diperoleh 45 koyan, dengan keuntungan murni sekitar f 4530. Para penjaga pos militer yang dipekerjakan dapat diberi gaji sebesar f 4108.

Persoalan Matan memang tidak seharusnya didiamkan berlama-lama. Urusan ini seyogyanya memang harus diselesaikan segera, demikian ungkap Residen Ritter. Ia mengakui kesalahan langkah pemerintah kolonial yang tidak segera tanggap mengurus hal ini, sehingga menimbulkan ketegangan yang belum sepenuhnya dipulihkan. Lebih dari itu, antara dirinya dengan Komandan Militer di Pontianak juga terlibat perselisihan. Pengamanan atas Sukadana adalah prioritas, namun Residen justru tidak memberikan keputusan untuk memperkuat pertahanan kolonial di sana. Langkah ini menyinggung hati Komandan Militer di Pontianak yang merasa kedudukannya seperti tidak dibutuhkan. Setelah 1 Januari 1834, datang perintah dari Batavia, memerintahkan sejumlah petugas militer disiapkan di Sukadana.¹³⁰

Sampai dengan Maret 1834, pemerintah kolonial masih menunggu sejumlah pengaturan dan perbaikan yang dilakukan Kesultanan Nieuw Brussels atas Sukadana. Pemerintah Belanda masih menaruh kekhawatiran dengan Panembahan Matan yang baru. Mereka belum mempunyai cukup ruang untuk mengadakan diskusi secara mendalam. Residen masih mencari profil yang tepat mengisi penjaga pos Belanda di Sukadana.

Setelah beberapa lama mencari, akhirnya residen menemukan profil yang tepat dalam diri H. van Dewall. Ia pun diberi kepercayaan untuk memimpin pos Belanda

¹³⁰ Barth, "Overzicht ...", hal. 22

di Sukadana. Ia akan ditemani oleh seorang pribumi bernama Jajang Sekar yang berasal dari Cirebon. Jajang akan menjadi pengaman Van Dewall. Ia akan menerima gaji bulanan sebesar f 150. Pos ini akan diperkuat dengan lima pasukan. Biaya perawatan dan pengeluaran kecil rutin pos ditetapkan sebesar f 2900. Pada Oktober 1834, Komandan Sipil dan Militer, L. M. Blok, yang sebelumnya bersitegang dengan Residen Ritter, memutuskan mengundurkan diri. Tanggung jawab keamanan di Matan akhirnya dipegang oleh H. van Dewall.

Barth memberikan keterangan tambahan mengenai H. van Dewall. Dia adalah ketua pos pertama Belanda atau *posthouder* di Sukadana. Sebelumnya, jabatan ini bernama *gezaghebber* atau penguasa wilayah yang ditunjuk Pemerintah Hindia Belanda. Karir dari Van Dewall cukup baik selepas dari Sukadana, ia sempat diangkat menjadi Asisten Residen Kutai.¹³¹

Kepala pos biasanya bertugas sebagai pengawas urusan ekonomi dan politik di suatu wilayah bawahan Hindia Belanda. Awalnya, jabatan ini identik dengan kepala loji Belanda di suatu wilayah, terutama ketika era VOC.¹³² Loji adalah bangunan yang dibuat untuk kepentingan menghimpun barang dagangan setempat, yang akan diangkut ke Batavia. Oleh sebab jadwal kedatangan kapal-kapal VOC tidak bisa ditentukan dengan pasti, maka kebutuhan akan gudang yang luas pun menjadi keniscayaan. Belakangan, VOC justru menyalahgunakan pendirian loji ini untuk kepentingan memperkuat pertahanannya, salah satunya dengan pengadaan pasukan reguler yang bersenjata lengkap. Kebutuhan ini akan diplot jauh hari, sebelum rencana VOC untuk memecah belah (*divide et impera*) penguasa pribumi setempat, apabila mereka tidak meluluskan keinginan VOC. Dengan kata lain, fungsi loji tidak ubahnya seperti benteng.¹³³

Pangeran Cakra Nagara yang menjadi Panembahan Matan, belakangan diketahui, tidak mempunyai harapan yang bagus untuk membina hubungan dengan Sultan Nieuw Brussels. Segera setelah menjabat dan kembali ke istananya, tidak ada inisiatif darinya untuk memperbaiki hubungan Matan dengan Sultannya. Terdapat suatu laporan penguasa lokal Sukadana yang memberitakan tentang keadaan di Matan, melalui suatu surat tertanggal 24 Maret 1835, No. 50, isinya sebagai berikut:¹³⁴

De gewezen Panembahan verklaarde den civielen gezaghebber rond uit nimmer de bevelen van den Sultan van Brussel te willen gehoorzamen

¹³¹ Barth, "Overzicht ...", hal. 23.

¹³² Carmel Schrire dan Janette Deacon. "The indigenous artefacts from Oudepost I, a colonial outpost of the VOC at Saldanha Bay, Cape", dalam *The South African Archaeological Bulletin*, 1989, hal. 105-113.

¹³³ Patrick Dumon, "Amsterdam: The VOC warehouse at the Mouth of the Chao Phraya River", dalam *The Journal of the Siam Society*, Vol. 102, 2014, hal. 169-178.

¹³⁴ Barth, "Overzicht ...", hal. 23.

en zelfs bereid te zijn, bijaldien iu die zaak door den Sultan eenige vijandelijkheden in het werk wierden gesteld, geweld met geweld te weren; dat hij echter volgaarne onder de onmiddellijke bevelen van het Gouvernement wilde staan en het dus zijn verlangen was, dat zijn broeder, de Pangeran Tjakra, of hij zelve door het Gouvernement als een van den Sultan onafhankelijk hoofd van het rijk Matan werd aangesteld en dat hij alsdan een getrouw dienaar van het Gouvernement zoude worden bevonden; dat hij volstrekt geen persoonlijken haat tegen den Sultan van Brussel voedde en hem naar vermogen in alles zoude behulpzaam zijn, zelfs de helft der inkomsten van hef rijk Matan afstaan, wanneer hij denzelven niet meer als hoofd, maar als vriend en broeder mocht beschouwen en zijn eigen chutbat in de moskee mocht doen lezen ; dat hij eindelijk zijne acte van aanstelling, die hem bij zijne afzetting was aigevorderd, terug Verlangde" (Missive civiele gezaghebber dd, 24 Maart 1835 No. 50)

Maksudnya:

Sebagaimana diketahui, Panembahan Matan sebelumnya bersikap beseberangan dengan Gubernur Sipil Pontianak dan menyatakan tidak akan mematuhi perintah Sultan Nieuw Brussels. Dalam suatu kesempatan, bahkan ia pernah menggunakan cara kekerasan untuk menghukum Sultan. Namun kemarahannya ini tidak berlaku di hadapan Pemerintah Hindia Belanda, ia tetap memandang tinggi posisi Pemerintah Eropa. Pangeran Cakra, saudaranya, yang kemudian dilantik menjadi Panembahan Matan, juga memutuskan untuk independen dan tidak mau berada di bawah kuasa Sultan. Namun, ia tetap menjunjung tinggi wibawa Pemerintah Hindia Belanda. Secara pribadi, ia mengatakan tidak membenci kedudukan Sultan. Ia siap membantu kebutuhan Nieuw Brussels sesuai dengan kemampuannya. Jika diperlukan, ia siap memberikan separuh keuntungan pendapatan daerah Matan untuk Sultan. Ia meminta agar nama saudaranya (Pangeran Anom Kesuma) tetap disebut dalam khutbah (Jumat) di masjid-masjid di wilayahnya, sebagai suatu pengakuan kepemimpinannya, meskipun pada realitanya, Pangeran Cakra yang memimpin Matan.

Penyebutan nama pemimpin masyarakat atau kepala daerah dalam khutbah Jumat merupakan suatu tradisi di masjid-masjid Nusantara. Tradisi ini merupakan serapan dari tradisi serupa yang sudah mengakar di Dunia Arab. Penyebutan nama seorang khalifah atau pemimpin umat Islam, adalah pengakuan secara lisan, mengindikasikan bahwa para peserta salat Jumat yang mewakili penduduk suatu kawasan, mengakui kedudukan dan wibawa pemimpin mereka. Ini juga menjadi

simbol ketundukkan wilayah tersebut.¹³⁵ Belakangan, tradisi semacam ini juga tersebar di Nusantara. Ini merupakan bagian dari pengaruh Islam dari segi ritual mingguan yang sudah ada sejak masa kedatangan Islam awal di Sukadana, juga di wilayah Nusantara lain pada umumnya.

Pangeran Cakra melaporkan kepada penguasa sipil (*gezaghebber*) Sukadana melalui suatu surat yang bertanggal 24 Maret 1835, No. 51, isi suratnya sebagai berikut:

Van den Pangeran Tjakra rapporteerde de civiele gezaghebber, dat hij verhaalt, dat hem onmogelijk is aan den Sultan van Brussel deszelfs aandeel aan de vogelnestjes ter hand te stellen, wyl deszelfs broeder, de gewezen Panembahan, de vier dessa's, welke de meeste vogelnestjes leveren, niet wil afstaan; dat hij te vergeefs met goede woorden heeft getracht zijnen broeder tot deszelfs plicht terug te brengen, en dat hij vreest, strenge maatregelen tegen denzelven te gebruiken, als wanneer wellicht het geheele land in oproer zoude komen, hebbende ook van het bestuur (den gewezen Resident Ritter) last bekomen geen geweld in die zaak te gebruiken: dat hij zelve slechts 18 kati 's vogelnestjes jaarlijks uit de dessa Kendawangan en voorts nog eene geringe hoeveelheid rijst uit eenige andere dessa's trekt, welke inkomsten niet genoegzaam zijn om in deszelfs behoeften als hoofd van het rijk Mattam te voorzien, en dat wanneer de Adsisistent resident van Pontianak in die zaak niet spoedig hulp verleent, hij het niet langer zal kunnen volhouden en genoodzaakt zijn om zijn ontslag te verzoeken; en dat hij liever zal zien, dat het gezag over het geheele rijk weder aan zijn broeder wordt opgedragen, dan dat hij nog langer in die omstandigheden moet verkeeren; dat het ook zijn wensch is, even als die van den gewezen Panembahan en van de geheele bevolking, dat het rijk Mattam, geheel onafhankelijk van den Sultan van Brussel, alleen onder de onmiddellijke bevelen van het Gouvernement worde gesteld" (missive als boven dd. 24 Maart 1835 No. 51).

Maksudnya:

Pangeran Cakra melaporkan kepada penguasa sipil (Hindia Belanda) bahwa ia tidak mungkin menyerahkan (komoditas) sarang burung kepada Sultan Nieuw Brussels, dikarenakan saudaranya, Pangeran Anom Kesuma (Panembahan Matan sebelumnya), mempunyai kuasa di empat desa penghasil sarang burung itu. Ia tidak mau memberikan sarang burung kepada Panembahan Matan. Dirinya sudah bicara dengan baik dan halus kepada saudaranya untuk memberikan sarang burung itu, namun ia tetap enggan. Bahkan, ia sudah mengingatkan,

¹³⁵ Muhammad Muavia Khan dan Muhammad Imran, "Islam and Good Governance (An Analytical Study)", dalam *Al-Qalam*, Vol. 24, No. 2, 2019, hal. 31-42.

perilakunya itu dapat mengundang kemarahan Residen Ritter. Pemerintah Hindia Belanda dapat berlaku keras padanya. Langkanya pasokan sarang burung pernah diungkapkan residen. Sang Residen hanya mendapatkan 18 kati burung walet dari Desa Kendawangan dengan sedikit beras dari desa-desa lainnya. Pangeran Cakra mengungkapkan bahwa sebenarnya dirinya tidak layak untuk menduduki jabatan Panembahan Matan. Jabatan ini sangat merisaukan kehidupannya. Penduduk Matan berpikiran sama dengan Panembahan Matan terdahulu, bahwa mereka bukan bagian dari Nieuw Brussels.

Dari petikan surat di atas, diperoleh pemahaman bahwa kendati sudah mengundurkan diri sebagai Panembahan Matan, Pangeran Anom Kesuma, tetap dicintai rakyatnya. Ia mempunyai wewenang atas sejumlah desa yang masyarakatnya berprofesi sebagai pencari sarang burung. Barth tidak mengakui bahwa sebenarnya kedudukan Pemerintah Hindia Belanda dan para pengikutnya, yakni para pemimpin pribumi yang menyertainya, tidak populer di mata warga Matan. Dengan menekan alur distribusi sarang burung, membuat Nieuw Brussels dan Residen Pontianak gusar. Keberanian Pangeran Anom Kesuma didukung oleh sebenar masyarakatnya. Dari pandangan ini dapat dipahami bahwa kebijakan-kebijakan Belanda sebenarnya tidak populer di mata penduduk Matan. Hanya saja, mereka tidak langsung tersulut untuk melakukan perlawanan secara terbuka.

Dalam kasus Sukadana, kelihatannya Pemerintah Hindia Belanda, lebih memilih jalur kekeluargaan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Mereka sangat berhati-hati dalam menjalankan kebijakannya. Setidaknya, dipahami bahwa mereka hadir di hadapan para penguasa Sukadana, Matan dan Simpang yang mempunyai pandangan yang berbeda terkait dengan visi membina hubungan dengan Pemerintah Eropa. Para penguasa lokal telah menyadari bahwa kedatangan Belanda sebenarnya didorong oleh kebutuhan ekonomi, dan kepentingan politik adalah sesuatu yang menyertainya belakangan. Pangeran Anom Kesuma memainkan strategi yang cerdas untuk menciptakan hubungan yang kelu di antara para penguasa Matan, Nieuw Brussel dan Karesidenan Pontianak, hanya dengan menyetop pasokan sarang burung.

Tentu masih terlalu dini untuk menyebutkan apakah Pangeran Anom Kesuma berjuang untuk kepentingan rakyat Matan dalam menghadapi penjajah Hindia Belanda. Namun, dari strategi yang dibangunnya, sejauh ini, dapat dipahami bahwa sesungguhnya ia tidak ingin jika Hindia Belanda ikut campur dalam sengketa politik di Sukadana. Ia menyadari bahwa dirinya tidak terlalu kuat untuk menggelar siasat perang semesta untuk mengusir pasukan Hindia Belanda. Di sisi lain, ketidakompakan penguasa-penguasa lokal Pantai Barat Borneo juga ikut mengerdilkan kekuatan-kekuatan lokal, sehingga aktivitas yang muncul adalah bagaimana cara mengamankan kepentingan masing-masing wilayah dari ancaman pasukan Belanda. Tidak menutup kemungkinan, ada penguasa lokal yang memang

ingin bekerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda guna meraup keuntungan lebih. Di sisi lain, kehadiran Nieuw Brussels juga merupakan representasi Pemerintah Hindia Belanda yang membutuhkan penghormatan dan pengakuan dari wilayah bawahannya. Aneka model pemerintahan inilah yang membuat perpolitikan di Sukadana semakin menghangat dan berada dalam keadaan saling silang sengkabut.

Kepala pos perdagangan di Sukadana, nyatanya bukan hanya tanggung jawab Residen Pontianak saja yang menentukan, melainkan didiskusikan hingga ke tingkat Gubernur Jenderal. Bahkan jika diperlukan, meminta saran pula dari *Raad van Indie*. Di bawah ini adalah Surat keputusan (*besluit*) dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 17 Juni 1883 No. 7, terkait penempatan pos Belanda di Sukadana:

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch—Indie van 17
Juni 1885 no. 7.

Gelet enz.;
De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord:
Is goedgevonden en verstaan:

Met intrekking der betrekking van Posthouder te Soekadana te bepalen, dat in de Afdeeling Pontianak en Ommelanden der Residentie Wester Afdeeling van Borneo de in de Onderafdeeling Soengei-Kakap bescheiden Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur wordt geplaatst in de Onderafdeeling Soekadana, en in de Onderafdeeling Soengei-Kakap de thans ter hoofdplaats Pontianak bescheiden Aspirant-Controleur.

Afschrift enz.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch-Indië:
De Algemeene Secretaris,

PANNEKOEK

Maksudnya:

Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tertanggal 17 Juni 1885 No. 7.

Setelah ditinjau, dan seterusnya:
Setelah mendengar saran Raad van Indie
Telah disetujui dan dipahami :

Ditentukan petugas pos di Sukadana. Di Onderafdeling Sungai Kakap, Afdeling Pontianak, Residensi Pantai Barat Borneo, dengan diketahui oleh Petugas Pangreh Praja setempat, maka ditempatkan dua orang petugas pos di Sukadana dan di Sungai Kakap. Saat ini, di Kantor Pontianak ditempatkan seorang Calon Kontrolir.
Keterangan lain-lain.

Peraturan Gubernur Jenderal Hindia Belanda
Sekretaris Negara

PANNEKOEK

Dengan diputuskannya petugas pos Hindia Belanda di Sukadana dan Sungai Kakap oleh Gubernur Jenderal, mengindikasikan bahwa model administrasi pemerintahan di masa Hindia Belanda adalah terpusat. Seorang residen tidak selalu mempunyai wewenang dalam menunjuk pejabat bawahannya.¹³⁶ Dalam beberapa kasus, ia harus meminta persetujuan, dengan menceritakan latar belakang politik dan ekonomi di negeri yang dipimpinnya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Cara ini memang bukan menjadi model yang baku, karena dalam beberapa kasus, ditemukan pula wewenang residen dalam memutuskan sesuatu, tanpa meminta nasehat atau persetujuan dari Gubernur Jenderal atau dengan *Raad van Indie*. Kelihatannya, untuk kasus Sukadana, adalah pengecualian. Dari keterangan lain, didapat informasi bahwa gaji perbulan petugas pos di Sukadana adalah f 40.¹³⁷

Pangeran Anom Kesuma bertindak lebih jauh, dengan menggerakkan rakyat untuk melakukan perdagangan gelap. Pemerintah Hindia Belanda sangat keras menentang keberadaan pelaku perdagangan gelap. Itu merupakan pukulan yang telak bagi aktivitas para pedagang Hindia Belanda di suatu kawasan. Menilik pada kondisi geografis Sukadana, Simpang dan Matan yang dialiri oleh banyak cabang sungai, maka itu merupakan tempat potensial untuk melakukan aneka ragam perbuatan kriminal di mata pemerintah Hindia Belanda. Penguasa lokal Sukadana mendapatkan banyak informasi bahwa mantan Panembahan Matan bertindak sebagai pelindung para penyelundup itu.¹³⁸

Beberapa masyarakat ada yang kedapatan menyelundupkan garam. Setelah ditelisik oleh Belanda, aktivitas terlarang ini dilindungi oleh mantan penguasa Matan. Tentu

¹³⁶ Lebih lanjut lihat A.Luijmes, *Algemeene orders, reglementen en instructiën voor het Nederlandsch Oost-Indisch leger, 1831-1873. Vol. 1* (Leiden: Gualth Kolff, 1874)

¹³⁷ Daftar Gaji Bulanan dari kantor Bea Masuk dan Ekspor yang tidak dikelola oleh Penerima Bea dan Cukai. Daftar ini adalah lampiran dari Besluit Gubernur Jenderal tertanggal 3 Agustus 1883 No. 32. Lebih lanjut lihat *Staatblad van 1883 No. 173* dalam *Staatblads van Nederlandsch-Indie over het jaar 1883* (Batavia: Landsdrukkerij, 1884)

¹³⁸ Barth, "Overzicht ...", hal. 24.

saja ini amat merugikan kepentingan Sultan Nieuw Brussels dan Belanda. Garam merupakan komoditas penting penduduk pesisir yang mempunyai nilai yang tinggi bagi penduduk pedalaman. Kekalahan kuasa atas pengelolaan perdagangan ini, dapat berimbas pada putusannya hubungan dagang dengan pedalaman. Seperti rempah, garam adalah kelengkapan bumbu yang harus ada di setiap dapur orang Melayu atau orang Dayak. Para pedagang kecil akan bertindak lebih jauh ketika tidak mendapatkan komoditas ini dari para pedagang perantara yang menjadi langganan mereka, termasuk mendapatkannya dari para penyelundup.¹³⁹

Di mata pemerintahan dan masyarakat Matan, para penguasa Nieuw Brussels tidak mencerminkan kebangsawanan raja-raja Melayu di tanah Borneo bagian Barat. Mereka adalah pendatang yang dalam catatan Belanda disebut *De Siakker* (orang Siak).¹⁴⁰ Sebagaimana diketahui, dalam tata adat istiadat raja-raja Melayu, hubungan darah mempunyai arti yang penting. Ini yang menyebabkan antara satu kerajaan dan kerajaan lain, apabila mempunyai kecocokan diplomatik, akan berlanjut pada pengukuhan hubungan mereka melalui perkawinan pangeran dan putri dari dua kerajaan.¹⁴¹ Hal tersebut kelihatannya tidak tergambar dalam kerajaan Matan dan Nieuw Brussels. Selain dimungkinkan karena perbedaan pandangan politik, kelangkaan arah menuju hal tersebut, dimungkinkan karena para penguasa Sukadana saat itu adalah orang Siak, yang secara lingkungan politik jauh dengan tradisi raja-raja Matan, Simpang serta Sukadana.

Pemerintah Hindia Belanda dibuat gamang dengan keadaan antara Matan dengan Nieuw Brussels. Ketika tiba masa-masa pelaporan wilayah bawahan Hindia Belanda ke Batavia pada 12 Agustus 1835, Pemerintah Pantai Barat Borneo bersikap hati-hati dalam melaporkan kondisi di wilayahnya. Mereka harus menutupi pertikaian para penguasa lokal ini, dan melaporkan keadaan-keadaan yang baik saja.¹⁴² Langkah ini dilakukan untuk mengamankan posisi Residen beserta jajarannya dari ancaman mutasi atau pencopotan jabatan, apabila pemerintah pusat mengetahui bahwa mereka tidak mampu mengatasi masalah di negeri-negeri bawahannya. Hal semacam ini sering dijumpai di wilayah-wilayah lain di Nusantara. laporan yang bersifat ABS (Asal Bapak Senang), menjadi salah satu karakter dalam laporan-laporan pemerintah Hindia Belanda.

Sudah berkali-kali Sultan Nieuw Brussels melayangkan surat kepada residen agar menghukum internir kedua penguasa Matan. Mereka sudah bertindak kelewat batas. Sudah tidak mengindahkan penguasa mereka sendiri, dan juga kepada pemerintah Belanda. Terhadap hal ini, residen terlihat gagap dan memilih untuk menyimpan

¹³⁹ Barth, "Overzicht ...", hal. 24.

¹⁴⁰ Barth, "Overzicht ...", hal. 25.

¹⁴¹ R. O. Winstedt, "The advent of Muhammadanism in the Malay Peninsula and Archipelago", dalam *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. 77, 1917, hal. 171-175.

¹⁴² Barth, "Overzicht ...", hal. 25.

surat-surat ini dilacinya. Penguasa Nieuw Brussels bahkan menyatakan siap untuk memberikan gaji bulanan sebesar f 50.000 untuk pejabat sipil yang nantinya ditempatkan di Matan, jika memang yang menjadi ganjalan atas tuntutan itu adalah masalah pengeluaran kas negara Pemerintahan Hindia Belanda.

Dalam surat-surat yang lain, Sultan Nieuw Brussels juga melaporkan maraknya aksi penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh para penangkap ikan liar. Aktivitas mereka dianggap membahayakan perekonomian Sukadana. Untuk itu, Sultan meminta agar Belanda menyediakan pasukan khusus untuk mengamankan wilayah perairan Sukadana. Terhadap masalah inipun Sultan Nieuw Brussels langsung memberikan solusi apabila Belanda keberatan untuk meluluskannya. Belanda hanya perlu memberikan izin baginya untuk membentuk pasukan ekspedisi khusus untuk memberantas para penangkap ikan itu, dengan syarat Residensi Pontianak memberikan bantuan berupa kapal-kapal pengangkut pasukan serta kapal cepat jenis sekunar. Sultan mempunyai rencana mengangkat anaknya, Tengku Besar Anom, sebagai komandan ekspedisi ini. Sultan juga meminta sokongan dana sebesar f 10.000 untuk pembiayaan program keikutsertaan Sukadana dalam perdagangan bebas yang digelar bersama Sambas dan Pontianak.¹⁴³

Pada 11 November 1832, asisten residen mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Setelah menimbang selama beberapa hari, akhirnya ia buka suara terkait dengan kepentingan pengasingan dua penguasa Matan. Menurut asisten residen, ini merupakan keputusan yang sulit, mengingat keduanya mempunyai posisi penting di mata masyarakatnya. Pemerintah Pantai Barat Borneo telah menimbang bahwa apabila itu dilakukan, maka dapat menyebabkan gejolak sosial. Lagi pula, Matan bukan daerah yang semaju Sukadana. Pengurusan wilayahnya tidak sekompleks Sukadana. Untuk memperkuat kontrol kolonial, diperlukan penunjukkan penguasa sipil (*gezaghebber*) atas Matan yang mewakili kepentingan kolonial. Perwakilan pemerintah Hindia Belanda ini akan ditempatkan di Kayong.

Penguasa sipil di Kayong harus dilengkapi dengan detasemen militer. Hal ini diperlukan mengingat wilayah ini mempunyai hubungan yang buruk dengan penguasa-penguasa tetangganya, sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, pasukan kolonial dapat segera diterjunkan. Pasukan ini nantinya juga akan melindungi gudang garam yang akan dibangun oleh Asisten Residen. Setelah berpikir beberapa saat, asisten residen tertarik untuk mengembangkan bisnis di bidang penjualan garam ke wilayah pedalaman yakni ke kampung-kampung orang Dayak. Sebelumnya, orang Dayak memperoleh garam dari para pedagang Matan.¹⁴⁴ Di sini terlihat, keinginan pemerintah kolonial yang tergelitik untuk ikut serta dalam bisnis lokal perdagangan garam dan bukan tidak mungkin berpotensi menjadi

¹⁴³ Barth, "Overzicht ...", hal. 25.

¹⁴⁴ Barth, "Overzicht ...", hal. 26.

saingan berat para pedagang pribumi. Rencananya, asisten residen akan menjual garam dengan harga moderat dan bersaing dengan para pedagang lainnya.

Lebih jauh, asisten residen mempunyai rencana membangun pemukiman orang Dayak di pesisir. Asisten residen akan menggelar suatu proyek pembangunan pemukiman untuk dua sampai tiga ribu rumah bagi mereka. Pemukim Dayak berada di bawah wewenang langsung pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah akan memberikan jaminan keamanan bagi mereka. Sebaliknya, setiap pintu rumah orang Dayak diwajibkan membayar retribusi sebesar f 5 per tahun. Adapun biaya realisasi proyek ini didapat dari biaya pengadaan pelabuhan berikut fasilitas pendukungnya, pajak tembakau, biaya persewaan, pajak opium dan pajak rumah judi. Proyek ini tentu akan memakan dana besar, bahkan masih kurang jika mendapat bantuan dari Matan maupun dari Nieuw Brussels.¹⁴⁵

George Windsor Earl menyebutkan bahwa tidak seluruh garam yang beredar di Borneo, termasuk di Sukadana, adalah garam buatan pribumi. Beberapa produk garam ada yang didatangkan dari Jawa. Pemerintah Hindia Belanda mengatur pembelian garam di Jawa sampai dengan transportasi pengangkut komoditas ini ke Borneo. Gudang garam asal Jawa ini terdapat di Sambas dan Pontianak. Dari sini, Kompeni menjual garam ini kepada tujuh pedagang besar yang beroperasi di kota itu, sebelum diedarkan ke para pedagang pengecer. Dilaporkan, keuntungan dari penjualan garam Kompeni senantiasa meningkat setiap tahunnya.¹⁴⁶

2. Getah Perca

Getah perca menjadi salah satu komoditas unggulan di Sukadana selama berabad-abad. Di abad XIX, masih banyak penduduk yang mencari getah ini di wilayah pedalaman. Keberadaan pencari komoditas ini tentu saja didorong oleh respon atas permintaan pasar. Pemerintah Hindia Belanda juga menganggap komoditas getah perca termasuk yang dapat diandalkan untuk menggerakkan ekonomi Sukadana.

Dalam surat kabar *Algemeen Handelsblad edisi* 29 Agustus 1853, disebutkan bahwa penguasa Sukadana (*Gezaghebber*) P.C. Baron van Eck menyebutkan bahwa getah perca dapat ditemukan di pedalaman Sukadana, Matan, Simpang, Kandawangan termasuk di Kepulauan Karimata dan pulau-pulau di sekitarnya. Komoditas ini juga dapat ditemukan di hampir semua daerah di Pantai Barat Borneo. Grup pencari getah akan masuk ke wilayah pedalaman hutan untuk menemukan getah perca. Biasanya, dalam satu hari mereka dapat menemukan lima hingga enam pohon.

¹⁴⁵ Barth, "Overzicht ...", hal. 26.

¹⁴⁶ George Windsor Earl, *The Eastern Seas or Voyages and Adventures in the Indian Archipelago 1832-33-34 Comprising a Tour of the Island of Java-Visits to Borneo, the Malay Peninsula, Siam etc.* (London: Allen & Co., 1837) hal. 246.

Waktu yang tepat mencari getah perca adalah pada musim panas. Mereka dapat bertahan di hutan selama dua bulan.

Pohon perca memang sedikit misterius. Karakter pohon ini tidak mudah ditebak, kecuali oleh orang yang benar-benar terbiasa mengambil getahnya. Biasanya, pohon perca tumbuh jauh di dalam hutan yang jarang dilalui manusia. Keunikan dari pohon ini adalah getah pohon ini baru dapat diambil ketika tanaman ini berumur 20 tahun. Cara termudah untuk mengetahui pohon ini siap panen atau tidak, adalah dengan cara mengukurnya. Apabila batang pokoknya sudah sebesar orang dewasa, maka getah pohon ini siap diambil, dengan cara menebas (dengan kapak datau golok) bagian batangnya, lalu dikenakan alat penyadap. Dalamnya tebasan sekitar dua atau tiga inci. Getah pohon perca berwarna putih.

Para pemburu getah akan menunggu aliran getah sampai berhenti. Setelah berhenti, mereka akan menutupi bekas sayatan di pohon dengan tikar kajang. Mereka akan pergi mencari pohon di tempat lain. Setelah 10 atau 12 hari, mereka akan kembali ke pohon itu, dan kembali menyadap getahnya. Dalam waktu dua bulan pencarian, masing-masing para pemburu getah perca dapat memperoleh sepikul getah penuh. Biasanya, satu pikul getah diambil dari seratus pohon perca.

Di wilayah Sukadana, terdapat dua jenis pohon perca, yakni yang bergetah coklat atau bergetah putih. Keduanya sama-sama mempunyai nilai jual. Keduanya mempunyai bentuk yang hampir sama. Bentuk pohon yang kecil hingga dewasa tidak jauh berbeda, yang membedakan hanyalah ukurannya. Keduanya mempunyai bunga berwarna putih yang harum baunya. Buah pohon perca seperti buah ara yang berbentuk kerucut. Rasa buahnya enak, sehingga menimbulkan kesenangan dan kepuasan tersendiri bagi pemakannya. Bij-biji pohon perca dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan lampu minyak.

Harga dari getah dari pohon perca putih atau coklat bernilai sepadan. Namun, kebanyakan, pohon yang ditemukan adalah pohon perca putih, ketimbang yang coklat. Besar pohon perca bervariasi, ada yang sampai pelukan tiga orang dewasa. Pohon sebesar ini menimbulkan kesulitan tersendiri untuk menyadap getahnya. Di bawah pohon perca, biasanya akan tumbuh tunas-tunas baru. Namun keberadaan tunas-tunas ini amat rentan bahaya, karena menjadi makanan favorit babi hutan, rusa atau kambing hutan. Selama musim angin Timur pada 1852, didapat sekitar 200 pikul getah perca dari Matan dan Simpang, dan 20 pikul dari Nieuw Brussels (Sukadana). Harga satu pikul getah adalah f 24 sampai f 26. Di masa Angin Barat, pencarian getah diliburkan karena itu adalah musim hujan lebat.

Pemerintah Hindia Belanda melihat penebangan pohon perca yang tidak ada batasannya, dapat menyebabkan kelangkaan pohon ini di masa depan. Untuk mengantisipasi ini, Van Eck, Penguasa kolonial Nieuw Brussels sempat menginisiasi pengadaan bibit pohon perca di halaman kantornya. Ke depan, komoditas ini akan diuji coba, apakah dapat ditanam secara massal, yakni dengan

membentuk perkebunan pohon perca. Hal ini masih membutuhkan banyak percobaan.¹⁴⁷

Pada suatu kesempatan, Baron van Eck mendapat tamu seorang utusan perusahaan karet internasional. Kepada utusan itu, penguasa Sukadana itu mengatakan bahwa wilayah yang dipimpinnya mempunyai banyak hasil alam yang bernilai jual tinggi, salah satunya adalah karet. Tanaman karet banyak ditemukan hampir di seluruh wilayah Sukadana. Dalam sekali perjalanan, para pengumpul getah karet dapat menyadap lima sampai enam pohon karet. Utusan perusahaan itu kemudian memeriksa karet Sukadana itu dan berkesimpulan bahwa karet ini mempunyai kualitas yang baik. Sebenarnya, tanaman karet di Sukadana juga banyak ditemukan di Jawa, salah satunya di wilayah Banten. Getah karet banyak digunakan untuk bahan baku industri rumahan penduduk, utamanya dalam pembuatan sarung.¹⁴⁸

3. Opium

Candu atau opium merupakan salah satu komoditas perdagangan yang mempunyai langganan yang relatif tetap, bahkan bertambah. Khasiat komoditas ini yang menimbulkan suasana nikmat tersendiri bagi penggunaannya, menjadi alasan tingginya permintaan opium di negeri-negeri Borneo, tidak terkecuali di Sukadana. Opium dianggap sebagai pendongkrak semangat orang dalam beraktivitas, sehingga barang ini menjadi sesuatu yang paling dicari. Para penjual candu, mempunyai cara tersendiri dalam memasarkan barang dagangannya, sehingga para pecandu tidak kesulitan mendapatkan barang ini.

Kebanyakan, para pedagang candu berlatarbelakang etnis Tionghoa. Mereka telah tergabung dalam rantai bisnis yang mempertautkan pedagang besar dengan para pedagang kecil. Biasanya, para pedagang kecil atau pengecer ini, mempunyai perahu atau kano yang digunakan untuk memasarkan opium ke kampung-kampung pesisir atau pedalaman Borneo. Kehadiran mereka akan selalu ditunggu, karena barang yang dibawanya, seperti dianggap sebagai penyelamat bagi orang-orang yang sudah terlanjur menjadi pematik atau pengguna candu aktif.

Orang Tionghoa akan menyusuri alur sungai hingga ke wilayah hulu. Mereka akan berhenti dari satu kampung ke kampung lain untuk menjajakan opium. Sering pula ditemui, orang Tionghoa yang membawa banyak barang dagang dan salah satu yang dibawa adalah candu. Dengan demikian ia tidak hanya menjajakan satu jenis barang. Perjalanan ke pedalaman adalah suatu tantangan tersendiri. Mereka harus melewati sungai berbatu cadas atau sungai yang mempunyai jeram yang deras. Jika sudah

¹⁴⁷ *De Locomotief*, 29 Agustus 1853.

¹⁴⁸ *Rotterdamsche Courant*, 25 Oktober 1854.

bertemu dua halangan tersebut, maka sebisa mungkin, pedagang tersebut harus menjaga agar barang dagangannya tidak basah terkena air atau hanyut.¹⁴⁹

Bisnis opium mempunyai rantai yang kuat di Borneo. komoditas ini erat kaitannya dengan perilaku hidup adiktif, terkesan bermalas-malasan serta dekat dengan kegiatan hiburan kelas atas, seperti dalam acara adu ayam jago. Tidak jarang, para orang Tionghoa menjajakan opium di arena tersebut, bahkan ada di antara mereka yang ikut dalam pertandingan adu jago. Cara ini digunakan para penjual opium untuk mengakrabi langganannya, sehingga kedekatan ini dapat berbuah pada meningkatnya profit si penjual. Windsor Earl menyebutkan bahwa terdapat orang Tionghoa yang jauh-jauh datang dari Jawa untuk mengikuti kontes adu ayam.¹⁵⁰

Belakangan, para pedagang Belanda tertarik untuk berbisnis opium. Berbeda dengan orang Tionghoa yang mempunyai metode jemput bola dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan, untuk meningkatkan penjualannya, VOC menggunakan pemerintahan lokal sebagai alat untuk mendongkrak penjualannya. Sistem perdagangan yang berada di bawah pengawasan Pontianak, perlahan dikuasai oleh Belanda, sehingga, melalui aneka regulasi, para pedagang Belanda selalu mempunyai peluang untuk melebarkan peluang bisnisnya, termasuk ketika mereka baru tertarik untuk mendongkrak penjualan opium.¹⁵¹

4. Emas dan Permata

Mineral bernilai tinggi menjadi suatu kekayaan bumi yang terendap di pedalaman Kalimantan. Lokasi pertambangan beragam, ada yang terletak jauh di pedalaman hutan, atau di dekat kawasan perbukitan. Biasanya, para penambang logam mulia seperti emas atau permata adalah orang Dayak. Mereka akan mengumpulkan serpihan batuan ini sedikit demi sedikit sebelum membawanya kepada para pedagang Melayu yang berlayar jauh ke pedalaman mencari emas atau permata.

Orang Melayu jarang yang menjalani profesi sebagai penambang emas atau permata. Mereka lebih senang mengambil langsung hasil tambang tersebut, lalu menukarkannya dengan barang-barang yang dibutuhkan warga pedalaman. Mereka menjadi populasi penting yang menghubungkan perdagangan pedalaman dan pesisir. Setelah memperoleh emas atau permata dari warga Dayak, mereka akan membawa dua barang mulia ini di pengepul yang lebih besar di pesisir. Mereka dapat dijumpai di Pontianak, Sambas termasuk di Sukadana.

Dalam perjalanan membawa permata dan emas, kapal atau kano orang Melayu tidak luput dari intaian kapal bajak laut. Mereka akan menguntit kapal Melayu tersebut,

¹⁴⁹ George, *The Eastern ...*, hal. 199 – 203.

¹⁵⁰ George, *The Eastern ...*, hal. 224.

¹⁵¹ George, *The Eastern ...*, hal. 245.

sampai di tempat yang dianggap tepat, barulah kapal tersebut disergap. Oleh sebab itu, orang Melayu akan selalu memasang perhatian penuh saat berlayar di sungai atau melewati cabang-cabang sungai dekat pantai.

Berbeda dengan orang Melayu, orang Tionghoa merupakan sosok yang rajin membidik penambangan sebagai peluang usaha. Di beberapa tempat di Borneo, orang Tionghoa menjadi para penambang emas dan permata, seperti yang terlihat di Montrado, Singkawang. Aktivitas mereka luas, termasuk dapat ditemui di banyak kota maupun wilayah pesisir termasuk di Sukadana.¹⁵²

Pada 1823, VOC berhasil menanamkan kuasanya di Pontianak. Perubahan politik yang cepat segera berimplikasi pada perubahan ekonomi. Keuntungan penjualan permata dan emas yang sebelumnya didulang Kerajaan, berbalik ke tangan VOC. menurut Windsor Earl, Sultan Pontianak bukan tanpa untung. VOC membeli monopoli perdagangan permata pada Sultan dengan harga 50.000 dollar. Para penambang yang berhasil mendapatkan emas 24 karat, maka otomatis emas itu menjadi milik mereka sepenuhnya. Namun, mereka diwajibkan menjual komoditas itu kepada VOC seharga 20 % di bawah harga pasar.

Keuntungan bagi para pedagang Belanda sangat besar. Dalam kurun 2 tahun, mereka dapat mendulang keuntungan berlipat hingga 50 %. Kendati besar, dalam tahun – tahun berikutnya jumlah emas dan permata semakin menurun. Ini disebabkan karena semakin turunnya minat para penambang dan banyaknya para penambang yang tidak mau menjual hasil tambang mereka.

Jumlah pasokan emas yang turun dari wilayah Sukadana dan lainnya, membuat VOC mencari upaya lain untuk menyedap keuntungan dari emas. Mereka mulai melirik untuk menguasai Singkawang, wilayah pemukiman Tionghoa, yang kala itu sudah dikenal sebagai wilayah pertambangan emas. Belanda berpikir bahwa dengan menguasai wilayah ini, maka tersumbatnya keuntungan dari emas Borneo dapat segera terbuka kembali.¹⁵³ Niat inilah yang kemudian membesar hingga menyulut pertikaian antara Belanda melawan Republik Lanfang (kekuatan politik Tionghoa di Singkawang).

D. Islamisasi

Masyarakat Melayu dari berbagai puak di Kalimantan, termasuk di Kayong Utara mempunyai ekspresi keislaman yang kuat.¹⁵⁴ mereka merupakan penganut Islam yang cukup taat, dibuktikan dengan adanya perhatian yang tinggi di kalangan

¹⁵² George, *The Eastern ...*, hal. 241.

¹⁵³ George, *The Eastern ...*, hal. 243 – 244.

¹⁵⁴ Victor T. King, "Ethnicity in Borneo: an anthropological problem", dalam *Asian Journal of Social Science*, Vol. 10, No. 1, 1982, hal. 23-43.

bangsawan istana untuk membangun tempat peribadatan dan pendidikan Islam. Biasanya, masjid atau tempat ibadah yang berukuran kecil, juga dapat digunakan sebagai tempat pengajian bagi kaum bapak, ibu serta anak – anak. Dengan demikian, tempat ibadah bukanlah suatu bangunan yang sepi, melainkan disemarakkan dengan aneka kegiatan yang menunjang pemahaman masyarakat tentang Islam.

Bangunan masjid di Sukadana masa abad XIX, tidak mengalami banyak perubahan dari masa sebelumnya. Bahan dasar pembangunan masjid masih berbahan kayu keras, yang tahan terhadap serangan aneka serangga pemakan kayu. Penggunaan paku masih belum banyak digunakan. Setiap potongan kayu diukur secara presisi agar bisa disambung dengan potongan lainnya. Terus demikian, hingga membentuk suatu bangunan yang kokoh dan nyaman digunakan untuk beribadah dan berkegiatan lainnya.

Ventilasi di masjid dibangun sedemikian rupa sehingga hawa dari luar leluasa masuk ke dalam masjid. Bangunan atap masjid yang tinggi, memungkinkan datang-perginya angin sehingga ruangan di dalam masjid terasa sejuk. Penggunaan bahan dari alam agaknya ikut menyumbang fungsi ini, sehingga aura yang ditampilkan masjid – masjid di Sukadana lebih alami dan menyatu dengan kondisi lingkungan sekitar. Ujian sebenarnya, akan datang ketika pelaksanaan salat Jumat berlangsung, yakni ketika jama'ah yang datang membludak. Di sinilah ujian akan ventilasi udara berlangsung, apakah tingginya atap masjid mampu meredam hawa pengap dan panas yang ditimbulkan dari kerumunan manusia, atau tidak. Namun, biasanya, ini sudah diperhitungkan dengan baik sehingga masjid benar-benar dibangun dengan menjanjikan kesejukan bagi orang yang berkegiatan di dalamnya.¹⁵⁵

Islamisasi di pedalaman berlangsung secara gradual dan tertatih-tatih. Pihak istana Sukadana, Matan dan Simpang belum mempunyai agenda dakwah yang terstruktur di kawasan pedalaman. Banyak di antara puak bangsa dayak yang masih memegang teguh kepercayaan animistik. Menjelang abad XX, para misionaris Eropa, dengan perbekalan yang cukup, banyak menjelajahi kawasan kampung – kampung dayak dan melakukan kristenisasi di pedalaman. Ini menjadi tonggak keberhasilan misi di pedalaman sehingga pada masa-masa setelahnya, banyak di kalangan orang dayak yang menjadi nasrani.

Memang tidak semua perkampungan dayak yang menjadi kristen. Beberapa puak Dayak yang berhubungan erat dengan kerajaan – kerajaan di Sukadana, bahkan terjadi kawin mawin di antara keluarga kerajaan dengan para anak kepala suku Dayak, perlahan menjadi Muslim. Sayang sekali, penelitian tentang geliat islamisasi di Sukadana harus berakhir dengan telaah yang sangat sedikit, dikarenakan peneliti

¹⁵⁵ Harlina Md Sharif dan Hazman Hazumi, "Reconstruction of The Earliest Mosque in Malaysia Using Virtual Reality Technique", dalam *Archives & Museum Informatics*, Vol. 2, 2004..

tidak sempat terjun ke lapangan serta mengumpulkan sumber literatur lebih lanjut, dikarenakan pandemi Covid-19.

E. Perdagangan dan Anti-kolonialisme

Perniagaan yang tumbuh di bandar Sukadana, membawa pada pusaran konflik di antara kepala daerah lokal yang juga melibatkan kekuatan kolonial. Masing-masing pihak ingin menagguk keuntungan berlebih dari perdagangan, namun dengan tidak menyalahi keberadaan pemerintah Hindia Belanda. Di abad XIX, keberadaan pemerintahan Eropa telah meredam gejolak perlawanan rakyat, sehingga para kepala negeri setempat menyatakan sikap bekerjasama dengan Belanda, hampir di segala bidang sosial.

Matan merupakan salah satu kerajaan yang terlibat dalam hubungan yang rumit dengan pemerintah kolonial. Kendati secara definitif ia mengakui Belanda berkuasa atas negerinya, namun panembahan Matan memelihara semangat anti-kolonialisme yang dikibar – kibakannya di seluruh lingkungan istana. Pernyataan bahwa Matan tidak bersedia berada di bawah kendali Nieuw Brussels, mengindikasikan bahwa kerajaan ini tidak sepenuhnya sepakat dengan ketetapan Belanda. Ini tentu saja menjadi sesuatu yang mengundang keraguan di benak pemerintah Hindia Belanda akan loyalitas panembahan Matan.

Meskipun Matan tidak sedikit melakukan perlawanan terbuka kepada pemerintah Hindia Belanda, tidak bisa digeneralisir bahwa pemerintah Hindia Belanda berkuasa penuh atas tanah Kayong dan sekitarnya. Perlu diingat, wilayah Sukadana merupakan tanah yang dibelah oleh banyak sungai, sehingga antara satu wilayah pemukiman manusia dengan pemukiman lainnya, saling terpisah – pisah. Ini menyebabkan pendataan serta kontrol koordinasi antarlini pemerintah terbawah hingga teratas mengalami hambatan.

Meskipun para raja lokal telah mengakui kekuasaan Belanda, namun pihak kolonial tidak bisa memastikan sejauh mana ketundukkan para raja bawahan itu kepadanya. Adanya anggapan bahwa Matan menyokong perlawanan para bajak laut atau nelayan yang mengganggu kepentingan perdagangan Sukadana di perairan seputar Sukadana dan Karimata, menandakan bahwa Belanda gagal mendeteksi segala kemungkinan perlawanan di Sukadana.

Konflik politik, sebisa mungkin, mampu diredam oleh Hindia Belanda. Kendati sengkarut Nieuw Brussels dan Matan belum kunjung selesai diputuskan, namun pemerintah Hindia Belanda tetap berupaya keras untuk menjaga dan mengembangkan perniagaan di Sukadana. Mereka telah terlanjur jatuh hati pada pelabuhan ini, sehingga muncul anggapan bahwa sesungguhnya Belanda ingin

mendirikan instalasi perniagaan yang kuat di Sukadana, dengan disokong oleh para raja lokal.

Ungkapan anti-kolonial yang ditunjukkan Matan menemukan relevansinya dengan pemahaman mutakhir anti-kolonialisme dari Benita Parry. Ia menyebutkan bahwa ekspresi anti-kolonialisme memang tidak bisa disederhanakan pada kemungkinan terjadinya perang antara pihak terjajah dengan penjajah. Ingatan dan pengalaman akan penderitaan dan kondisi sulit akibat kolonialisme, yang diamini oleh masyarakat terjajah sebagai bagian dari rantai panjang kolonialisme, juga merupakan paradigma dasar dari anti-kolonialisme. Terkadang, oleh karena berbagai alasan dan keadaan, masyarakat terjajah tidak mampu melawan. Mereka memilih untuk merawatnya, lantas mewariskannya pada generasi berikutnya, sembaru berharap bahwa suatu ketika akan muncul generasi dari rahim mereka yang memperjuangkan kebebasan rakyatnya.¹⁵⁶

Keberadaan kapal – kapal dagang yang hilir mudik di pelabuhan Sukadana, setidaknya menjadi penanda bahwa pelabuhan ini memang hidup dan menghidupi warga lokal, serta para saudagar pendatang. Pemerintah Hindia Belanda membangun sejumlah fasilitas penting yang menunjang jalannya kegiatan ekonomi di sini, seperti pergudangan dan pasar. Pos kedudukan Hindia Belanda dibangun tidak jauh dari pelabuhan dan pasar, agar kontrol kolonial dapat berjalan dengan baik.

Van Leur menyebutkan bahwa pelabuhan, pergudangan, kedai, pasar bahkan iring – iringan gerobak pedati, merupakan elemen-elemen perdagangan yang harus dibicarakan dalam sejarah ekonomi. Suatu penjelasan yang mikro, kendati terkesan terlalu rigid, merupakan beberapa pembuktian dari adanya aktivitas perekonomian di suatu daerah. Keberadaan aneka instalasi ekonomi tersebut mendorong lancarnya perpindahan arus barang dari dan ke pedalaman serta sebaliknya.¹⁵⁷

Para pedagang Tionghoa bertindak sebagai penyalur aneka barang dagang dari pesisir, yakni di pasar sekitar Sukadana, ke kampung – kampung Melayu serta Dayak di pedalaman. Ini menandakan bahwa ketersediaan alat transportasi ikut menyukseskan pemerataan konsumsi di wilayah – wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sebagai wilayah yang mempunyai banyak sungai, tentu saja alat transportasi air berupa perahu besar serta kecil (seperti kano) sangat dibutuhkan.

¹⁵⁶ Benita Parry, “Resistancy Theory / Theorising Resistance or Two Cheers for Nativism” dalam Francis Barker dkk, *Colonial Discourse / Postcolonial Theory* (Manchester: Manchester University Press, 1994) hal. 172 – 173.

¹⁵⁷ J. C. Van Leur, *Indonesian Trade and Society; Essays in Asian Social and Economic History* (USA: Foris Publication, 1983) hal. 30 – 32.

BAB V

KESIMPULAN

Wabah pandemi Covid-19 yang membekap kehidupan sosial di Indonesia sejak permulaan tahun 2020, menjadi batu sandungan besar bagi perkembangan penelitian mengenai kerajaan – kerajaan di Sukadana pada abad 19 berikut aktivitasnya di bidang anti-kolonialisme, perdagangan dan islamisasi. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dicanangkan pemerintah pusat dan daerah, membuat laju penelitian ini tersendat – sendat lalu terhenti, dan apabila dapat berjalan kembali, tidak dalam skema dan acuan yang baik. Ini tentu merisaukan peneliti, dikarenakan ada bayangan bahwa penelitian ini akan dangkal tanpa adanya sumber penelitian lapangan.

Tidak bisa dipungkiri, telaah mengenai tema – tema kerajaan serta aktivitas masyarakat Borneo di masa silam amat sedikit. Penulisan sejarah tentang Borneo secara umum, belum bisa menandingi banyaknya historiografi tentang Jawa atawa Sumatra. Kelangkaan ini menjadi tantangan penulis untuk menguak lebih lanjut peta besar kesejarahan di Kalimantan, khususnya tentang Sukadana. Meskipun penelitian ini belum bisa dikatakan sempurna, namun peneliti mempunyai harapan baik bahwa semoga penelitian ini dapat menambah literatur sejarah mengenai sejarah Sukadana atau Kalimantan pada umumnya.

Sukadana merupakan pelabuhan – kerajaan yang mempunyai aktivitas perniagaan cukup tinggi di abad XIX. Sayang sekali, peneliti tidak banyak mendapat arsip berbahasa Belanda sezaman misalnya dari *Departement van Marine* atau *Departement van Handelschap* atau dari *Koloniaal Verslag* serta sumber arsip Belanda lainnya yang mengabarkan tentang ini. Peneliti justru mendapat keterangan mengenai aktivitas perniagaan di Sukadana dari surat kabar sezaman seperti dari surat kabar *Locomotief* dan lain sebagainya. Dari beberapa surat kabar yang didapat, dilaporkan bahwa sudah ada pelayaran yang reguler dari dan ke Sukadana. Kapal-kapal yang beroperasi di pelabuhan ini melakukan pelayaran lintas pulau, seperti ke Semarang, Surabaya, dan sebaliknya.

Sukadana mempunyai sejumlah komoditas unggulan yang bernilai tinggi di pasaran regional juga internasional. Garam menjadi komoditas lokal yang banyak diminati oleh penduduk pedalaman, utamanya puak kaum Dayak. Beberapa komoditas lain seperti sarang burung walet juga mempunyai harga yang cukup stabil di pasaran, sehingga menjadi salah satu komoditas eksklusif yang ditawarkan negeri ini. Komoditas lain seperti getah perca juga tidak bisa dikesampingkan. Pemerintah

Hindia Belanda yang melanjutkan tugas VOC selalu berkeinginan untuk mendapatkan monopoli atas barang-barang perdagangan ini.

Pemerintah Hindia Belanda menjadi sosok yang menengahi segala perkara politik yang ada di Sukadana. Kerajaan – kerajaan lokal seperti Nieuw Brussels (dahulu kerajaan Sukadana), Simpang dan Matan, tidak bisa lepas dari perhatian Belanda. Secara defintif, ketiga kerajaan ini mengakui kekuasaan Belanda atas negerinya, ditunjukkan dengan pengibaran bendera triwarna di istana mereka. Namun, pengakuan ini berdiri di atas daun talas yang labil. Matan menjadi wilayah yang diam – diam banyak membangkang terhadap Sultan Nieuw Brussels, kerajaan satelit bentukan Hindia Belanda, setelah dikuasainya pelabuhan Sukadana.

Belanda menetapkan bahwa Panembahan Simpang dan Matan harus tunduk di bawah kuasa Sultan Nieuw Brussels. keduanya mengiyakan, namun dalam perjalanannya, Matan banyak melakukan tindakan – tindakan yang tidak meyebangkan Sultan Abdul Jalil, penguasa Nieuw Brussels. Matan pernah menahan upetinya pada Nieuw Brussels sehingga membuat rajanya gusar. Ketika Panembahan Matan dipanggil secara resmi untuk menghadap Sultan Nieuw Brussels, ia selalu tidak hadir. Ini dianggap sebagai suatu pembangkangan negara bawahan. Masalah ini diadakan oleh Sultan Abdul Jalil hingga ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia.

Panembahan Matan berkeyakinan bahwa dirinya mengakui kekuasaan Belanda atas negerinya, namun tidak atas status yang sama bagi Nieuw Brussels. Ini adalah sesuatu yang aneh. Pemerintah Hindia Belanda memang menganggap Matan sebagai musuh dalam selimut. Mereka dituduh mendalangi perompakan yang terjadi di sekitar perairan Karimata dan Sukadana yang mengganggu kapal-kapal yang akan ke Sukadana atau sebaliknya.

Islamisasi di pedalaman Sukadana, yakni ke perkampungan puak-puak suku Dayak di abad XIX, agaknya berlangsung dengan lambat. Tiga kekuatan politik di pesisir belum mempunyai agenda yang terstruktur untuk melebarkan dakwah Islam di pedalaman. Kelemahan ini, agaknya menjadi pintu masuk hadirnya kegiatan misi yang marak berdatangan ke pedalaman pada abad XX. Ini merupakan suatu hipotesis yang rapuh, mengingat penulis belum melakukan tinjauan lapangan lebih lanjut akibat adanya PSBB dan darurat pandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

Arsip Kolonial

Staatblad van Nederlandsch Indie 1888.

Verslag van bestuur en staat van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 1883.

Surat Kabar

Leydse Courant, edisi 12 Agustus 1850.

De Locomotief, 29 Agustus 1853.

Rotterdamsche Courant, 25 Oktober 1854.

De Oostpost, 11 Juni 1856.

De Oostpost, 28 Juni 1860.

Rotterdamsche Courant, 15 Agustus 1860.

Java Bode, 18 Juli 1868.

De Locomotief, 3 Juli 1869.

De Locomotief, 8 Juli 1871.

De Locomotief, 17 Mei 1872.

De Locomotief, 31 Maret 1879.

Bataviaatsch Nieuwsblad, 1 Oktober 1892.

Bataviaatsch Nieuwsblad, 29 November 1892.

Algemeen Handelsblad, 30 Oktober 1894

De Locomotief, 2 Maret 1897.

Buku

Alqadrie, Syarif Ibrahim. *Kesultanan Pontianak di Kalimantan Barat: Dinasti dan Pengaruhnya di Nusantara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) RI kerjasama dengan DP3M dan UNTAN, 1979.

Barker, Francis dkk. *Colonial Discourse / Postcolonial Theory*, Manchester: Manchester University Press, 1994.

Bochari, M. Sanggupri. *Sejarah kerajaan tradisional Cirebon*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001.

Darmadi, Yusri dan Ika Rahmatika Chalimi. "*Nieuw Brussel*" di Kalimantan: *Peran Strategis Sukadana pada Abad ke-19*, Yogyakarta: Kepel Press, 2017.

De Jonge, J. K. J. *De Opkomst van Nederlansch Gezag in Oost – Indie (1595 – 1610)*, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1865.

Earl, George Windsor. *The Eastern Seas or Voyages and Adventures in the Indian Archipelago 1832-33-34 Comprising a Tour of the Island of Java-Visits to Borneo, the Malay Peninsula, Siam etc.*, London: Allen & Co., 1837.

- Gouda, Frances. *Dutch culture overseas: Colonial practice in the Netherlands Indies, 1900-1942*, London: Equinox Publishing, 2008.
- Has, M. Dardi D. *Sejarah Kerajaan Tanjungpura*, Ketapang: Yayasan Sultan Zainuddin I dan Smart Educational Center, 2014.
- Hasanuddin. *Sukadana; Suatu Tinjauan Sejarah Kerajaan Tradisional Kalimantan Barat*, Pontianak: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, 2000.
- Hasjmy, A. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: Penerbit Ma'arif, 1993.
- Kanumoyoso, Bondan. *Mata Ajar Metode Sejarah Lokal*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah, 2016.
- Lapian, A. B. *Orang Laut, Raja Laut, Bajak Laut*, Depok: Komunitas Bambu, 2009.
- Mahirat, Gusti. *Silsilah Kerajaan Simpang*, t.tp: tanpa penerbit, 1956.
- Mulia, Gusti Mhd. *Sekilas Menapak Langkah Kerajaan Tanjungpura*, Pontianak: Percetakan Firma Muara Mas, 2007.
- Muljana, Slamet. *Runtuhnya kerajaan Hindu-Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara*, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Sewang, Ahmad M. *Islamisasi Kerajaan Gowa abad XVI sampai abad XVII*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Soedarto, *Naskah Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908 – 1950*, Pontianak: Pamerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, 1989.
- Sulistiyono, Singgih Tri. "Penulisan Sejarah Lokal di Era Otonomi Daerah: Metode, Masalah, dan Strategi," Makalah, 2009.
- Tim BPS Kayong Utara, *Kayong Utara dalam Angka 2020*, Sukadana: BPS Kayong Utara, 2020.
- Van Leur, J. C. *Indonesian Trade and Society; Essays in Asian Social and Economic History*, USA: Foris Publication, 1983.
- Veth, P. J. *Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch Indie, bewerkt naar de jongste en beste berigten. Vol. 1*, Amsterdam: Van Kampen, 1869.
- Veth, P. J. *Borneo's Westerafdeeling Geographisch, Statistisch, Historisch. Voorafgegaan door eene algemeene schets des ganschen eilands, Eerste deel*, Zaltbommel: Joh Noman en Zoon. 1854.

Jurnal

- Ali, Ismail dan Jamaludin Moksan. "Meriam Sultan Setebuk: Simbol Keagungan Sejarah Maritim Orang Iranun di Tempasuk, Sabah", dalam *Susurgalur*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Ali, Ismail dan Mosli Tarsat. "The Iranun in Borneo: Pirates or Heroes from The Maritime Perspective", dalam *SEJARAH: Journal of the Department of History*, Vol. 16, 2017.

- Atsushi, Ota ed. *In The Name of Battle againts Piracy; Ideas and Practices in State Monopoly of Maritime Vilence in Europe and Asia in the Period of Transition*, Leiden: Brill, 2018.
- Barnard, Timothy P. "Celates, Rayat-Laut, pirates: The Orang Laut and their decline in history", dalam *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. 80. 2007.
- Barth, J.P.J., "Overzicht der Afdeeling Soekadana", dalam *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (VBG)*, Deel L. 2^e Stuk, 1896.
- Campo, J. N. F. M. à. "Patronen, Processen en Periodisering van Zeeroof en Zeeroofbestrijding in Nederlands-Indië", dalam *Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis*, Vol. 3, No. 2, 2006.
- Cense, Ant Abr dan Hendrik Jan Heeren, "Pelajaran dan pengaruh kebudayaan Makassar-Bugis di pantai utara Australia", dalam *Bhratara*, Vol. 18, 1972.
- Chou, Cynthia. "Contesting the tenure of territoriality: the Orang Suku Laut", dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, Vol. 153, 1997.
- Dewall, H. Von "Matan, Simpang, Soekadana, de Karimata-eilanden en Koeboe (Wester-afdeeling van Borneo)" dalam *Tijdschrift voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (TBG)*, Vol. 11, 1862.
- Duija, I. Nengah. "Tradisi lisan, naskah, dan sejarah Sebuah catatan politik kebudayaan," dalam *Wacana*, Vol. 7, No. 2, 2005.
- Dumon, Patrick. "Amsterdam: The VOC warehouse at the Mouth of the Chao Phraya River", dalam *The Journal of the Siam Society*, Vol. 102, 2014.
- Francis, E. A. "Westkust van Borneo in 1832", dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië (TNI)*, Vol. 4, No. 2, 1842.
- Himmelman, Nikolaus P. "The Austronesian languages of Asia and Madagascar: typological characteristics", dalam *The Austronesian languages of Asia and Madagascar*, Vol. 110, 2005.
- Irwin, Douglas A. "Mercantilism as strategic trade policy: the Anglo-Dutch rivalry for the East India trade", dalam *Journal of Political Economy*, Vol. 99, No. 6, 1991.
- Khan, Muhammad Muavia dan Muhammad Imran. "Islam and Good Governance (An Analytical Study)", dalam *Al-Qalam*, Vol. 24, No. 2, 2019.
- King, Victor T. "Ethnicity in Borneo: an anthropological problem", dalam *Asian Journal of Social Science*, Vol. 10, No. 1, 1982.
- Luijmes, A. *Algemeene orders, reglementen en instructiën voor het Nederlandsch Oost-Indisch leger, 1831-1873. Vol. 1*, Leiden: Gualth Kolff, 1874.
- Madjid, M. Dien dkk. *Berebut tahta di Pulau Bangka: ketokohan Depati Amir dalam catatan Belanda (Suatu Kajian Arsip)*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN), 2015.
- Mubarok dkk, "Islam nusantara: Moderasi islam di Indonesia", dalam *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Purwanto, Bambang. "Historisme baru dan kesadaran dekonstruktif: kajian kritis terhadap historiografi Indonesiasentris", dalam *Humaniora*, Vol. 13, No. 1, 2001.

- Schrire, Carmel dan Janette Deacon. "The indigenous artefacts from Oudepost I, a colonial outpost of the VOC at Saldanha Bay, Cape", dalam *The South African Archaeological Bulletin*, 1989.
- Sharif, Harlina Md dan Hazman Hazumi, "Reconstruction of The Earliest Mosque in Malaysia Using Virtual Reality Technique", dalam *Archives & Museum Informatics*, Vol. 2, 2004.
- Sunarningsih. "Kerajaan Negara Daha di Tepian Sungai Negara, Kalimantan Selatan," dalam *Naditira Widya*, Vol. 7, No. 2, 2013.
- Swee-Hock, Saw. "Population trends in Singapore, 1819–1967", dalam *Journal of Southeast Asian History*, Vol. 10, No. 1, 1969.
- Taylor, Jean Gelman. "The sewing-machine in colonial-era photographs: a record from Dutch Indonesia", dalam *Modern Asian Studies*, Vol. 46, No. 1, 2012.
- Teitler, Ger. "Piracy in Southeast Asia: A Historical Comparison", dalam *Maritime Studies*, Vol. 1, No. 1, 2002.
- Van der Kemp, P. H., "De Vestiging van Het Nederlandsch Gezag op Borneo's Westerafdeeling in 1818-1819 naar Onuitgegeven Stukken", dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië* 1/2de Afl, 1920.
- Van Dissel, Anita. "Grensoverschrijdend optreden. Zeeroof en zeeroofbestrijding in Nederlands-Indië", dalam *Leidschrift*, Vol. 26, 2011.
- Warren, James Francis. "Saltwater slavers and captives in the Sulu Zone, 1768–1878", dalam *Slavery and Abolition*, Vol. 31, NO. 3, 2010.
- Winstedt, R. O. "The advent of Muhammadanism in the Malay Peninsula and Archipelago", dalam *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. 77, 1917.
- _____. "The Date of the Malacca Legal Codes", dalam *Journal of the Royal Asiatic Society*, Vol. 85, No. 1-2, 1953.

On Line

- <http://kongres.kebudayaan.id/kabupaten-kayong-utara/>, diakses pada Senin, 6 Juli 2020.
- <http://kerajaansimpang.blogspot.com/>, diakses pada pukul 10.30, Jumat, 30 April 2020.

Lampiran – Lampiran



Gambar 1: Rumah Residen di Pontianak. Sukadana masuk dalam wilayah administrasi Residensi Borneo Barat yang berkedudukan di Pontianak. Foto diambil pada 1867) (Sumber: KITLV Image)



Gambar 2: Rumah nelayan dan perahunya di Pontianak. Gambaran pemukiman di Sukadana tidak jauh seperti ini. Foto diambil pada 1890. (sumber: KITLV Image)



Gambar 3: Mercusuar di Karimata. Mercusuar menjadi bangunan penting untuk menjaga keamanan di perairan. Gambar diambil pada 1909 (sumber: KITLV Image)

